

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2020, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Biro Umum Tahun 2020 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, tidak ada realisasi pembiayaan sedangkan untuk realisasi pendapatan tahun 2020 adalah Rp191.500.000,00 atau 75,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp254.634.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp100.023.386.263,95 atau 87,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.542.487.501,75.
2. Laporan Operasional (LO) memberikan informasi tentang pendapatan, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa. Berdasarkan laporan ini tidak ada realisasi transfer, dan pos – pos luar biasa. Realisasi pendapatan – LO tahun 2020 sebesar Rp209.500.000,00, beban Rp107.917.562.728,01, dan kegiatan non operasional

Rp823.428.476,00. Sehingga surplus defisit LO tahun 2020 sebesar Rp(108.531.491.204,01).

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan ini, ekuitas akhir tahun 2020 adalah Rp242.978.153.577,48. Sedangkan ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp253.422.290.542,23.
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020. Dari neraca tersebut, dapat diinformasikan bahwa nilai aset adalah Rp243.296.764.914,48. Nilai kewajiban sebesar Rp318.611.337,00, dan ekuitas sebesar Rp242.978.153.577,48 sehingga nilai kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp243.296.764.914,48.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang struktur organisasi, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, Mei 2021

**KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
Daftar Isi		
Pernyataan Tanggungjawab		
Ringkasan		
Laporan Realisasi Anggaran		
Laporan Operasional		
Laporan Perubahan Ekuitas		
Neraca		
Catatan atas Laporan Keuangan		
Bab I	Pendahuluan	14
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	14
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	15
	1.3 Sistematika penulisan Catatan atas laporan keuangan	17
Bab II	Ekonomi makro, Biro Umum, kebijakan keuangan, dan realisasi APBD	19
	2.1 Biro Umum	19
	2.2 Ekonomi Makro	24
	2.2 Kebijakan keuangan	40
	2.3 Realisasi APBD Biro Umum	46
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	47
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	47
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	49
	4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah	49
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	49
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	51
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	58
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	60
	5.1 Rincian dari penjelasan setiap pos-pos laporan keuangan	60
	5.1.1 Pendapatan– LRA	60

	5.1.2 Belanja	60
	5.1.3 Pendapatan – LO	76
	5.1.4 Beban	78
	5.1.5 Aset	97
	5.1.6 Kewajiban	124
	5.1.7 Ekuitas	125
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	130
Bab VII	Penutup	132
Daftar Lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Mei 2021

**KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

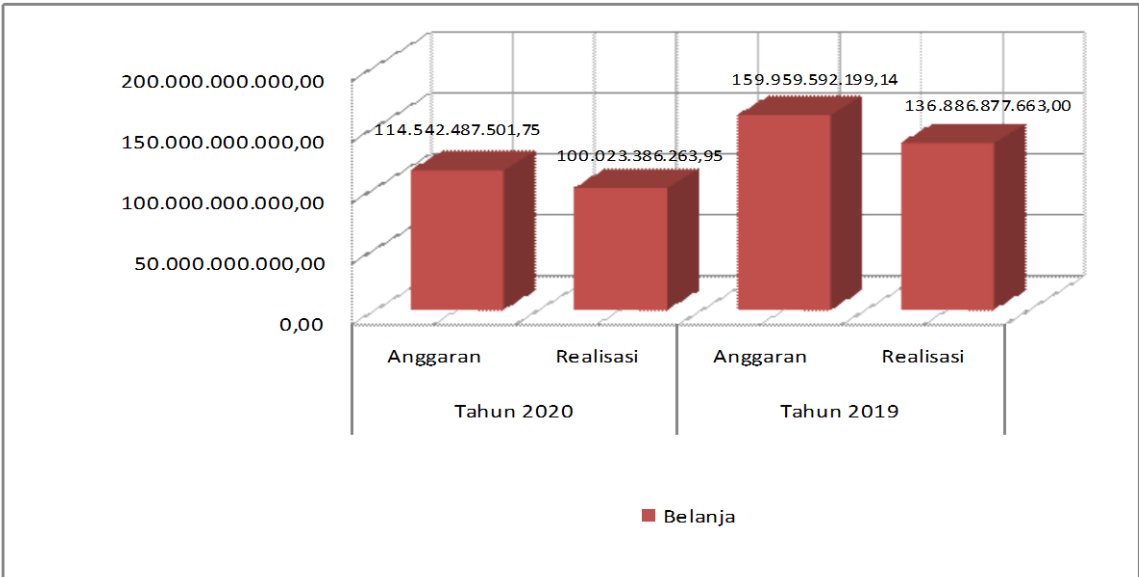
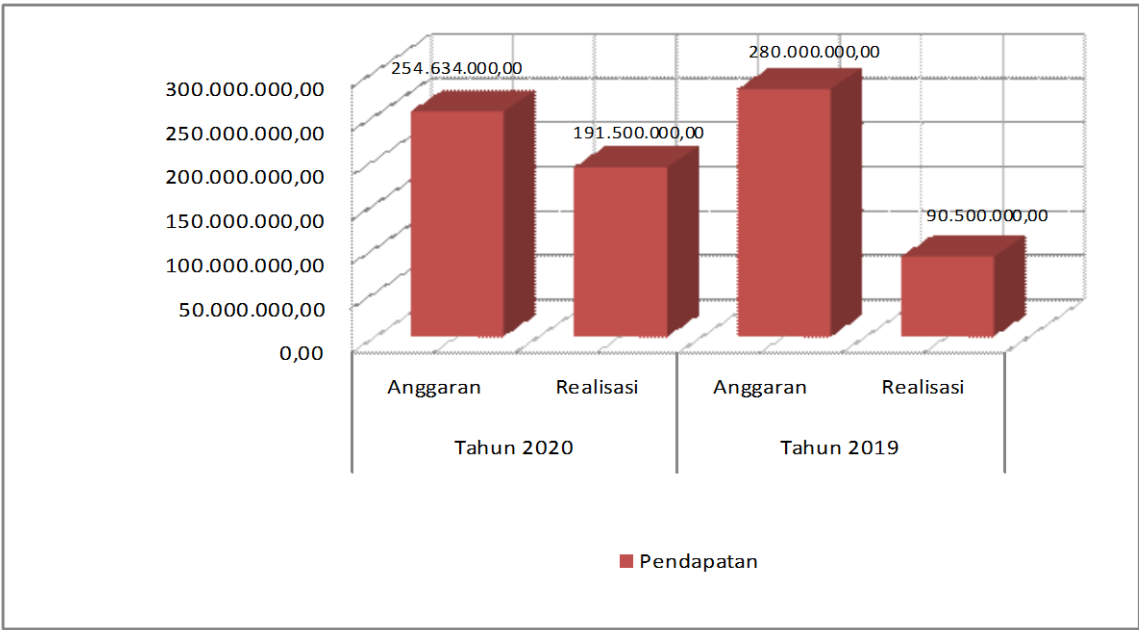
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode (1 Januari s/d 31 Desember 2020).

Realisasi pendapatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp191.500.000,00 atau mencapai 75,21% dari anggarannya sebesar Rp254.634.000,00. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp100.023.386.263,95 atau mencapai 87,32% dari anggarannya sebesar Rp114.542.487.501,75. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020 dan Tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	254.634.000,00	191.500.000,00	280.000.000,00	90.500.000,00
Belanja	114.542.487.501,75	100.023.386.263,95	159.959.592.199,14	136.886.877.663,00



2. Laporan Operasional (LO)

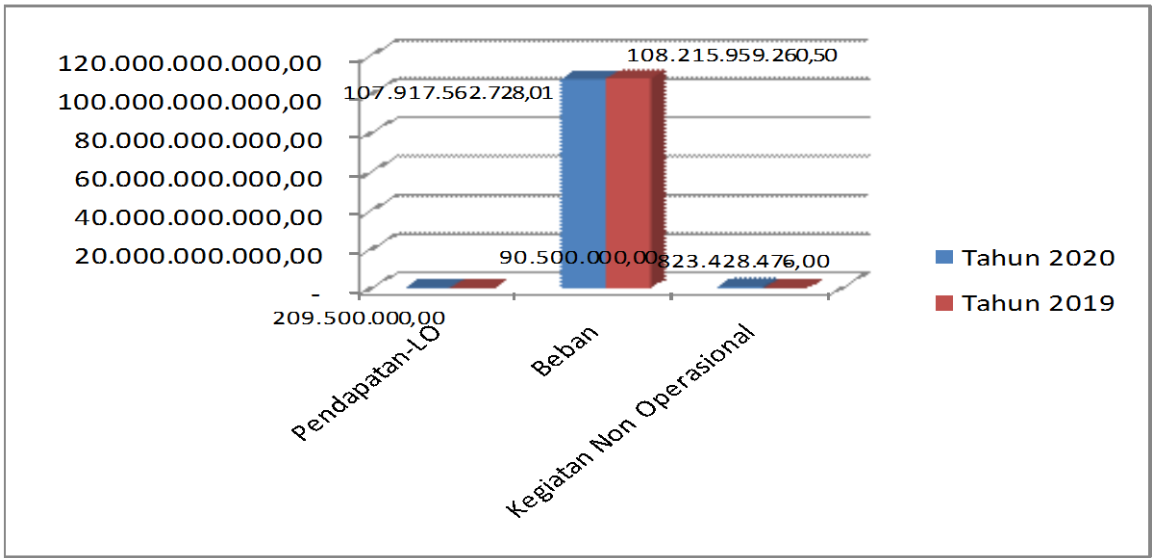
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa.

Pendapatan - LO pada tahun 2020 sebesar Rp209.500.000,00, beban

Rp107.917.562.728,01 dan kegiatan non operasional Rp823.428.476,00 sehingga surplus defisit LO tahun 2020 sebesar Rp(108.531.491.204,01). Sedangkan pendapatan – LO tahun 2019 Rp90.500.000,00, beban Rp108.215.959.260,50 dan kegiatan non operasional Rp0,00 sehingga surplus defisit LO tahun 2019 sebesar Rp(108.125.459.260,50). Ringkasan Laporan Operasional (LO) tahun 2020 dan tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan-LO	209.500.000,00	90.500.000,00	119.000.000,00	131,49
Beban	107.917.562.728,01	108.215.959.260,50	(298.396.532,49)	(0,28)
Kegiatan Non Operasional	823.428.476,00	-	823.428.476,00	-
	(108.531.491.204,01)	(108.125.459.260,50)	(406.031.943,51)	0,38



3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal berasal dari ekuitas akhir 2019 sebesar Rp253.422.290.542,23. Ekuitas awal tersebut kemudian ditambah surplus/defisit – LO tahun 2020 sebesar Rp(108.531.491.204,01), koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp(178.579.843,00) dan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp98.265.934.082,26 sehingga ekuitas akhir 2020 sebesar Rp242.978.153.577,48. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Ekuitas awal	253.422.290.542,23	228.351.810.056,73
Surplus/Defisit - LO	(108.531.491.204,01)	(108.125.459.260,50)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
- Koreksi Ekuitas Lainnya	(178.579.843,00)	(3.600.437.917,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	98.265.934.082,26	136.796.377.663,00
Ekuitas Akhir	242.978.153.577,48	253.422.290.542,23

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah aset tahun 2020 adalah sebesar Rp243.296.764.914,48 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp132.575.805,76, aset tetap sebesar Rp235.066.902.019,02, aset lainnya sebesar Rp8.097.287.089,70. Sementara itu jumlah kewajiban tahun 2020 sebesar Rp318.611.337,00 dan ekuitas tahun 2020 sebesar Rp242.978.153.577,48 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas tahun 2020 sebesar Rp243.296.764.914,48.

Ringkasan neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
Aset			
- Aset Lancar	132.575.805,76	120.755.508,50	11.820.297,26
- Aset Tetap	235.066.902.019,02	245.617.368.564,03	(10.550.466.545,01)
- Aset Lainnya	8.097.287.089,70	7.980.149.339,70	117.137.750,00
Jumlah Aset	243.296.764.914,48	253.718.273.412,23	(10.421.508.497,75)
Kewajiban	318.611.337,00	295.982.870,00	22.628.467,00
Ekuitas	242.978.153.577,48	253.422.290.542,23	(10.444.136.964,75)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	243.296.764.914,48	253.718.273.412,23	(10.421.508.497,75)

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH(BERKURANG)		REALISASI 2019 (Rp)
		ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN - LRA	254.634.000,00	191.500.000,00	(63.134.000,00)	75,21	90.500.000,00
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	254.634.000,00	191.500.000,00	(63.134.000,00)	75,21	90.500.000,00
4. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	254.634.000,00	191.500.000,00	(63.134.000,00)	75,21	90.500.000,00
4. 1. 2. 15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	254.634.000,00	191.500.000,00	(63.134.000,00)	75,21	90.500.000,00
4. 1. 4.	Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-	-	-
4. 1. 4. 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan - LRA	-	-	-	-	-
5	BELANJA	114.542.487.501,75	100.023.386.263,95	(14.519.101.237,80)	87,32	136.886.877.663,00
5. 1.	BELANJA OPERASI	101.046.390.701,75	90.673.086.343,95	(10.373.304.357,80)	89,73	90.086.467.364,00
5. 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	61.065.809.402,00	55.462.033.079,00	(5.603.776.323,00)	90,82	52.087.904.034,00
5. 1. 1. 01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	27.406.489.402,00	24.571.023.079,00	(2.835.466.323,00)	89,65	25.154.475.034,00
5. 1. 1. 02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	22.554.100.000,00	20.785.944.000,00	(1.768.156.000,00)	92,16	17.163.751.000,00
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KOHWWKDH	2.000.000.000,00	1.850.000.000,00	(150.000.000,00)	92,50	1.980.000.000,00
5. 1. 1. 06.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	-	-
5. 1. 1. 08.	Belanja Honorarium PNS	2.584.420.000,00	2.254.070.000,00	(330.350.000,00)	87,22	2.545.760.000,00
5. 1. 1. 09.	Belanja Honorarium Non PNS	6.512.400.000,00	6.000.996.000,00	(511.404.000,00)	92,15	5.243.918.000,00
5. 1. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.980.581.299,75	35.211.053.264,95	(4.769.528.034,80)	88,07	37.998.563.330,00
5. 1. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.249.293.465,75	6.147.287.797,00	(102.005.668,75)	98,37	4.696.762.514,00
5. 1. 2. 02.	Belanja Bahan/Material	1.710.761.500,00	1.630.242.200,00	(80.519.300,00)	95,29	1.446.663.700,00
5. 1. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	8.143.432.870,00	7.109.476.745,00	(1.033.956.125,00)	87,30	7.060.308.539,00
5. 1. 2. 04.	Belanja Premi Asuransi	687.080.000,00	492.729.819,00	(194.350.181,00)	71,71	421.791.221,00
5. 1. 2. 05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.978.325.416,00	2.172.610.547,00	(805.714.869,00)	72,95	1.926.813.113,00
5. 1. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	949.845.550,00	873.001.650,00	(76.843.900,00)	91,91	554.358.000,00
5. 1. 2. 07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	560.000.000,00	386.350.459,00	(173.649.541,00)	68,99	414.993.324,00
5. 1. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	979.533.302,00	594.746.065,00	(384.787.237,00)	60,72	790.850.261,00
5. 1. 2. 10.	Belanja Sewa a Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.220.000,00	1.422.287.500,00	(127.932.500,00)	91,75	2.018.205.000,00
5. 1. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.551.686.771,00	5.258.240.942,00	(293.445.829,00)	94,71	6.305.103.785,00
5. 1. 2. 12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	76.936.000,00	68.200.000,00	(8.736.000,00)	88,65	842.908.500,00
5. 1. 2. 13.	Belanja Pakaian Kerja	62.000.000,00	60.700.000,00	(1.300.000,00)	97,90	52.505.200,00
5. 1. 2. 14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	62.800.000,00	55.000.000,00	(7.800.000,00)	87,58	51.422.000,00
5. 1. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.817.567.875,00	4.525.909.818,00	(1.291.658.057,00)	77,80	7.846.845.642,00
5. 1. 2. 18.	Belanja Pemeliharaan	4.562.118.550,00	4.378.689.922,95	(183.428.627,05)	95,98	2.869.033.975,00
5. 1. 2. 23.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	38.980.000,00	35.579.800,00	(3.400.200,00)	91,28	699.998.556,00
5. 2.	BELANJA MODAL	13.496.096.800,00	9.350.299.920,00	(4.145.796.880,00)	69,28	46.800.410.299,00
5. 2. 2.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	12.430.008.800,00	8.803.779.420,00	(3.626.229.380,00)	70,83	19.156.839.920,00
5. 2. 2. 03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	-	-	-	#DIV/0!	196.740.000,00
5. 2. 2. 04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.050.000.000,00	147.840.000,00	(2.902.160.000,00)	4,85	1.606.492.696,00
5. 2. 2. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	183.000.000,00	178.992.000,00	(4.008.000,00)	97,81	-
5. 2. 2. 14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	410.000.000,00	406.377.000,00	(3.623.000,00)	99,12	273.307.400,00
5. 2. 2. 15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.562.638.800,00	4.210.794.250,00	(351.844.550,00)	92,29	9.379.060.751,00
5. 2. 2. 16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	721.500.000,00	597.649.000,00	(123.851.000,00)	82,83	930.227.550,00
5. 2. 2. 17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	#DIV/0!	2.472.696.873,00
5. 2. 2. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	2.929.270.000,00	2.764.027.270,00	(165.242.730,00)	94,36	4.224.694.650,00
5. 2. 2. 19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	371.600.000,00	361.271.900,00	(10.328.100,00)	97,22	73.620.000,00
5. 2. 2. 22.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	100.000.000,00	43.395.000,00	(56.605.000,00)	43,40	-
5. 2. 2. 35.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	102.000.000,00	83.433.000,00	(18.567.000,00)	81,60	-
5. 2. 3.	Belanja Gedung Dan Bangunan	965.068.000,00	447.432.500,00	(517.635.500,00)	46,36	27.357.802.179,00
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	645.300.000,00	349.499.500,00	(295.800.500,00)	54,16	27.160.527.179,00
5. 2. 3. 02.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	319.768.000,00	97.933.000,00	(221.835.000,00)	30,63	197.275.000,00
5. 2. 5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	101.020.000,00	99.088.000,00	(1.932.000,00)	98,09	285.768.200,00
5. 2. 5. 01.	Belanja Modal Pengadaan Buku	-	-	-	-	-
5. 2. 5. 03.	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	-	-	223.893.200,00
5. 2. 5. 04.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-
5. 2. 5. 07.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	101.020.000,00	99.088.000,00	(1.932.000,00)	98,09	61.875.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(114.287.853.501,75)	(99.831.886.263,95)	14.455.967.237,80	87,35	(136.796.377.663,00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(114.287.853.501,75)	(99.831.886.263,95)	14.455.967.237,80	87,35	(136.796.377.663,00)

Palangka Raya, Mei 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19680901 198911 2 005

LAPORAN OPERASIONAL




BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

NO.URUT	URAIAN	SALDO 2020 Rp	SALDO 2019 Rp	KENAIKAN/PENURUNAN Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
8.	PENDAPATAN - LO	209.500.000,00	90.500.000,00	119.000.000,00	131,49
8. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	209.500.000,00	90.500.000,00	119.000.000,00	131,49
8. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	209.500.000,00	90.500.000,00	119.000.000,00	131,49
	Lain-Lain PAD Yang Sah - LO	-		-	-
9.	BEBAN	107.917.562.728,01	108.215.959.260,50	(298.396.532,49)	(0,28)
9. 1.	BEBAN OPERASI	107.917.562.728,01	108.215.959.260,50	(298.396.532,49)	(0,28)
9. 1. 1.	Beban Pegawai - LO	55.470.415.630,00	52.076.438.432,00	3.393.977.198,00	6,52
9. 1. 2.	Beban Persediaan	15.234.588.389,00	17.175.355.950,00	(1.940.767.561,00)	(11,30)
9. 1. 2.	Beban Jasa	10.083.238.506,74	11.405.533.566,17	(1.322.295.059,43)	(11,59)
9. 1. 2.	Beban Pemeliharaan	6.566.645.469,95	4.940.828.088,00	1.625.817.381,95	32,91
9. 1. 2.	Beban Perjalanan Dinas	4.550.167.018,00	7.846.845.642,00	(3.296.678.624,00)	(42,01)
9. 1. 3.	Beban Bunga	-	-	-	-
9. 1. 4.	Beban Subsidi	-	-	-	-
9. 1. 5.	Beban Hibah	-	-	-	-
9. 1. 6.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
9. 1. 7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	15.635.362.114,32	14.770.757.582,33	864.604.531,99	5,85
9. 1. 8.	Beban Penyisihan Piutang	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
9. 1. 9.	Beban Lain - Lain	368.145.600,00	200.000,00	367.945.600,00	183.972,80
					-
9. 2.	BEBAN TRANSFER	-	-	-	-
9. 2. 1.	beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
9. 2. 2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
9. 2. 5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 6.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
9. 2. 7.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	-	-	-	-
9. 3.	DEFISIT NON OPERASIONAL	823.428.476,00	-	823.428.476,00	#DIV/0!
9. 3. 1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
9. 3. 2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
9. 3. 3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	823.428.476,00	-	823.428.476,00	#DIV/0!
9. 4.	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
9. 4. 1.	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(108.531.491.204,01)	(108.125.459.260,50)	(406.031.943,51)	0,38

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

U R A I A N	SALDO 2020 Rp	SALDO 2019 Rp
2	3	4
EKUITAS AWAL	253.422.290.542,23	228.351.810.056,73
SURPLUS/DEFISIT-LO	(108.531.491.204,01)	(108.125.459.260,50)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
- Koreksi Ekuitas Lainnya	(178.579.843,00)	(3.600.437.917,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	98.265.934.082,26	136.796.377.663,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	242.978.153.577,48	253.422.290.542,23

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam keempat laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Biro Umum selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Biro Umum digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Biro Umum dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Biro Umum menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan Biro Umum serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Biro Umum mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Biro Umum apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Umum Tahun 2020 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 No.8);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 No.56);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 27);
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tidak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

I.3. SISTIMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II BIRO UMUM, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN REALISASI APBD

- 2.1. Biro Umum
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Realisasi APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan - LRA
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.2 Belanja
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
 - 5.1.3 Pendapatan – LO
 - a. Pendapatan Asli Daerah

5.1.4 Beban

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang dan Jasa

5.1.5 Aset

- a. Aset Lancar
- b. Aset Tetap
- c. Aset Lain-lain

5.1.6 Kewajiban

- a. Kewajiban Jangka Pendek
- b. Kewajiban Jangka Panjang

5.1.7 Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BABVII PENUTUP

BAB II

BIRO UMUM, EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN SERTA REALISASI APBD BIRO UMUM

II.1. BIRO UMUM

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum merupakan salah satu unsur staf yang berada di bawah Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan Eselon II.b.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Biro Umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset, verifikasi dan akuntansi, pelaksanaan urusan rumah tangga, serta perlengkapan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tugas Biro Umum;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang tugas Biro Umum;

3. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang tata usaha, tata usaha keuangan, perlengkapan, rumah tangga Sekretariat Daerah;
4. Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang tata usaha, tata usaha keuangan, perlengkapan, rumah tangga Sekretariat Daerah;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan umum dan pimpinan;
6. Pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
7. Pelaksanaan urusan penatausahaan aset Sekretariat Daerah;
8. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
9. Pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah;
10. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian biro;
11. Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha, penatausahaan keuangan dan aset, perlengkapan dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

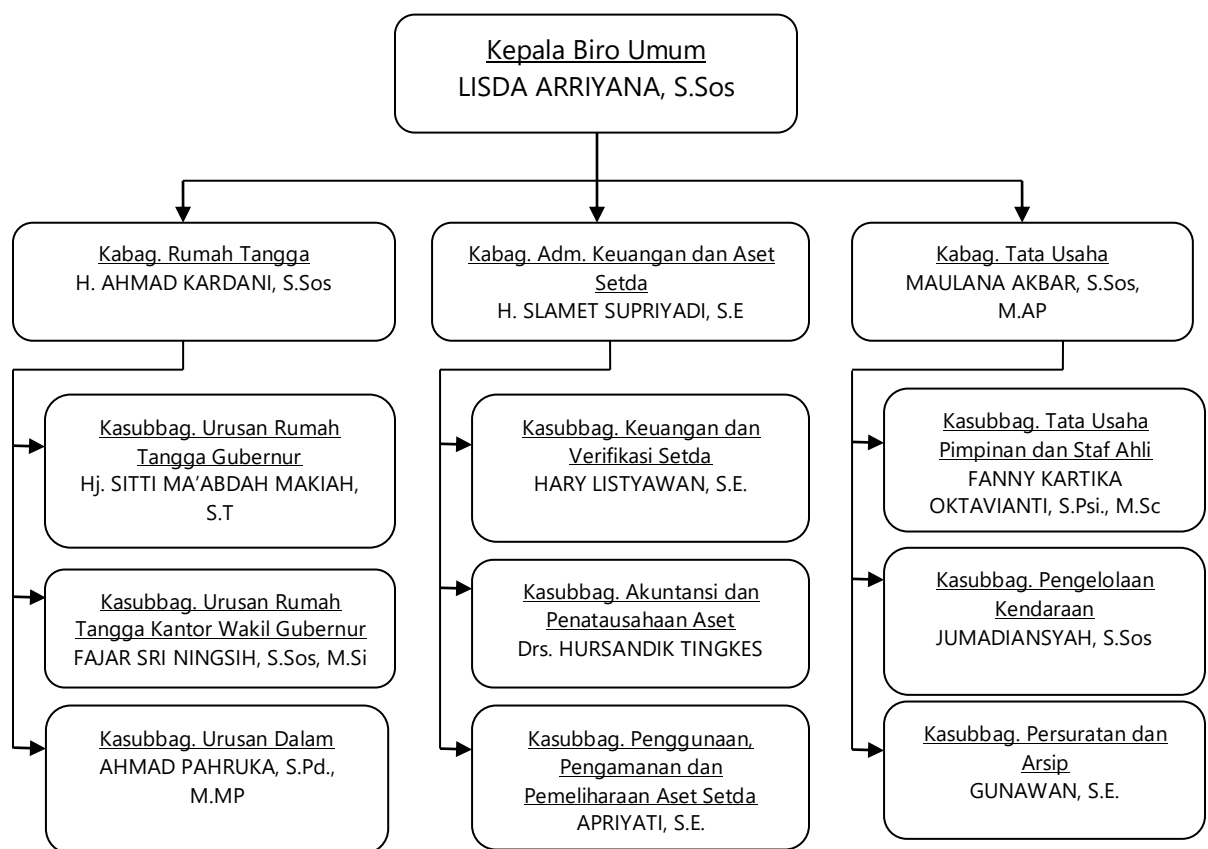
C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 130 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Rumah Tangga, membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - b) Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Urusan Dalam.
3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda, membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda;
 - b) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan

- c) Kepala Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda.
- 4. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip.

Struktur Organisasi Biro Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Jumlah pegawai Biro Umum per 31 Desember 2020 sebanyak 106orang untuk PNS dan 168 orang untuk tenaga honorer. PNS laki-laki sebanyak 77 orang dan PNS perempuan sebanyak 29 orang. Tenaga honorer laki-laki sebanyak 103 orang dan tenaga honorer perempuan sebanyak 65 orang.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang berpengaruh dibidang tugas Biro Umum antara lain yaitu:

1. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan ketegasan tentang tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program/ kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Jumlah sumber daya manusia yang cukup besar.
3. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai sehingga mendukung penyelesaian pelaksanaan tugas.
4. Dinamika Pembangunan di Kalimantan Tengah meningkatkan peran dan posisi tawar Kalimantan Tengah khususnya Kepala Daerah sehingga pelayanan terhadap tamu-tamu daerah dituntut untuk lebih baik.

E. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengahadalah ***Menjadi Organisasi Modern Yang Dilandasi Semangat Isen Mulang Untuk Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.***

2. MISI

Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Visi yang ada tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menetapkan Misi-nya sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan administrasi perkantoran.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional.

F. TUJUAN RENSTRA DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai Visi Misi, yaitu :

a. Misi Pertama

Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan administrasi perkantoran.

Tujuan:

Mewujudkan ketatausahaan dan administrasi perkantoran yang handal.

Sasaran:

Terwujudnya ketatausahaan dan administrasi perkantoran yang handal.

b. Misi Kedua

Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.

Tujuan:

Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.

Sasaran:

Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi.

c. Misi Ketiga

Memberikan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang prima.

Tujuan:

Menjamin kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Sasaran:

Terwujudnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang handal.

d. Misi Keempat

Meningkatkan pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional.

Tujuan:

Mewujudkan pengelolaan barang daerah semakin efektif dan fungsional.

Sasaran:

Terwujudnya pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional.

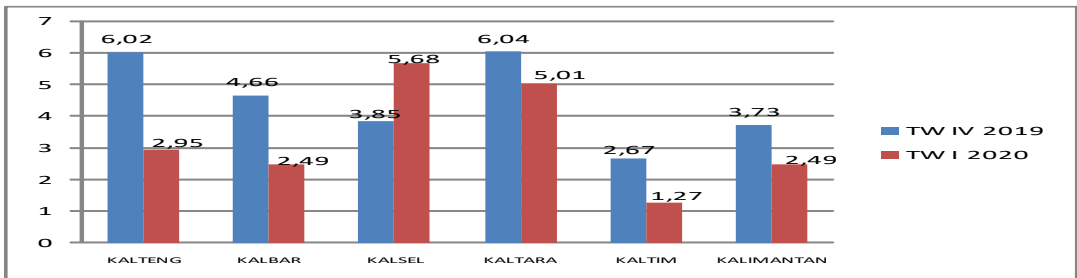
II.2. EKONOMI MAKRO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja ekonomi regional Kalimantan pada triwulan I tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,49% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar 3,73% (yoy). Secara umum, perlambatan ekonomi di Kalimantan dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian batu bara di Kalimantan Timur, sebagai provinsi dengan pangsa ekonomi terbesar di wilayah Kalimantan. Kalimantan Timur menguasai 49,94% pangsa ekonomi di Kalimantan sedangkan Kalimantan Tengah tercatat sebesar Rp11,79%.

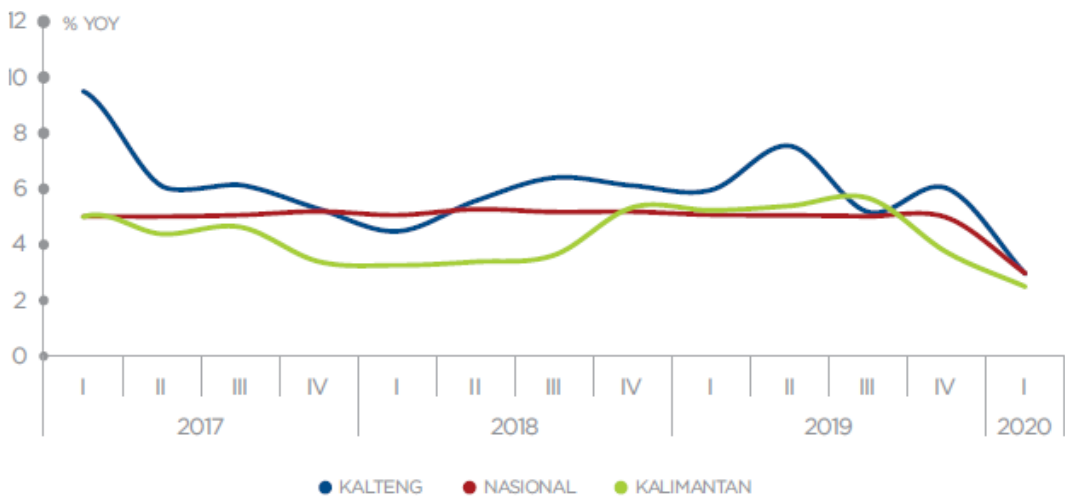
Sejalan dengan perkembangan regional, kinerja ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2020 menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Laju perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 2,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan IV 2019 sebesar 6,02% (yoy).

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Kalimantan.



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah (BI, Mei 2020)

Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah (BI, Mei 2020)

Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi bersumber dari kinerja ekspor yang mengalami kontraksi dampak lemahnya harga komoditas global, dan melambatnya konsumsi RT dan investasi. Sementara itu dari sisi penawaran, telah lewatnya masa puncak panen TBS (Tandan Buah Segar) pada akhir 2019 menjadi faktor yang menahan kinerja lapangan usaha industri pertanian, dan berdampak terhadap lapangan usaha industri pengolahan yang memiliki input berupa TBS (Tandan Buah Segar). Disamping itu lapangan usaha konstruksi mengalami kontraksi yang cukup dalam pada triwulan I 2020, hal ini disebabkan oleh terbatasnya aktivitas proyek pada awal tahun dampak merebaknya covid-19.

Kinerja perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan II 2020 diperkirakan melambat, disebabkan oleh merebaknya Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas perekonomian. Dari sisi pengeluaran, ekspor diperkirakan mengalami kontraksi sejalan dengan perlambatan kinerja

lapangan usaha, di samping itu impor diperkirakan juga turun lebih dalam seiring dengan rendahnya konsumsi masyarakat pada masa pandemi dan realisasi investasi swasta dan pemerintah.

B. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Penghitungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini akan membandingkan tahun 2019 dan 2018 karena keterbatasan sumber data. Salah satu cara untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu dari Lapangan Usaha dan Pengeluaran. PDRB melalui pendekatan lapangan usahamerupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate;jasa perusahaan;administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 masih berbasis pada kelompok sektor tersier terutama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor petambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini sesuai dengan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha yang ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019
(dalam Miliar Rupiah)

No	SEKTOR/SUB SEKTOR	2018*)	%	2019**)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.812,5	20,9%	21.186,1	21,1%
2	Pertambangan dan Penggalian	14.784,2	15,6%	15.663,3	15,6%
3	Industri Pengolahan	14.736,7	15,6%	15.365,0	15,3%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	78,8	0,1%	86,3	0,1%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	74,3	0,1%	78,7	0,1%
6	Konstruksi	7.982,6	8,4%	8.537,8	8,5%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.241,1	11,9%	11.941,5	11,9%
8	Transportasi dan Pergudangan	6.064,2	6,4%	6.549,3	6,5%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.608,2	1,7%	1.705,5	1,7%
10	Informasi dan Komunikasi	1.147,9	1,2%	1.206,9	1,2%
11	Jasa Keuangan dan Komunikasi	2.972,3	3,1%	3.153,0	3,1%
12	Real Estate	1.874,9	2,0%	1.956,9	1,9%
13	Jasa Perusahaan	35,0	0,0%	37,4	0,0%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	5.524,1	5,8%	5.892,0	5,9%
15	Jasa Pendidikan	4.105,1	4,3%	4.363,0	4,3%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.646,8	1,7%	1.732,9	1,7%
17	Jasa Lainnya	912,2	1,0%	972,9	1,0%
Jumlah		94.600,9	100%	100.428,5	100%

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sedangkan menurut Produk Dometik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, sektor usaha yang menopang perekonomian Kalimantan Tengah adalah sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan; sektor petambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019
(dalam Miliar Rupiah)

No	SEKTOR/SUB SEKTOR	2018*)	%	2019**)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.629,1	19,9%	27.629,1	19,9%
2	Pertambangan dan Penggalian	16.480,4	11,9%	16.480,4	11,9%
3	Industri Pengolahan	21.777,5	15,7%	21.777,5	15,7%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	112,3	0,1%	112,3	0,1%
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	129,2	0,1%	129,2	0,1%
6	Konstruksi	13.507,6	9,7%	13.507,6	9,7%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.866,5	12,9%	17.866,5	12,9%
8	Transportasi dan Pergudangan	9.936,8	7,2%	9.936,8	7,2%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.608,0	1,9%	2.608,0	1,9%
10	Informasi dan Komunikasi	1.376,2	1,0%	1.376,2	1,0%
11	Jasa Keuangan dan Komunikasi	4.409,8	3,2%	4.409,8	3,2%
12	Real Estate	3.117,3	2,2%	3.117,3	2,2%
13	Jasa Perusahaan	55,2	0,0%	55,2	0,0%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	8.899,0	6,4%	8.899,0	6,4%
15	Jasa Pendidikan	6.570,7	4,7%	6.570,7	4,7%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.761,4	2,0%	2.761,4	2,0%
17	Jasa Lainnya	1.481,2	1,1%	1.481,2	1,1%
Jumlah		138.718,2	100%	138.718,2	100%

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Data yang disajikan pada tabel di atas semakin menguatkan posisi Kalimantan Tengah sebagai provinsi penghasil produk pertanian dan sebagai provinsi yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa. Hal ini dikarenakan jumlah kontribusi terbesar sektoral terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berasal dari sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan serta perdagangan besar dan

eceran yang memberi kontribusi sebesar 63,9% dari PRDR atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

B. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor dan impor.

- **Pengeluaran konsumsi rumah tangga** mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung.
- **Pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)** muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi.
- **Pengeluaran konsumsi pemerintah** mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintah.
- **Pembentukan Modal Tetap Bruto** mencakup penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli barang modal baru dari dalam

negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli barang modal bekas pada pihak lain. Kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

- **Ekspor barang dan jasa** merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (non residen). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut).
- **Pembentukan Modal Tetap Bruto** mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup di sini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut jenis pengeluaran untuk Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018-2019
(dalam Miliar Rupiah)

No	SEKTOR/SUB SEKTOR	2018*)	2019**)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	36.592,6	38.451,9
	a. Makanan dan Minuman	16.340,4	17.216,7
	b. Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	1.464,0	1.555,8
	c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4.988,0	5.197,4
	d. Kesehatan dan Pendidikan	1.909,1	2.021,5
	e. Transportasi dan Komunikasi	9.228,9	9.667,7
	f. Restoran dan Hotel	956,1	1.008,3
	g. Lainnya	1.705,9	1.784,4
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.296,9	1.398,1
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.691,0	13.033,5
	a. Konsumsi Kolektif	7.701,0	7.992,3
	b. Konsumsi Individu	4.990,0	5.041,2
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	39.381,1	40.624,3
	a. Bangunan	20.504,0	21.278,0
	b. Non Bangunan	18.877,2	19.346,3
5	Perubahan Inventori	872,9	890,3
6	Ekspor Barang dan Jasa	20.516,2	28.249,2
	a. Barang	20.314,7	28.028,0
	b. Jasa	201,6	221,2
7	Dikurangi : Impor Barang dan Jasa	2.263,2	733,4
	a. Barang	2.080,9	542,9
	b. Jasa	182,3	190,5
	Dikurangi : Impor Barang dan Jasa	(14.486,6)	(21.485,3)
Produk Domestik Regional Bruto		94.600,9	100.428,7

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

*) Angka Sementara

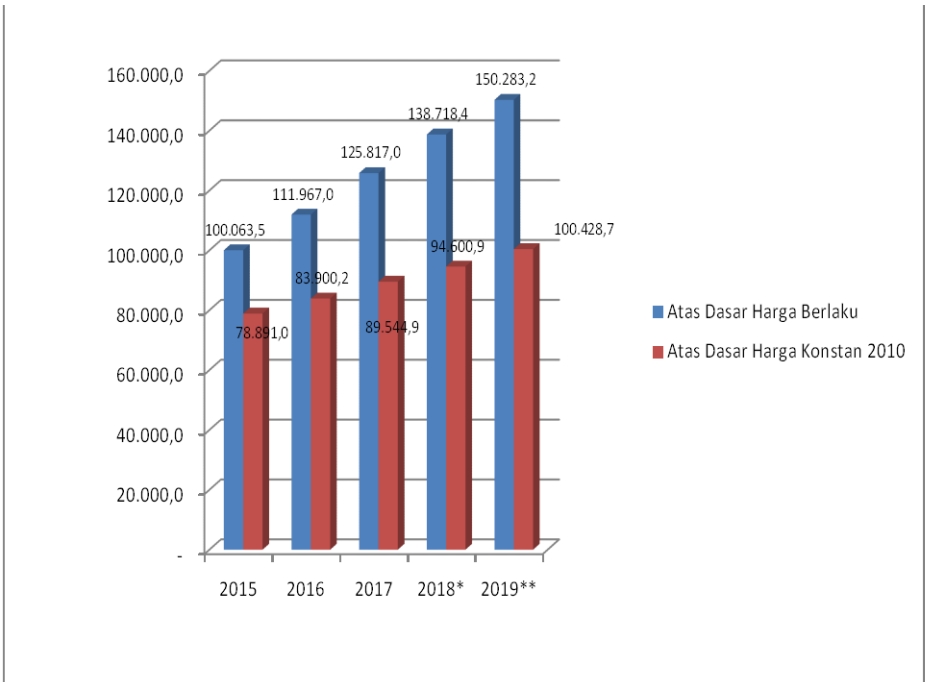
**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018-2019
(dalam Miliar Rupiah)

No	SEKTOR/SUB SEKTOR	2018*)	2019**)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56.317,9	61.924,3
	a. Makanan dan Minuman	26.219,8	28.913,5
	b. Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	2.118,6	2.358,9
	c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	7.377,2	8.020,0
	d. Kesehatan dan Pendidikan	2.828,3	3.154,7
	e. Transportasi dan Komunikasi	14.122,2	15.464,2
	f. Restoran dan Hotel	1.376,6	1.505,9
	g. Lainnya	2.275,1	2.507,1
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.935,6	2.185,2
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.743,4	19.704,5
	a. Konsumsi Kolektif	11.580,1	12.414,7
	b. Konsumsi Individu	7.163,3	7.289,8
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	60.397,7	64.919,4
	a. Bangunan	31.709,1	34.339,6
	b. Non Bangunan	28.688,6	30.579,9
5	Perubahan Inventori	1.764,6	1.966,5
6	Ekspor Barang dan Jasa	27.362,3	31.645,2
	a. Barang	27.019,6	31.265,4
	b. Jasa	342,7	379,8
7	Dikurangi : Impor Barang dan Jasa	3.531,3	1.105,0
	a. Barang	3.218,5	809,6
	b. Jasa	312,8	295,4
	Dikurangi : Impor Barang dan Jasa	(24.271,8)	(30.956,9)
Produk Domestik Regional Bruto		138.718,4	150.283,2

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020
 *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Grafik 2.3
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku
Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 tahun 2015 - 2019
(dalam Miliar Rupiah)

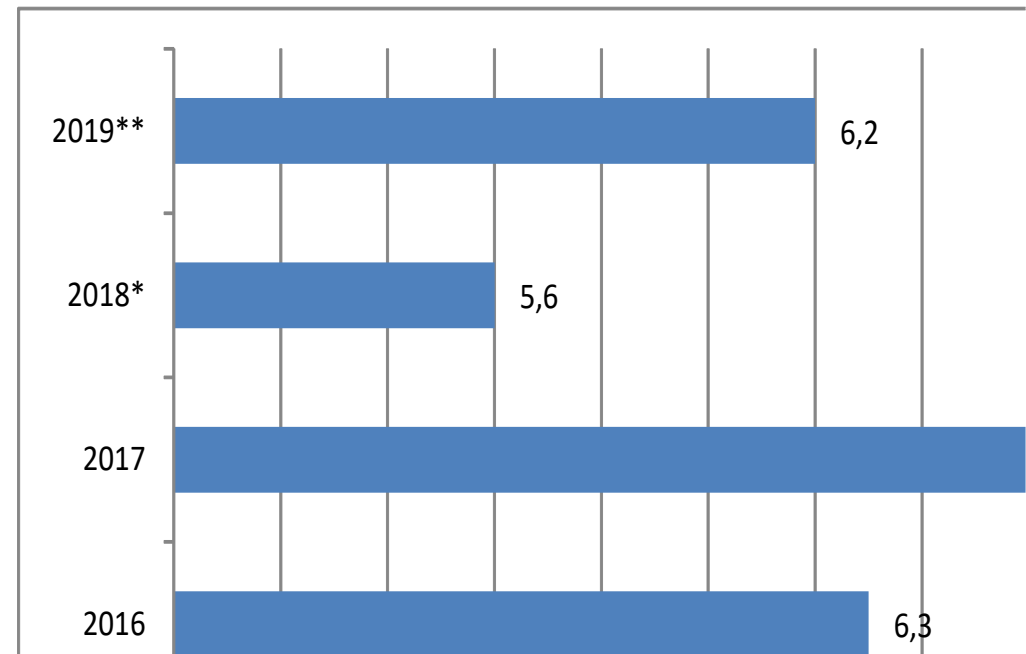


Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Grafik 2.3 menggambarkan perbandingan PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan 2010. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dengan harga berlaku maupun harga konstan 2010.

Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah secara prosentase mengalami trend naik turun dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2017 sebesar 6,7%. Sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 5,6% (angka sementara) dan tahun 2019 sebesar 6,2% (angka sangat sementara).

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Kalimantan Tengah (persen), Tahun 2016 – 2019



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota rata-rata tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Palangka Raya dengan laju pertumbuhan sebesar 7,17%, dan pertumbuhan terendah di Kabupaten Barito Selatan dengan laju pertumbuhan sebesar 4,93%. Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2018 di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi
Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota (Persen)
Tahun 2016 - 2019

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Kabupaten					
1	Kotawaringin Barat	5,85	6,80	6,46	5,79
2	Kotawaringin Timur	7,93	7,94	6,93	7,16
3	Kapuas	7,29	7,62	7,01	7,16
4	Barito Selatan	5,63	5,44	5,12	4,93
5	Barito Utara	5,48	6,01	5,95	5,42
6	Sukamara	6,12	6,28	6,17	6,05
7	Lamandau	6,69	6,70	6,86	6,88
8	Seruyan	5,12	5,18	5,21	5,19
9	Katingan	6,54	6,56	6,59	5,81
10	Pulang Pisau	6,06	5,83	5,94	6,37
11	Gunung Mas	7,00	6,63	6,87	7,29
12	Barito Timur	5,50	5,98	5,71	5,45
13	Murung Raya	5,76	5,87	5,61	5,94
Kota					
14	Palangka Raya	6,92	6,99	7,12	7,17
KALIMANTAN TENGAH		6,35	6,70	5,60	6,20

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

C. EKSPOR IMPOR

Selanjutnya, berdasarkan nilai ekspor Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 mencapai US\$527.148.497. Nilai ekspor tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,52% dari US\$476.997.558 pada tahun 2018. Apabila ditinjau berdasarkan negara tujuannya, ekspor terbesar ditujukan ke negara Tiongkok (US\$283.034.462); Jepang (US\$62.383.201); Malaysia (US\$51.678.281); Bangladesh (US\$26.456.000); dan Guinea (US\$24.059.700). Ekspor ke lima negara tersebut mencapai 84,91% dari total ekspor di tahun 2019. Meningkatnya ekspor tersebut dikarenakan semakin terbukanya perdagangan internasional sesuai dengan perjanjian-perjanjian dagang yang telah disepakati sebelumnya. Statistik mengenai kondisi ekspor

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 menurut negara tujuan di pelabuhan muat terlihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan di Pelabuhan Muat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 -2019
(dalam US\$)

No.	Negara Tujuan	2018	2019
1	Bangladesh	25.537.000	26.456.000
2	Guinea	-	24.059.700
3	India	80.068.584	23.009.106
4	Jepang	69.101.124	62.382.201
5	Kamboja	9.020.441	10.371.756
6	Kongo	-	4.538.400
7	Korea Selatan	6.152.430	1.801.785
8	Malaysia	46.486.804	51.678.281
9	Nigeria	-	3.961.650
10	Oman	1.363.324	-
11	Pakistan	36.848.955	-
12	Papua Nugini	532.453	385.248
13	Philipina	3.358.418	3.735.609
14	Saudi Arabia	5.320.728	1.481.399
15	Singapura	22.035	18.559
16	Thailand	1.514.375	3.031.385
17	Tiongkok	178.344.805	283.034.462
18	Togo	-	17.570.150
19	Uni Emirat Arab	2.310.202	-
20	Vietnam	11.015.880	9.631.806
Jumlah		476.997.558	527.147.497

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

Sedangkan jika ditinjau berdasarkan kelompok barang, tiga komoditas ekspor unggulan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Lemak & Minyak Hewani/Nabati; Bijih, Kerak, dan Abu Logam; serta Kayu dan Barang dari Kayu. Nilai ekspor ketiga komoditi tersebut pada tahun 2019 mencapai US\$489.232.872.Statistik mengenai kondisi ekspor Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 menurut jenis komoditi terlihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Pelabuhan Muat Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2018 -2019
(dalam US\$)

No.	Negara Tujuan	2018	2019
1	Ampas/Sisa Industri Makanan	13.415.365	14.688.632
2	Bahan Bakar Mineral	14.841.013	16.411.259
3	Bahan Nabati Untuk Anyam-Anyaman	-	569.878
4	Biji-bijian Berminyak	21.592.303	4.749.000
5	Berbagai Produk Kimia	16.641.322	1.478.015
6	Bijih, Kerak, dan Abu Logam	52.341.396	83.913.545
7	Ikan dan Udang	22.035	18.841
8	Kayu dan Barang dari Kayu	84.247.807	65.666.103
9	Lemak & Minyak Hewani/Nabati	273.896.315	339.653.224
Jumlah		476.997.558	527.148.497

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

Berdasarkan data besaran ekspor di atas, dapat digambarkan kinerja sektor perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah di pasar internasional. Semakin meningkatnya nilai ekspor maka posisi perdagangan semakin kuat dalam perdagangan pasar internasional atau dengan kata lain memiliki daya saing produk yang relatif cukup baik. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan nilai ekspor Provinsi Kalimantan Tengah, maka kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2020 salah satunya adalah meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur untuk memperlancar transportasi barang ekspor dari Provinsi Kalimantan Tengah dan memberi kemudahan dalam proses perijinan.

Selanjutnya, ekspor Provinsi Kalimantan Tengah juga diiringi dengan impor. Pada tahun 2019 nilai impor Provinsi Kalimantan Tengah sebesar US\$68.962.493 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar US\$225.822.534. Statistik mengenai kondisi impor Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 menurut negara asal terlihat pada tabel 2.8 berikut:

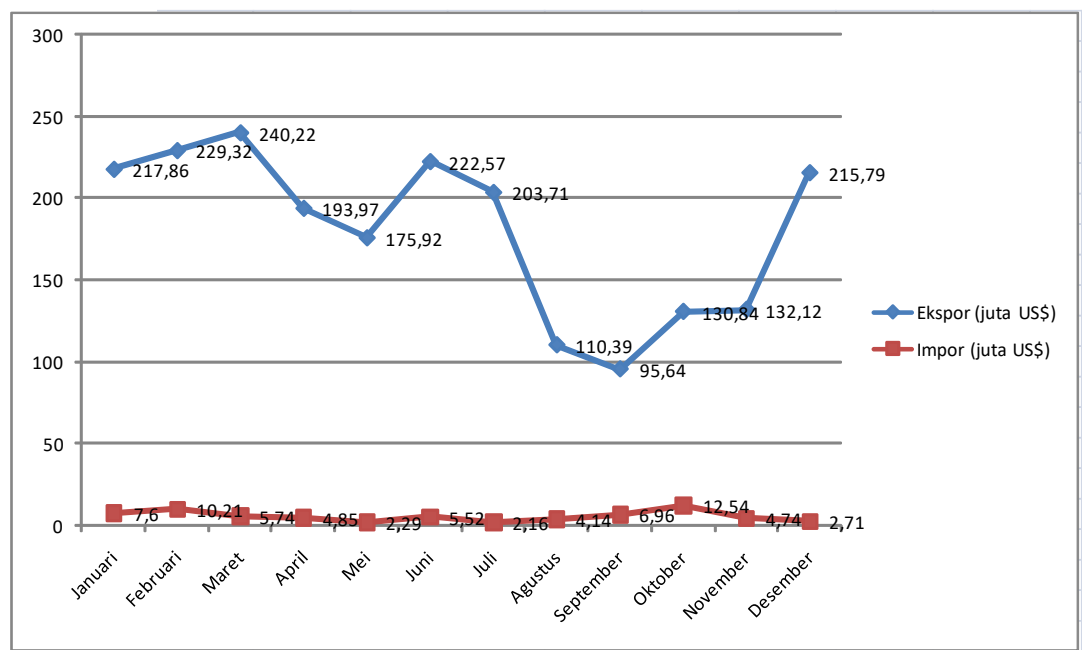
Tabel 2.8
Nilai Impor Menurut Negara Asal di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2018 -2019
(dalam US\$)

No.	Negara Asal	2018	2019
1	Amerika Serikat	223.000	382
2	Australia	16.635.881	2.068.599
3	Austria	663.375	-
4	Belgia	1.131.644	74.092
5	Brazil	67.956	66.200
6	India	6.472.362	136.796
7	Italia	96.503	9
8	Jepang	2.203.435	1.261
9	Jerman	2.806.457	3.000.738
10	Korea Selatan	-	4.429
11	Laos	2.076.090	5.973.086
12	Malaysia	33.330.524	38.400.494
13	Singapura	18.274.369	13.898.367
14	Taiwan	-	9.549
15	Tiongkok	141.832.926	4.549.202
16	Turki	8.012	239.289
Jumlah		225.822.534	68.962.493

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

Ekspor impor di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami trend naik turun tiap bulannya selama tahun 2019. Ekspor tertinggi ada di bulan Maret dengan nilai ekspor US\$240,22 dan ekspor terendah ada di bulan September dengan nilai ekspor US\$95,64. Sedangkan impor tertinggi terjadi di bulan Oktober dengan nilai impor US\$12,54 dan impor terendah di bulan Juni dengan nilai impor US\$2,29.

Grafik 2.5
Perkembangan Ekspor dan Impor Kalimantan Tengah Tahun 2019
(dalam US\$)



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

D. INFLASI

Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara relatif mengalami kenaikan harga dari tahun ke tahun. Bagi konsumen, inflasi menjadi hal yang memberatkan karena secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan riil atau daya beli mereka. Sedangkan dari sisi produsen, inflasi menjadi insentif untuk terus melakukan aktivitas ekonomi. Dalam perkembangannya, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah inflasi fluktuatif jika dibandingkan dengan inflasi tingkat nasional. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan kota-kota di Kalimantan dan Nasional.

Tabel 2.9
Laju Inflasi Kota di Kalimantan dan Nasional, 2016-2019

Tahun	Palangka Raya	Sampit	Banjarmasin	Tanjung	Samarinda	Balikpapan	Pontianak	Singkawang	Tarakan	Nasional
2016	1,91	2,46	3,68	2,18	2,83	4,13	3,88	2,58	4,31	3,02
2017	3,11	3,29	3,82	2,40	3,69	2,45	3,86	5,23	2,77	3,61
2018	3,68	6,02	2,63	2,60	3,32	3,13	3,99	3,18	5,00	3,13
2019	2,70	2,02	4,15	2,15	1,49	1,88	2,64	1,08	1,47	2,72

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2020

Inflasi Kota Palangka Raya tahun 2016 sebesar 1,91% mengalami kenaikan menjadi 3,11% pada tahun 2017 dan kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 3,68% dan laju inflasi kumulatif tahun 2019 atau laju inflasi "*year on year*" tahun 2019 adalah **2,70%**.

II.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah daerah adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan SKPD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.2.1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan regulasi yang mendukung serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing – masing jenis pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah Biro Umum tahun 2020 berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yaitu Sewa Tanah dan Bangunan yang berasal dari:

- 1) Sewa Aula Eka Hapakat
- 2) Sewa Aula Jayang Tingang
- 3) Sewa Kantor Kas Bank Kalteng dan ATM
- 4) Sewa Kantin

Tidak ada realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah untuk tahun 2020.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Tidak ada anggaran Dana Perimbangan di Biro Umum

c. Lain – Lain Dana Perimbangan Yang Sah

Tidak ada anggaran Dana Perimbangan di Biro Umum

2.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan.

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

- a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan across yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
- b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2020 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah.
- c) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai

dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2020.

- d) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- e) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- f) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada:
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.

2. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah" termasuk didalamnya adalah "Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah".

3. Belanja Pegawai (Non Gaji)

- a. Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b. Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

4. Belanja Barang dan Jasa

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program

dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.

- b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
- c) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat menampung obyek belanja dimaksud;
- d) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2019. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
- e) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya;
- f) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi

dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;

- g) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- h) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;
- i) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
- j) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
- k) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
- l) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

5. Belanja Modal

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

2.2.3. Pembiayaan

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penetapan nilai penerimaan pembiayaan disesuaikan dengan sisa lebih penghitungan tahun anggaran sebelumnya.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penetapan nilai pengeluaran pembiayaan yang paling memungkinkan adalah penyertaan modal (inventasi) daerah pada BUMD atau perusahaan daerah dengan melihat peluang benefit usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah selama ini.

II.3. REALISASI APBD BIRO UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Biro Umum tahun 2020 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp254.634.000,00 dan belanja sebesar Rp114.542.487.501,75 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp101.046.390.701,75 dan belanja modal sebesar Rp13.496.096.800,00.

Realisasi pendapatan Biro Umum tahun 2020 sebesar Rp191.500.000,00, dan realisasi belanja sebesar Rp100.023.386.263,95 yang terdiri atas realisasi belanja operasi sebesar Rp90.673.086.343,95 dan belanja modal sebesar Rp9.350.299.920,00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bagian ini akan disajikan analisa capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Biro Umum secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

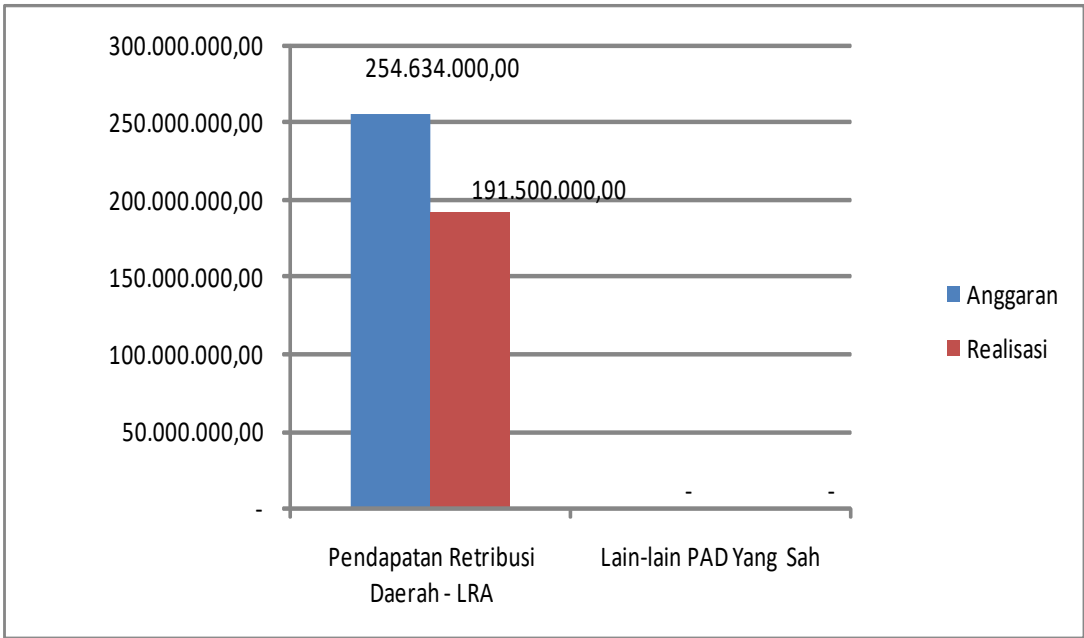
Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Umum tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2020

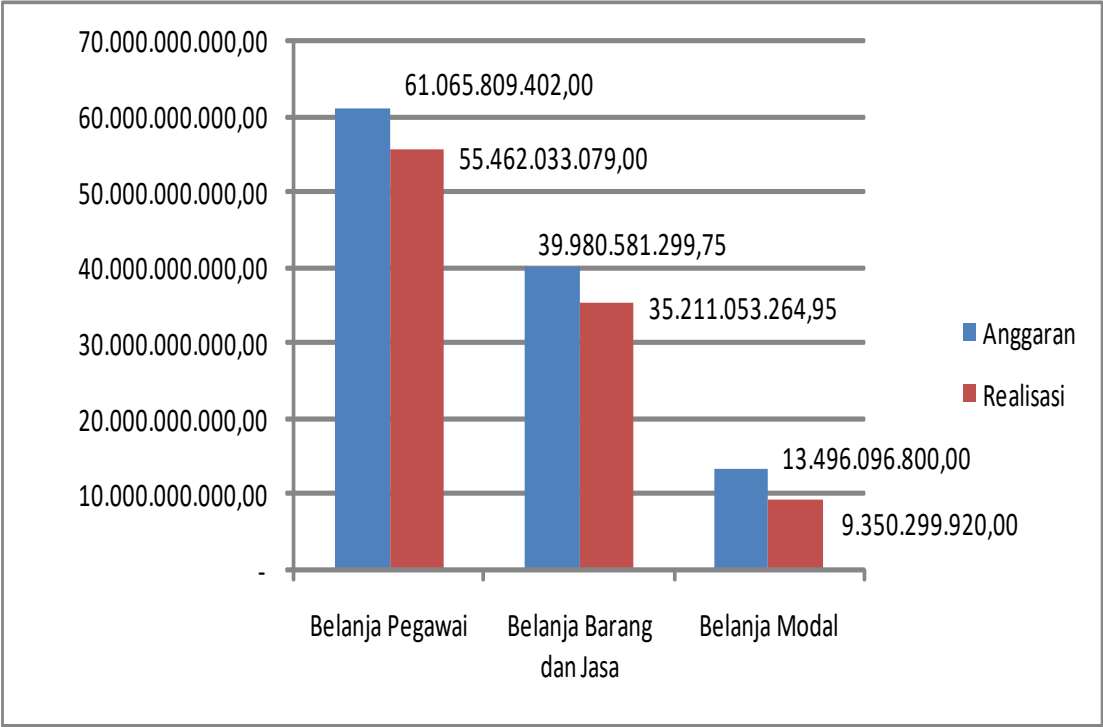
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	254.634.000,00	191.500.000,00	63.134.000,00	75,21
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-	-
Total Belanja	254.634.000,00	191.500.000,00	63.134.000,00	75,21



(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Belanja Pegawai	61.065.809.402,00	55.462.033.079,00	5.603.776.323,00	90,82
Belanja Barang dan Jasa	39.980.581.299,75	35.211.053.264,95	4.769.528.034,80	88,07
Belanja Modal	13.496.096.800,00	9.350.299.920,00	4.145.796.880,00	69,28
Total Belanja	114.542.487.501,75	100.023.386.263,95	14.519.101.237,80	87,32



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.
- c. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas sehingga LRA disusun berdasarkan basis kas, oleh karena itu pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening

kas umum daerah. Apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

- d. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai historis (*historical cost principle*);

- a. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah daerah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar kewajiban dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli bentuk (*substance over form principle*);

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip

konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan dalam hal, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas akun-akun laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Informasi penyusunan laporan keuangan yang penting disajikan adalah:

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA adalah pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan bendahara umum daerah atau oleh suatu entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparaturnya maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

ASET LANCAR

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang, dan persediaan.

a) Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah.

c) Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain. Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:

- Klarifikasi piutang menurut umur
- Klarifikasi piutang menurut debitor

d) Persediaan Barang Pakai Habis/Material

1. Persediaan Barang Pakai Habis/Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Persediaan Barang Pakai Habis/Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan/alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
3. Persediaan Barang Pakai Habis/Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
4. Persediaan Barang Pakai Habis/Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
5. Persediaan Barang Pakai Habis/Material dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
6. Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap meliputi:

- a) Tanah
- b) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
 1. Alat-alat besar
 2. Alat-alat angkutan
 3. Alat-alat bengkel dan alat ukur
 4. Alat-alat pertanian/peternakan
 5. Alat-alat kantor dan rumah tangga
 6. Alat-alat studio dan alat komunikasi
 7. Alat-alat kedokteran
 8. Alat-alat laboratorium

- 9. Alat-alat keamanan
 - c) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1. Bangunan gedung
 - 2. Bangunan monumen
 - d) Jalan, irigasi, dan jembatan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1. Jalan dan jembatan
 - 2. Bangunan air/irigasi
 - 3. Instalasi
 - 4. Jaringan
 - e) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
 - 1. Buku dan perpustakaan
 - 2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3. Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4. Konstruksi dalam pengerjaan
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan
- Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

DANA CADANGAN

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- a) **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- b) **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasaannya** adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas

diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

B. KEWAJIBAN

Karakteristik esensial kewajiban adalah pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumberdaya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

C. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b) Beban

Adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c) Transfer

Adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) Pos Luar Biasa

Adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

8. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi

b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro

- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki umpan balik (*feedback value*)
- b. Memiliki masa manfaat (*predictive value*)
- c. Tepat waktu (*timelines*)
- d. Lengkap

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur
- b. Dapat diverifikasi
- c. Netralitas

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi dimaksud.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD Biro Umum berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas sebagai berikut:

V.1.1. PENDAPATAN-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA pada Biro Umum tahun 2020 adalah sebesar Rp191.500.000,00 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp254.634.000,00. Pendapatan yang ada di Biro Umum terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan objek pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA. Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun 2020		Realisasi Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	254.634.000,00	191.500.000,00	90.500.000,00	101.000.000,00	52,74
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	-	-	-	-	-
Jumlah		254.634.000,00	191.500.000,00	90.500.000,00	101.000.000,00	52,74

V.1.2. BELANJA

Realisasi belanja Biro Umum Tahun 2020 adalah sebesar Rp100.023.386.263,95 atau sekitar 87,32% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp114.542.487.501,75. Dibandingkan dengan tahun 2020, belanja tahun 2019

lebih tinggi Rp36.750.108.719,05,00 atau sekitar 26.93%. Realisasi belanja Biro Umum dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu belanja pegawai sebesar Rp55.462.033.079,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp35.211.053.264,95; dan belanja modal sebesar Rp9.350.299.920,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Realisasi Belanja Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun 2020		Realisasi Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Belanja Pegawai	61.065.809.402,00	55.462.033.079,00	52.087.904.034,00	3.374.129.045,00	6,48
2.	Belanja Barang dan Jasa	39.980.581.299,75	35.211.053.264,95	37.998.563.330,00	(2.787.510.065,05)	(7,34)
3.	Belanja Modal	13.496.096.800,00	9.350.299.920,00	46.800.410.299,00	(37.450.110.379,00)	(80,02)
Jumlah		114.542.487.501,75	100.023.386.263,95	136.886.877.663,00	(36.863.491.399,05)	(26,93)

a. **Belanja Pegawai** **Rp55.462.033.079,00**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp61.065.809.402,00 atau 53,31% dari total anggaran Biro Umum. Sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp55.462.033.079,00 atau 92,15% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.603.776.323,00 atau 7,85%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp52.087.904.034,00. Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi Tahun 2019
	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Pegawai	61.065.809.402,00	55.462.033.079,00	(5.603.776.323,00)	90,82	52.087.904.034,00
Gaji dan Tunjangan	27.406.489.402,00	24.571.023.079,00	(2.835.466.323,00)	89,65	25.154.475.034,00
Tambahan Penghasilan PNS	22.554.100.000,00	20.785.944.000,00	(1.768.156.000,00)	92,16	17.163.751.000,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.000.000.000,00	1.850.000.000,00	(150.000.000,00)	92,50	1.980.000.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.400.000,00	-	(8.400.000,00)	-	-
Belanja Honorarium PNS	2.584.420.000,00	2.254.070.000,00	(330.350.000,00)	87,22	2.545.760.000,00
Belanja Honorarium Non PNS	6.512.400.000,00	6.000.996.000,00	(511.404.000,00)	92,15	5.243.918.000,00

1. **Belanja Gaji dan Tunjangan** **Rp24.571.023.079,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan dianggarkan sebesar Rp27.406.489.402,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp24.571.023.079,00atau 89,65%. Belanja iuran jaminan kesehatan,

belanja iuran jaminan sosial tenaga kerja dan iuran jaminan sosial tenaga kerja untuk tahun 2020 tidak dianggarkan di SKPD tetapi dianggarkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp25.154.475.034,00. Rincian obyek belanja gaji dan tunjangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	20.506.985.999,00	19.521.200.529,00	95,19	20.058.072.034,00	(2,75)
Belanja Tunjangan Keluarga	2.117.334.950,00	1.688.329.174,00	79,74	1.760.666.738,00	(4,28)
Belanja Tunjangan Jabatan	1.719.991.000,00	1.500.149.800,00	87,22	1.445.294.800,00	3,66
Belanja Tunjangan Fungsional	497.371.000,00	217.042.610,00	43,64	148.290.000,00	31,68
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	837.394.250,00	620.675.000,00	74,12	680.660.000,00	(9,66)
Belanja Tunjangan Beras	1.574.874.288,00	939.287.400,00	59,64	973.722.369,00	(3,67)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	151.837.915,00	84.072.565,00	55,37	87.473.573,00	(4,05)
Belanja Pembulatan Gaji	700.000,00	266.001,00	38,00	295.420,00	(11,06)
Jumlah	27.406.489.402,00	24.571.023.079,00	89,65	25.154.474.934,00	(2,37)

2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS **Rp20.785.944.000,00**

Belanja Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan sebesar Rp22.554.100.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp20.785.944.000,00atau 92,16%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 17.163.751.000,00. Rincian obyek belanja tambahan penghasilan PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17.466.600.000,00	16.389.544.000,00	93,83	12.850.476.000,00	21,59
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	-	-	-	150.000.000,00	-
Belanja Tambahan Penghasilan Uang Makan	5.087.500.000,00	4.396.400.000,00	86,42	4.163.275.000,00	5,30
Jumlah	22.554.100.000,00	20.785.944.000,00	92,16	17.163.751.000,00	17,43

3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH **Rp1.850.000.000,00**

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp1.850.000.000,00 atau 92.50%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.980.000.000,00. Rincian obyek belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	2.000.000.000,00	1.850.000.000,00	92,50	1.980.000.000,00	(7,03)
Jumlah	2.000.000.000,00	1.850.000.000,00	92,50	1.980.000.000,00	(7,03)

4. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Rp0,00

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp8.400.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 tidak ada realisasi karena target pendapatan tahun 2020 tidak tercapai. Rincian obyek belanja insentif pemungutan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.400.000,00	-	-	-	-
Jumlah	8.400.000,00	-	-	-	-

5. Belanja Honorarium PNS

Rp2.254.070.000,00

Belanja Honorarium PNS dianggarkan sebesar Rp2.584.420.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp2.254.070.000,00 atau 87,22%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.545.760.000,00. Rincian obyek belanja honorarium PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	957.200.000,00	870.450.000,00	90,94	1.071.000.000,00	(23,04)
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.577.220.000,00	1.383.620.000,00	87,73	244.200.000,00	82,35
Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	-	-	-	75.000.000,00	-
Belanja Honorarium PNS Lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	-	-	-	1.155.560.000,00	-
Jasa Medik	50.000.000,00	-	-	-	-
Jumlah	2.584.420.000,00	2.254.070.000,00	87,22	2.545.760.000,00	(12,94)

6. Belanja Honorarium Non PNS

Rp6.000.996.000,00

Belanja Honorarium Non PNS dianggarkan sebesar Rp6.512.400.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp6.000.996.000,00 atau 92,15%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp5.243.918.000,00. Rincian obyek belanja honorarium non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Tenaga Honorer/Tidak Tetap	6.512.400.000,00	6.000.996.000,00	92,15	5.243.918.000,00	12,62
Jumlah	6.512.400.000,00	6.000.996.000,00	92,15	5.243.918.000,00	12,62

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp35.211.053.464,95

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp39.980.581.299,75 atau 34,90% dari total anggaran Biro Umum. Sampai dengan akhir 2020 sudah terealisasi sebesar Rp35.211.053.264,95 atau 88,07% sehingga terdapat sisa anggaran Rp4.769.528.034,80atau 11,93%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp37.998.563.330,00. Secara rinci realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi Tahun 2019 (Rp)
	Anggaran 2020	Realisasi Tahun 2020	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Bahan Pakai Habis	6.249.293.465,75	6.147.287.797,00	(102.005.668,75)	98,37	4.696.762.514,00
Belanja Bahan/Material	1.710.761.500,00	1.630.242.200,00	(80.519.300,00)	95,29	1.446.663.700,00
Belanja Jasa Kantor	8.143.432.870,00	7.109.476.745,00	(1.033.956.125,00)	87,30	7.060.308.539,00
Belanja Premi Asuransi	687.080.000,00	492.729.819,00	(194.350.181,00)	71,71	421.791.221,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.978.325.416,00	2.172.610.547,00	(805.714.869,00)	72,95	1.926.813.113,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	949.845.550,00	873.001.650,00	(76.843.900,00)	91,91	554.358.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	560.000.000,00	386.350.459,00	(173.649.541,00)	68,99	414.993.324,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	979.533.302,00	594.746.065,00	(384.787.237,00)	60,72	790.850.261,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.220.000,00	1.422.287.500,00	(127.932.500,00)	91,75	2.018.205.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	5.551.686.771,00	5.258.240.942,00	(293.445.829,00)	94,71	6.305.103.785,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	76.936.000,00	68.200.000,00	(8.736.000,00)	88,65	842.908.500,00
Belanja Pakaian Kerja	62.000.000,00	60.700.000,00	(1.300.000,00)	97,90	52.505.200,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	62.800.000,00	55.000.000,00	(7.800.000,00)	87,58	51.442.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.817.567.875,00	4.525.909.818,00	(1.291.658.057,00)	77,80	7.846.845.642,00
Belanja Pemeliharaan	4.562.118.550,00	4.378.689.922,95	(183.428.627,05)	95,98	2.869.033.975,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	38.980.000,00	35.579.800,00	(3.400.200,00)	91,28	699.998.556,00
Jumlah	39.980.581.299,75	35.211.053.264,95	(4.769.528.034,80)	88,07	37.998.583.330,00

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Rp6.147.287.797,00

Belanja Bahan Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp6.249.293.465,75 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp6.147.287.797,00 atau 98,37%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp4.696.762.514,00. Rincian obyek belanja pakai habis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Alat Tulis Kantor	908.974.409,00	856.733.747,00	94,25	511.285.314,00	40,32
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.315.387.800,00	1.297.460.000,00	98,64	871.533.100,00	32,83
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	214.494.000,00	214.470.000,00	99,99	154.715.000,00	27,86
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.189.025.000,00	1.170.590.250,00	98,45	1.012.297.100,00	13,52
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	-	-
Belanja Pengisian Tabung Gas	70.160.000,00	68.329.000,00	97,39	75.750.000,00	(10,86)
Belanja Dokumentasi	-	-	-	-	-
Belanja Bahan Dekorasi	2.044.404.256,75	2.040.840.000,00	99,83	1.804.732.500,00	11,57
Belanja Bahan Makanan/Minuman serta Barang Lainnya	487.532.000,00	481.864.800,00	-	-	100,00
Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	19.316.000,00	17.000.000,00	88,01	266.468.500,00	(1.467,46)
Jumlah	6.249.293.465,75	6.147.287.797,00	98,37	4.696.781.514,00	23,60

2.
Belanja Bahan/Material
Rp1.630.242.200,00

Belanja Bahan/Material dianggarkan sebesar Rp1.710.761.500,00 dansampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp1.630.242.200,00 atau 95,29%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.446.663.700,00. Rincian obyek belanja bahan/material dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Bahan Baku Bangunan	-	-	-	285.177.900,00	-
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.186.021.500,00	1.180.832.500,00	99,56	1.043.703.300,00	11,61
Belanja Bahan Kimia	129.740.000,00	125.049.200,00	96,38	117.782.500,00	5,81
Belanja Bahan Perlengkapan Kantor	395.000.000,00	324.360.500,00	82,12	-	100,00
Jumlah	1.710.761.500,00	1.630.242.200,00	95,29	1.446.663.700,00	11,26

3.
Belanja Jasa Kantor
Rp7.109.476.745,00

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp8.143.432.870,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp7.109.476.745,00atau 87,30%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp7.060.308.539,00. Rincian obyek belanja jasa kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Telepon	1.480.982.870,00	1.423.628.900,00	96,13	1.199.950.291,00	15,71
Belanja Air	600.000.000,00	279.648.530,00	46,61	454.346.650,00	(62,47)
Belanja Listrik	2.750.000.000,00	2.260.419.735,00	82,20	2.208.312.141,00	2,31
Belanja Paket/Pengiriman	120.000.000,00	96.395.500,00	80,33	55.739.500,00	42,18
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	32.750.000,00	560.000,00	1,71	350.000,00	37,50
Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.098.700.000,00	2.998.824.080,00	96,78	2.977.233.957,00	0,72
Belanja Jasa Pihak Ketiga	61.000.000,00	50.000.000,00	81,97	164.376.000,00	(228,75)
Jumlah	8.143.432.870,00	7.109.476.745,00	87,30	7.060.308.539,00	0,69

4. **Belanja Premi Asuransi** **Rp492.729.819,00**

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar Rp687.080.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp492.729.819,00 atau 71,71%. Realisasi Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah ada 2 macam, yaitu pembayaran premi asuransi kendaraan dinas sebesar Rp114.411.850,00 dan pembayaran PBB rumah jabatan sebesar Rp147.060.424,00 karena tidak ada kode rekening khusus untuk PBB. Belanja Premi Asuransi Kesehatan dalam realisasinya adalah pembayaran BPJS untuk tenaga honorer sebesar Rp231.257.545,00. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp421.791.221,00. Rincian obyek belanja premi asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	262.080.000,00	231.257.545,00	88,24	294.116.039,00	(27,18)
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	425.000.000,00	261.472.274,00	61,52	127.675.182,00	51,17
Jumlah	687.080.000,00	492.729.819,00	71,71	421.791.221,00	14,40

5. **Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor** **Rp2.172.610.547,00**

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp2.978.325.416,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp2.172.610.547,00 atau 72,95%. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.926.813.113,00. Rincian obyek belanja perawatan kendaraan bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Jasa Service	265.046.400,00	134.343.501,00	50,69	65.627.242,00	51,15
Belanja Penggantian Suku Cadang	717.500.000,00	391.914.017,00	54,62	262.470.735,00	33,03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.703.779.016,00	1.462.632.229,00	85,85	1.411.462.036,00	3,50
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	292.000.000,00	183.720.800,00	62,92	187.253.100,00	(1,92)
Jumlah	2.978.325.416,00	2.172.610.547,00	72,95	1.926.813.113,00	11,31

6. **Belanja Cetak dan Penggandaan** **Rp873.001.650,00**

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp949.845.550,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp873.001.650,00 atau 91,91%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp554.358.000,00. Rincian obyek belanja cetak dan penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Cetak	494.139.875,00	490.360.700,00	99,24	320.753.250,00	34,59
Belanja Penggandaan	450.520.675,00	377.510.950,00	83,79	233.604.750,00	38,12
Belanja Penjilidan	5.185.000,00	5.130.000,00	98,94	-	100,00
Jumlah	949.845.550,00	873.001.650,00	91,91	554.358.000,00	36,50

7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Rp386.350.459,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dianggarkan sebesar Rp560.000.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp386.350.459,00 atau 68,99%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp414.993.324,00. Rincian obyek sewa rumah/gedung/gudang/parkir dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	560.000.000,00	386.350.459,00	68,99	414.993.324,00	(7,41)
Jumlah	560.000.000,00	386.350.459,00	68,99	414.993.324,00	(7,41)

8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Rp594.746.065,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas dianggarkan sebesar Rp979.533.202,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp594.746.065,00 atau 60,72%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp790.850.261,00. Rincian obyek belanja sewa sarana mobilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	328.000.000,00	263.160.000,00	80,23	158.090.000,00	39,93
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	651.533.302,00	331.586.065,00	50,89	632.760.261,00	(90,83)
Jumlah	979.533.302,00	594.746.065,00	60,72	790.850.261,00	(32,97)

9. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Rp1.422.287.500,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dianggarkan sebesar Rp1.550.220.000,00 dan sampai akhir tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp1.422.287.500,00 atau 91,75%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.018.205.000,00. Rincian obyek belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Sewa Meja Kursi	347.550.000,00	296.537.500,00	85,32	269.750.000,00	9,03
Belanja Sewa Tenda	430.450.000,00	429.850.000,00	99,86	572.305.000,00	(33,14)
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	34.200.000,00	-	-	25.400.000,00	-
Belanja Sewa Sound System	321.500.000,00	284.300.000,00	88,43	397.750.000,00	(39,91)
Belanja Sewa Kipas Angin/AC	221.270.000,00	220.750.000,00	99,76	329.850.000,00	(49,42)
Belanja Sewa Karpet	195.250.000,00	190.850.000,00	97,75	423.150.000,00	(121,72)
Jumlah	1.550.220.000,00	1.422.287.500,00	91,75	2.018.205.000,00	(41,90)

10. Belanja Makanan dan Minuman

Rp5.258.240.942,00

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp5.551.686.771,00 dan sampai akhir tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp5.258.240.942,00 atau 94,71%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp6.305.103.785,00. Rincian obyek belanja makanan dan minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	183.238.800,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	545.782.300,00	299.525.000,00	54,88	69.752.500,00	76,71
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.069.904.471,00	4.031.823.942,00	99,06	5.116.142.185,00	(26,89)
Belanja Makanan dan Minuman RT KDH & WKDH	936.000.000,00	926.892.000,00	99,03	935.970.300,00	(0,98)
Jumlah	5.551.686.771,00	5.258.240.942,00	94,71	6.305.103.785,00	(19,91)

11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Rp68.200.000,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dianggarkan sebesar Rp76.936.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp68.200.000,00 atau 88,65%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp842.908.500,00. Rincian obyek belanja pakaian dinas dan atributnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	12.000.000,00	-
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.736.000,00	28.000.000,00	91,10	11.200.000,00	60,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.000.000,00	24.000.000,00	88,89	808.508.500,00	(3.268,79)
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	19.200.000,00	16.200.000,00	84,38	11.200.000,00	30,86
Jumlah	76.936.000,00	68.200.000,00	88,65	842.908.500,00	(1.135,94)

12. Belanja Pakaian Kerja **Rp60.700.000,00**

Belanja Pakaian Kerja dianggarkan sebesar Rp62.000.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp60.700.000,00 atau 97,90%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp52.505.200,00. Rincian obyek belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	52.505.200,00	(5,22)
Belanja Pakaian Kerja Hitam-Putih	12.000.000,00	10.800.000,00	90,00	-	100,00
Jumlah	62.000.000,00	60.700.000,00	97,90	52.505.200,00	13,50

13. Belanja Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu **Rp55.000.000,00**

Belanja Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu dianggarkan sebesar Rp62.800.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp55.000.000,00 atau 87,58%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp51.422.000,00. Rincian obyek belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Pakaian KORPRI	2.800.000,00	2.600.000,00	92,86	-	100,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	20.000.000,00	17.600.000,00	88,00	13.350.000,00	24,15
Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.800.000,00	14.400.000,00	85,71	35.000.000,00	(143,06)
Belanja Pakaian Pramuka/Paskibraka	23.200.000,00	20.400.000,00	87,93	3.072.000,00	84,94
Jumlah	62.800.000,00	55.000.000,00	87,58	51.422.000,00	6,51

14. Belanja Perjalanan Dinas **Rp4.525.909.818,00**

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp5.817.567.875,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp4.525.909.818,00 atau 77,80%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp7.846.845.642,00. Rincian obyek belanja perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.549.662.500,00	1.814.313.720,00	71,16	2.372.109.601,00	(30,74)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.267.905.375,00	2.711.596.098,00	82,98	5.474.736.041,00	(101,90)
Jumlah	5.817.567.875,00	4.525.909.818,00	77,80	7.846.845.642,00	(73,38)

15. Belanja Pemeliharaan **Rp4.378.689.922,95**

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp4.562.118.550,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp4.378.689.922,95 atau 95,98%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.869.033.975,00. Rincian obyek belanja pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!	214.643.325,00	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.543.429.250,00	1.464.153.600,00	94,86	1.341.995.800,00	8,34
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.018.689.300,00	2.914.536.322,95	96,55	1.312.394.850,00	54,97
Jumlah	4.562.118.550,00	4.378.689.922,95	95,98	2.869.033.975,00	52,62

16. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS **Rp35.579.800,00**

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dianggarkan sebesar Rp38.980.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp35.579.800,00 atau 91,28%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp699.998.556,00. Rincian obyek belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Bimbingan Teknis	38.980.000,00	35.579.800,00	91,28	486.242.256,00	(1.266,62)
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	#DIV/0!	213.756.300,00	#DIV/0!
Jumlah	38.980.000,00	35.579.800,00	91,28	699.998.556,00	(1.867,40)

c. Belanja Modal **Rp9.350.299.920,00**

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp13.496.096.800,00 atau 11,78% dari total anggaran Biro Umum. Sampai dengan akhir tahun 2020 sudah terealisasi sebesar Rp9.350.299.920,00 atau 69,28% sehingga terdapat sisa anggaran Rp4.415.796.880,00 atau 30,72%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp46.800.410.299,00. Secara rinci realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.
Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi 2019
	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Bantu	-	-	-	-	196.740.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	3.050.000.000,00	147.840.000,00	(2.902.160.000,00)	4,85	1.606.492.696,00
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Ukur	183.000.000,00	178.992.000,00	(4.008.000,00)	97,81	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	410.000.000,00	406.377.000,00	(3.623.000,00)	99,12	273.307.400,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.562.638.800,00	4.210.794.250,00	(351.844.550,00)	92,29	9.379.060.751,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	721.500.000,00	597.649.000,00	(123.851.000,00)	82,83	930.227.550,00
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	2.472.696.873,00
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio	2.929.270.000,00	2.764.027.270,00	(165.242.730,00)	94,36	4.224.694.650,00
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Komunikasi	371.600.000,00	361.271.900,00	(10.328.100,00)	97,22	73.620.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kesehatan	100.000.000,00	43.395.000,00	(56.605.000,00)	43,40	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	102.000.000,00	93.433.000,00	(8.567.000,00)	91,60	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	645.300.000,00	349.499.500,00	(295.800.500,00)	54,16	27.160.527.179,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	319.768.000,00	97.933.000,00	(221.835.000,00)	30,63	197.275.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
Belanja Modal Pengadaan Buku	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	-	-	223.893.200,00
Belanja Modal Pengadaan Tanaman	101.020.000,00	99.088.000,00	(1.932.000,00)	98,09	61.875.000,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-
Jumlah	13.496.096.800,00	9.350.299.920,00	(4.145.796.880,00)	69,28	46.800.410.299,00

1. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu Rp0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantutidak dianggarkan di tahun 2020 sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp196.740.000,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan alat Alat-Alat Bantu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set	-	-	-	196.740.000,00	-
Jumlah	-	-	-	196.740.000,00	-

2. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Rp147.840.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp3.050.000.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp147.840.000,00 atau 4,85%. Sedangkan

realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.606.492.696,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.050.000.000,00	147.840.000,00	4,85	-	100,00
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	-	1.464.952.696,00	-
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	141.540.000,00	-
Jumlah	3.050.000.000,00	147.840.000,00	4,85	1.606.492.696,00	(986,64)

3. **Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur** **Rp178.992.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp183.000.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp178.992.000,00 atau 97,81%. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur tidak dianggarkan di tahun 2019. Rincian obyek belanja modal pengadaan Alat Ukur dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	183.000.000,00	178.992.000,00	97,81	-	100,00
Jumlah	183.000.000,00	178.992.000,00	97,81	-	100,00

4. **Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor** **Rp406.377.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dianggarkan sebesar Rp41.000.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp406.377.000,00 atau 99,12%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp273.307.400,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan alat kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	-	-	-	273.307.400,00	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	410.000.000,00	406.377.000,00	99,12	-	100,00
Jumlah	410.000.000,00	406.377.000,00	99,12	273.307.400,00	32,75

5. **Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga** **Rp4.210.974.250,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp4.562.638.800,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi

sebesar Rp4.210.974.250,00 atau 92,29%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp9.379.060.751,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan alat rumah tangga dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.586.680.000,00	2.369.177.950,00	91,59	4.091.405.400,00	(72,69)
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	-	-	-	43.090.000,00	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	219.878.800,00	181.380.000,00	82,49	1.974.764.400,00	(988,74)
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	283.500.000,00	196.042.000,00	69,15	44.304.000,00	77,40
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.472.580.000,00	1.464.194.300,00	99,43	3.091.396.951,00	(111,13)
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	134.100.000,00	-
Jumlah	4.562.638.800,00	4.210.794.250,00	92,29	9.379.060.751,00	(122,74)

6. **Belanja Modal Pengadaan Komputer** **Rp597.649.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp721.500.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp597.649.000,00 atau 82,83%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp930.227.550,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan komputer dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	444.000.000,00	357.849.000,00	80,60	704.560.800,00	(96,89)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	-	-	-	97.608.000,00	-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	277.500.000,00	239.800.000,00	86,41	128.058.750,00	46,60
Jumlah	721.500.000,00	597.649.000,00	82,83	930.227.550,00	(55,65)

7. **Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**
Rp0,00

Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dianggarkan sebesar Rp0,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.472.696.873,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	-	-	-	229.812.500,00	-
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	-	-	-	2.242.884.373,00	-
Jumlah	-	-	-	2.472.696.873,00	-

8. **Belanja Modal Pengadaan Alat Studio** **Rp2.764.027.270,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dianggarkan sebesar Rp2.929.270.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp2.764.027.270,00 atau 94,36%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp4.224.694.650,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan alat-alat studio dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.794.170.000,00	2.633.502.270,00	94,25	2.198.325.000,00	16,52
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	135.100.000,00	130.525.000,00	96,61	2.026.369.650,00	(1.452,48)
Jumlah	2.929.270.000,00	2.764.027.270,00	94,36	4.224.694.650,00	(52,85)

9. **Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi** **Rp361.271.900,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp371.600.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp361.271.900,00 atau 97,22%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp73.620.000,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan alat komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	-	-	-	33.120.000,00	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	40.500.000,00	(305,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	361.600.000,00	351.271.900,00	97,14	-	100,00
Jumlah	371.600.000,00	361.271.900,00	97,22	73.620.000,00	79,62

10. **Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan** **Rp43.395.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp43.395.000,00 atau 43,40%. Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan tidak dianggarkan di tahun 2019. Rincian obyek belanja modal pengadaan Alat Kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	100.000.000,00	43.395.000,00	43,40	-	100,00
Jumlah	100.000.000,00	43.395.000,00	43,40	-	100,00

11. Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
Rp93.433.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan dianggarkan sebesar Rp102.000.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp93.433.000,00 atau 91,60%. Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan perlindungan tidak dianggarkan di tahun 2019. Rincian obyek belanja modal pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	102.000.000,00	93.433.000,00	91,60	-	100,00
Jumlah	102.000.000,00	93.433.000,00	91,60	-	100,00

12. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rp349.499.500,00

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja dianggarkan sebesar Rp645.300.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp349.499.500,00 atau 54,16%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp27.160.527.179,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	295.300.000,00	251.495.000,00	85,17	-	100,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	-	-	-	2.997.110.040,00	-
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	-	-	-	2.714.375.150,00	-
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	250.000.000,00	-	-	15.224.886.285,00	-
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00	98.004.500,00	98,00	-	100,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	6.224.155.704,00	-
Jumlah	645.300.000,00	349.499.500,00	54,16	27.160.527.179,00	(7.671,26)

13. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Rp97.933.000,00

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal dianggarkan sebesar Rp319.768.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp97.933.000,00 atau 30,63%. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal tidak dianggarkan di tahun 2019. Rincian obyek belanja modal pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	319.768.000,00	97.933.000,00	30,63	-	100,00
Jumlah	319.768.000,00	97.933.000,00	30,63	-	100,00

14. Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rp0,00

Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta dianggarkan sebesar Rp0,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp223.893.200,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan buku dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	-	-	-	223.893.200,00	-
Jumlah	-	-	-	223.893.200,00	-

15. Belanja Modal Pengadaan Tanaman Rp99.088.000,00

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias dianggarkan sebesar Rp101.020.000,00 dan sampai akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp99.088.000,00 atau 98,09%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp61.875.000,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias	101.020.000,00	99.088.000,00	98,09	61.875.000,00	37,56
Jumlah	101.020.000,00	99.088.000,00	98,09	61.875.000,00	37,56

V.1.3. PENDAPATAN-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO Biro Umum akhir tahun 2020 sebesar Rp209.500.000,00 sedangkan PAD - LO tahun 2019 senilai Rp90.500.000,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO. Rincian obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.
Rincian Pendapatan - LO Tahun 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	209.500.000,00	90.500.000,00	119.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	209.500.000,00	90.500.000,00	119.000.000,00
Lain-Lain PAD Yang Sah - LO	-	-	-
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-
Jumlah Pendapatan	209.500.000,00	90.500.000,00	119.000.000,00

1. Pendapatan Retribusi Daerah - LO **Rp209.500.000,00**

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2020 sebesar Rp209.500.000,00 sedangkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA sebesar Rp191.500.000,00 selisih sebesar Rp18.000.000,00. Selisih tersebut karena adanya piutang retribusi tahun 2020. Rincian obyek pendapatan retribusi daerah – LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Pendapatan - LO	Realisasi Pendapatan - LRA		
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	209.500.000,00	191.500.000,00	18.000.000,00	90.500.000,00
Jumlah	209.500.000,00	191.500.000,00	18.000.000,00	90.500.000,00

Keterangan:

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal (LRA)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir (LO)
1.	Realisasi Pendapatan	191.500.000,00	-	-	191.500.000,00
2.	Piutang Retribusi (sewa bangunan kantin)	-	18.000.000,00	-	209.500.000,00
	Jumlah	191.500.000,00	18.000.000,00	-	209.500.000,00

2. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO **Rp0,00**

Lain-Lain PAD Yang Sah - LO tahun 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA sebesar Rp0,00 karena tidak dianggarkan di tahun 2019. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO tahun 2018 sebesar Rp0,00. Rincian obyek lain-lain PAD yang sah – LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Pendapatan - LO	Realisasi Pendapatan - LRA		
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

V.1.4. BEBAN

Beban Biro Umum akhir tahun 2020 sebesar Rp107.917.562.728,01 dan pendapatan LO sebesar Rp209.500.000,00 sehingga surplus/defisit-LO tahun 2020 sebesar Rp(107.708.062.728,01). Jika dibandingkan tahun 2019, surplus/defisit-LO turun sebesar Rp417.396.532,49 atau 0.39%.

Tabel 5.7.
Rincian Beban Tahun 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pegawai - LO	55.470.415.630,00	52.076.438.432,00	3.393.977.198,00	6,52
Beban Persediaan	15.234.588.389,00	17.175.355.950,00	(1.940.767.561,00)	(11,30)
Beban Jasa	10.083.238.506,74	11.405.533.566,17	(1.322.295.059,43)	(11,59)
Beban Pemeliharaan	6.566.645.469,95	4.940.828.088,00	1.625.817.381,95	32,91
Beban Perjalanan Dinas	4.550.167.018,00	7.846.845.642,00	(3.296.678.624,00)	(42,01)
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15.635.362.114,32	14.770.757.582,33	864.604.531,99	5,85
Beban Penyisihan Piutang	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
Beban Lain - Lain	368.145.600,00	200.000,00	367.945.600,00	183.972,80
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	-	-	-	-
Jumlah Beban	107.917.562.728,01	108.215.959.260,50	(298.396.532,49)	(0,28)

a. Beban **Rp107.917.562.728,01**

Beban tahun 2020 sebesar Rp107.917.562.728,01 atau turun sebesar 0,28% dari beban tahun 2019 senilai Rp108.215.959.260,50. Beban terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain – Lain serta Beban Transfer. Beban yang ada di Biro Umum yaitu Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Lain- lain. Rincian beban adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8.
Rincian Beban Tahun 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2	3	4
Beban Pegawai	55.470.415.630,00	52.076.438.432,00	3.393.977.198,00
Beban Gaji dan Tunjangan	24.579.405.630,00	25.150.809.432,00	(571.403.802,00)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	20.785.944.000,00	17.155.951.000,00	3.629.993.000,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.850.000.000,00	1.980.000.000,00	(130.000.000,00)
Beban Honorarium PNS	2.254.070.000,00	2.545.760.000,00	(291.690.000,00)
Beban Honorarium Non PNS	6.000.996.000,00	5.243.918.000,00	757.078.000,00
Beban Persediaan	15.234.588.389,00	17.175.355.950,00	(1.940.767.561,00)
Bahan Pakai Habis	7.292.873.597,00	8.060.831.365,00	(767.957.768,00)
Bahan Bahan/Material	1.630.242.200,00	1.308.227.100,00	322.015.100,00
Cetak dan Penggandaan	869.331.650,00	554.358.000,00	314.973.650,00
Makanan dan Minuman	5.258.240.942,00	6.305.103.785,00	(1.046.862.843,00)
Pakaian Dinas dan Atributnya	68.200.000,00	842.908.500,00	(774.708.500,00)
Pakaian Kerja	60.700.000,00	52.505.200,00	8.194.800,00
Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	55.000.000,00	51.422.000,00	3.578.000,00
Beban Jasa	10.083.238.506,74	11.405.533.566,17	(1.322.295.059,43)
Jasa Kantor	7.129.965.687,50	7.157.798.947,50	(27.833.260,00)
Premi Asuransi	514.308.995,24	323.687.477,67	190.621.517,57
Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	386.350.459,00	414.993.324,00	(28.642.865,00)
Sewa Sarana Mobilitas	594.746.065,00	790.850.261,00	(196.104.196,00)
Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.422.287.500,00	2.018.205.000,00	(595.917.500,00)
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	35.579.800,00	699.998.556,00	(664.418.756,00)
Beban Pemeliharaan	6.566.645.469,95	4.940.828.088,00	1.625.817.381,95
Perawatan Kendaraan Bermotor	2.172.610.547,00	1.926.813.113,00	245.797.434,00
Pemeliharaan	4.394.034.922,95	3.014.014.975,00	1.380.019.947,95
Beban Perjalanan Dinas	4.550.167.018,00	7.846.845.642,00	(3.296.678.624,00)
Perjalanan Dinas	4.550.167.018,00	7.846.845.642,00	(3.296.678.624,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15.635.362.114,32	14.770.757.582,33	864.604.531,99
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.951.575.331,32	11.497.312.466,33	454.262.864,99
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.848.078.132,00	2.462.879.716,00	385.198.416,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	701.413.901,00	701.413.900,00	1,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	134.294.750,00	109.151.500,00	25.143.250,00
			-
Beban Penyisihan Piutang	9.000.000,00	-	9.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	9.000.000,00	-	9.000.000,00
Beban Lain - Lain	368.145.600,00	200.000,00	367.945.600,00
Beban Lain - Lain	368.145.600,00	200.000,00	367.945.600,00
Jumlah Beban	107.917.562.728,01	108.215.959.260,50	(298.396.532,49)

1. Beban Pegawai **Rp55.470.415.630,00**

Beban Pegawai tahun 2020 sebesar Rp55.470.415.630,00, sedangkan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp55.462.033.079,00, selisih sebesar Rp8.382.551,00, karena adanya pengakuan utang gaji pegawai tahun 2020, yang terdiri dari gaji pokok PNS/uang representasi sebesar Rp7.269.937,00, tunjangan keluarga sebesar Rp879.752,00, tunjangan fungsional umum sebesar Rp15.000,00, tunjangan PPh/tunjangan khusus sebesar Rp216.584,00, dan pembulatan gaji sebesar Rp1.278,00. Beban Pegawai tahun 2019 sebesar RpRp52.076.438.432,00. Rincian beban pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.9.
Rincian Beban Pegawai Tahun 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Saldo Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
1	2	3	4	5
Beban Pegawai				
Gaji dan Tunjangan	24.579.405.630,00	24.571.023.079,00	(8.382.551,00)	25.150.809.432,00
Tambahan Penghasilan PNS	20.785.944.000,00	20.785.944.000,00	-	17.155.951.000,00
Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	1.980.000.000,00
Honorarium PNS	2.254.070.000,00	2.254.070.000,00	-	2.545.760.000,00
Honorarium Non PNS	6.000.996.000,00	6.000.996.000,00	-	5.243.918.000,00
Jumlah	55.470.415.630,00	55.462.033.079,00	(8.382.551,00)	52.076.438.432,00

Keterangan:

1. Gaji dan Tunjangan

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	24.571.023.079,00	-	-	24.571.023.079,00
2.	Utang Gaji Tahun 2020	-	8.382.551,00	-	24.579.405.630,00
	Jumlah	24.571.023.079,00	8.382.551,00	-	24.579.405.630,00

- a. **Beban Gaji dan Tunjangan** **Rp24.579.405.630,00**
- Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2020 sebesar Rp24.579.405.630,00 sedangkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp24.571.023.079,00, selisih sebesar Rp8.382.551,00. Selisih tersebut karena adanya pengakuan utang gaji pegawai tahun 2020, yang terdiri dari gaji pokok PNS/uang representasi sebesar Rp7.269.937,00, tunjangan keluarga sebesar Rp879.752,00, tunjangan fungsional umum sebesar Rp15.000,00, tunjangan PPh/tunjangan khusus sebesar Rp216.584,00, dan pembulatan gaji sebesar Rp1.278,00.Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2019 sebesar Rp25.150.809.432,00. Rincian obyek beban gaji dan tunjangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	19.528.470.466,00	19.521.200.529,00	7.269.937,00	20.054.786.360,00
Tunjangan Keluarga	1.689.208.926,00	1.688.329.174,00	879.752,00	1.760.379.084,00
Tunjangan Jabatan	1.500.149.800,00	1.500.149.800,00	-	1.445.294.800,00
Tunjangan Fungsional	217.042.610,00	217.042.610,00	-	148.290.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	620.690.000,00	620.675.000,00	15.000,00	680.645.000,00
Tunjangan Beras	939.287.400,00	939.287.400,00	-	973.722.369,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	84.289.149,00	84.072.565,00	216.584,00	87.396.575,00
Pembulatan Gaji	267.279,00	266.001,00	1.278,00	295.244,00
Jumlah	24.579.405.630,00	24.571.023.079,00	8.382.551,00	25.150.809.432,00

Keterangan:

(dalam rupiah)					
	Keterangan	Realisasi Belanja	Penambahan (Utang 2020)	Pengurangan (Utang 2019)	Saldo Akhir
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	19.521.200.529,00	7.269.937,00	-	19.528.470.466,00
2.	Tunjangan Keluarga	1.688.329.174,00	879.752,00	-	1.689.208.926,00
3.	Tunjangan Jabatan	1.500.149.800,00	-	-	1.500.149.800,00
4.	Tunjangan Fungsional	217.042.610,00	-	-	217.042.610,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	620.675.000,00	15.000,00	-	620.690.000,00
6.	Tunjangan Beras	939.287.400,00	-	-	939.287.400,00
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	84.072.565,00	216.584,00	-	84.289.149,00
8.	Pembulatan Gaji	266.001,00	1.278,00	-	267.279,00
9.	Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	-	-
10.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	-	-	-
11.	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)	-	-	-	-
	Jumlah	24.571.023.079,00	8.382.551,00	-	24.579.405.630,00

b. Beban Tambahan Penghasilan PNS Rp20.785.944.000,00

Beban Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020 sebesar Rp20.785.944.000,00 sama dengan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp20.785.944.000,00. Beban Tambahan Penghasilan PNS tahun 2019 sebesar Rp17.155.951.000,00. Rincian obyek beban tambahan penghasilan PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	16.389.544.000,00	16.389.544.000,00	-	12.842.676.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	-	-	-	150.000.000,00
Beban Tambahan Penghasilan Uang Makan	4.396.400.000,00	4.396.400.000,00	-	4.163.275.000,00
Jumlah	20.785.944.000,00	20.785.944.000,00	-	17.155.951.000,00

c. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Rp1.850.000.000,00

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2020 sebesar Rp1.850.000.000,00 sama dengan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD

serta KDH/WKDH sebesar Rp1.850.000.000,00. Beban Penerimaan Lainnya dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2019 sebesar Rp1.980.000.000,00. Rincian obyek beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	1.980.000.000,00
Jumlah	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	1.980.000.000,00

d. **Beban Honorarium PNS** **Rp2.254.070.000,00**

Beban Honorarium PNS tahun 2020 sebesar Rp2.254.070.000,00 sama dengan realisasi Belanja Honorarium PNS sebesar Rp2.254.070.000,00. Beban Honorarium PNS tahun 2019 sebesar Rp2.545.760.000,00. Rincian obyek beban honorarium PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870.450.000,00	870.450.000,00	-	1.071.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.383.620.000,00	1.383.620.000,00	-	244.200.000,00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	-	-	-	75.000.000,00
Honorarium PNS Lainnya	-	-	-	-
Honorarium Pengelola Uang dan Barang	-	-	-	1.155.560.000,00
Jumlah	2.254.070.000,00	2.254.070.000,00	-	2.545.760.000,00

e. **Beban Honorarium Non PNS** **Rp6.000.996.000,00**

Beban Honorarium Non PNS tahun 2020 sebesar Rp6.000.996.000,00 sama dengan realisasi Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp6.000.996.000,00. Beban Honorarium Non PNS tahun 2019 sebesar Rp5.243.918.000,00. Rincian obyek beban honorarium non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.996.000,00	6.000.996.000,00	-	5.243.918.000,00
Jumlah	6.000.996.000,00	6.000.996.000,00	-	5.243.918.000,00

2. **Beban Persediaan** **Rp15.234.588.389,00**

Beban Persediaan tahun 2020 sebesar Rp15.234.588.389,00 sedangkan realisasi Belanja Persediaan sebesar Rp14.092.672.589,00. Selisih antara beban persediaan dengan realisasi belanja persediaan sebesar

Rp1.141.915.800,00, karena adanya reklas dari alat tulis kantor ke beban penggandaan (salah penganggaran) sebesar Rp10.105.000,00, sisa persediaan alat tulis kantor tahun 2019 sebesar Rp10.158.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp27.157.500,00, Reklas dari alat rumah tangga lainnya (home use) ke beban bahan pakai habis lainnya sebesar Rp1.136.1208.300,00, reklas dari meubelair (belanja modal tidak menambah aset) ke beban bahan pakai habis lainnya sebesar Rp36.500.00,00, adanya sisa persediaan (cetak) tahun 2020 Rp13.775.000,00 dan terdapat reklas dari beban alat tulis kantor ke beban penggandaan sebesar (Rp10.105.000,00) karena kesalahan penganggaran. Beban Persediaan tahun 2019 sebesar Rp17.175.355.950,00. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.10.
Rincian Beban Persediaan Tahun 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Beban Persediaan				
Bahan Pakai Habis	7.292.873.597,00	6.147.287.797,00	1.145.585.800,00	8.060.831.365,00
Bahan Bahan/Material	1.630.242.200,00	1.630.242.200,00	-	1.308.227.100,00
Cetak dan Penggandaan	869.331.650,00	873.001.650,00	(3.670.000,00)	554.358.000,00
Makanan dan Minuman	5.258.240.942,00	5.258.240.942,00	-	6.305.103.785,00
Pakaian Dinas dan Atributnya	68.200.000,00	68.200.000,00	-	842.908.500,00
Pakaian Kerja	60.700.000,00	60.700.000,00	-	52.505.200,00
Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	55.000.000,00	55.000.000,00	-	51.422.000,00
JUMLAH	15.234.588.389,00	14.092.672.589,00	1.141.915.800,00	17.175.355.950,00

- a. **Beban Bahan Pakai Habis** **Rp7.292.873.597,00**
- Beban Bahan Pakai Habis tahun 2020 sebesar Rp7.292.873.597,00 sedangkan realisasi Belanja Pakai Habis sebesar Rp6.147.287.979,00, selisih sebesar Rp1.145.585.800,00. Selisih tersebut karena adanya reklas (salah penganggaran), belanja modal tidak menambah aset, sisa persediaan tahun 2019 dan 2020. Beban Bahan Pakai Habis tahun 2019 sebesar Rp8.060.831.365,00. Rincian mutasi beban bahan pakai habis sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020				Beban 2019
		Belanja	Penambahan	Pengurangan	Beban	
1.	Alat Tulis Kantor	856.733.747,00	10.158.000,00	37.280.500,00	829.611.247,00	504.807.314,00
2.	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1.297.460.000,00	-	-	1.297.460.000,00	899.082.000,00
3.	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	214.470.000,00	-	-	214.470.000,00	154.107.000,00
4.	Pengisian Tabung Gas/LPG	1.170.590.250,00	-	-	1.170.590.250,00	937.298.800,00
6.	Dokumentasi	68.329.000,00	-	-	68.329.000,00	75.731.000,00
7.		-	-	-	-	-
8.	Bahan Dekorasi	2.040.840.000,00	-	-	2.040.840.000,00	1.804.732.500,00
9.	Bahan Makanan/Minuman serta Barang Lainnya	481.864.800,00	-	-	481.864.800,00	-
10.	Bahan Pakai Habis Lainnya	17.000.000,00	1.172.708.300,00	-	1.189.708.300,00	3.685.072.751,00
Jumlah		6.147.287.797,00	1.182.866.300,00	37.280.500,00	7.292.873.597,00	8.060.831.365,00

Keterangan:

1. Alat Tulis Kantor

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	856.733.747,00	-	-	856.733.747,00
2.	Sisa persediaan ATK tahun 2019	-	10.158.000,00	-	866.891.747,00
3.	Sisa persediaan ATK tahun 2020		-	27.175.500,00	839.716.247,00
4.	Reklas ke beban penggandaan		-	10.105.000,00	829.611.247,00
Jumlah		856.733.747,00	10.158.000,00	37.280.500,00	829.611.247,00

2. Bahan Pakai Habis Lainnya

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	17.000.000,00	-	-	17.000.000,00
2.	Reklas dari alat rumah tangga lainnya (home use) BM tidak menambah aset	-	89.802.000,00	-	106.802.000,00
3.	Reklas dari alat rumah tangga lainnya (home use) BM tidak menambah aset	-	358.445.000,00	-	465.247.000,00
4.	Reklas dari alat rumah tangga lainnya (home use) BM tidak menambah aset	-	588.873.300,00	-	1.054.120.300,00
5.	Reklas dari meubelair BM tidak menambah aset	-	36.500.000,00	-	1.090.620.300,00
6.	Reklas dari alat rumah tangga lainnya (home use) BM tidak menambah aset	-	99.088.000,00	-	1.189.708.300,00
Jumlah		17.000.000,00	89.802.000,00	-	1.189.708.300,00

b. **Beban PersediaanBahan/Material** **Rp1.630.242.200,00**

Beban Bahan/Material tahun 2020 sebesar Rp1.630.242.200,00 sedangkan dengan realisasi Belanja Bahan/Material sebesar Rp1.1.630.242.200,00.Beban Bahan Material tahun 2019 sebesar Rp1.308.227.100,00. Rincian obyek beban bahan/material dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	-	-	71.743.000,00
Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	1.180.832.500,00	1.180.832.500,00	-	1.118.701.600,00
Persediaan Bahan Kimia	125.049.200,00	125.049.200,00	-	117.782.500,00
Persediaan Bahan Perlengkapan Kantor	324.360.500,00	324.360.500,00	-	-
Jumlah	1.630.242.200,00	1.630.242.200,00	-	1.308.227.100,00

c.

Beban Cetak dan Penggandaan

Rp869.331.650,00

Beban Cetak dan Penggandaan tahun 2020 sebesar Rp869.331.650,00 sama dengan realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp873.001.650,00. Selisih sebesar Rp3.670.000,00. Selisih tersebut karena adanya sisa persediaan (cetak) tahun 2020 dan terdapat reklas dari beban alat tulis kantor ke beban penggandaan sebesar Rp10.105.000,00 karena kesalahan penganggaran. Beban Cetak dan Penggandaan tahun 2019 sebesar Rp554.358.000,00. Rincian obyek beban cetak dan penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Cetak	476.585.700,00	490.360.700,00	(13.775.000,00)	319.703.250,00
Penggandaan	387.615.950,00	377.510.950,00	10.105.000,00	234.654.750,00
Penjilidan	5.130.000,00	5.130.000,00	-	-
Jumlah	869.331.650,00	873.001.650,00	(3.670.000,00)	554.358.000,00

Keterangan:

1. Cetak

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	490.360.700,00	-	-	490.360.700,00
2.	Sisa persediaan tahun 2020	-	-	13.775.000,00	476.585.700,00
	Jumlah	490.360.700,00	-	13.775.000,00	476.585.700,00

2. Penggandaan

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	377.510.950,00	-	-	377.510.950,00
2.	Reklas dari beban persediaan alat tulis kantor	-	10.105.000,00	-	387.615.950,00
	Jumlah	377.510.950,00	10.105.000,00	-	387.615.950,00

d.

Beban Makanan dan Minuman

Rp5.258.240.942,00

Beban Makanan dan Minuman tahun 2020 sebesar Rp5.258.240.942,00 sama dengan realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp5.258.240.942,00. Beban Makanan dan Minuman tahun 2019 sebesar Rp6.305.103.785,00. Rincian obyek beban makanan dan minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	183.238.800,00
Makanan dan Minuman Rapat	299.525.000,00	299.525.000,00	-	69.752.500,00
Makanan dan Minuman Tamu	4.031.823.942,00	4.031.823.942,00	-	5.116.142.185,00
Makan dan Minum RT KDH dan WKDH	926.892.000,00	926.892.000,00	-	935.970.300,00
Jumlah	5.258.240.942,00	5.258.240.942,00	-	6.305.103.785,00

e. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Rp68.200.000,00

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2020 sebesar Rp68.200.00,00 sama dengan realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp68.200.000,00. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2019 sebesar Rp842.908.500,00. Rincian obyek beban pakaian dinas dan atributnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	12.000.000,00
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	28.000.000,00	28.000.000,00	-	11.200.000,00
Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.000.000,00	24.000.000,00	-	808.508.500,00
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	16.200.000,00	16.200.000,00	-	11.200.000,00
Jumlah	68.200.000,00	68.200.000,00	-	842.908.500,00

f. Beban Pakaian Kerja Rp60.700.000,00

Beban Pakaian Kerja tahun 2020 sebesar Rp60.700.000,00 sama dengan realisasi Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp60.700.000,00. Beban Pakaian Kerja tahun 2019 sebesar Rp52.505.200,00 Rincian obyek beban pakaian kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Pakaian Kerja Lapangan	49.900.000,00	49.900.000,00	-	52.505.200,00
Pakaian Kerja Hitam-Putih	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-
Jumlah	60.700.000,00	60.700.000,00	-	52.505.200,00

g. Beban Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu Rp55.000.000,00

Beban Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu tahun 2020 sebesar Rp55.000.000,00 sama dengan realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu sebesar Rp 55.000.000,00. Beban Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu tahun 2019 sebesar Rp51.422.000,00. Rincian obyek beban pakaian khusus dan hari – hari tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Pakaian KORPRI	2.600.000,00	2.600.000,00		
Pakaian Adat Daerah	17.600.000,00	17.600.000,00	-	13.350.000,00
Pakaian Batik Tradisional	14.400.000,00	14.400.000,00	-	35.000.000,00
Pakaian Olahraga	-	-	-	-
Pakaian Pramuka/Paskibraka	20.400.000,00	20.400.000,00	-	3.072.000,00
Jumlah	55.000.000,00	55.000.000,00	-	51.422.000,00

3. Beban Jasa Rp10.083.238.506,74

Beban Jasa tahun 2020 sebesar Rp10.083.238.506,74 sedangkan realisasi Belanja Jasa sebesar Rp10.041.170.388,00. Selisih antara beban jasa dengan realisasi belanja jasa sebesar Rp42.068.118,74,karena adanya pengakuan utang beban telepon tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp122.325.839,00 dan 2020 sebesar Rp130.860.257,00, beban telepon dibayar dimuka tahun 2019 sebesar Rp12.693.765,17 dan tahun 2020 untuk semester I sebesar Rp4.981.438,67 dan semester II sebesar Rp1.469.300,00, serta pengakuan utang beban listrik bulan desember 2019 yang dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp173.657.031,00, utang beban listrik bulan desember 2020 yang dibayarkan tahun 2021 sebesar Rp179.368.529,00, beban dibayar dimuka premi asuransi kendaraan dinas operasional KDH/WKDH tahun 2019 sebesar Rp97.903.743,33, beban dibayar dimuka premi asuransi kendaraan dinas operasional KDH/WKDH

tahun 2020 sebesar Rp76.174.567,09 dan beban lain-lain (Biaya Administrasi polis asuransi BMD tahun 2020) sebesar Rp150.000,00. Beban Jasa tahun 2019 sebesar Rp11.405.533.566,17. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.11.
Rincian Beban Persediaan Tahun 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Beban Jasa				
Jasa Kantor	7.129.965.687,50	7.109.476.745,00	20.488.942,50	7.157.798.947,50
Premi Asuransi	514.308.995,24	492.729.819,00	21.579.176,24	323.687.477,67
Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	386.350.459,00	386.350.459,00	-	414.993.324,00
Sewa Sarana Mobilitas	594.746.065,00	594.746.065,00	-	790.850.261,00
Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.422.287.500,00	1.422.287.500,00	-	2.018.205.000,00
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	35.579.800,00	35.579.800,00	-	699.998.556,00
JUMLAH	10.083.238.506,74	10.041.170.388,00	42.068.118,74	11.405.533.566,17

a. **Beban Jasa Kantor** **Rp7.129.965.687,50**

Beban Jasa Kantor tahun 2020 sebesar Rp7.129.965.687,50 sedangkan realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp7.109.476.745,00, selisih sebesar Rp20.488.942,50. Selisih tersebut karena adanya pengakuan utang beban telepon tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp122.325.839,00 dan tahun 2020 yang dibayarkan tahun 2021 sebesar Rp130.860.257,00, beban telepon dibayar dimuka tahun 2019 sebesar Rp12.693.765,17 dan tahun 2020 untuk semester I sebesar Rp4.981.438,67 dan semester II sebesar Rp1.469.300,00, serta pengakuan utang beban listrik bulan desember 2019 yang dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp173.657.031,00, utang beban listrik bulan desember 2020 yang dibayarkan tahun 2021 sebesar Rp179.368.529,00. Beban Jasa Kantor tahun 2019 sebesar Rp7.157.798.947,50. Rincian obyek beban jasa kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Telepon	1.438.406.344,50	1.423.628.900,00	14.777.444,50	1.227.925.067,50
Air	279.648.530,00	279.648.530,00	-	426.435.440,00
Listrik	2.266.131.233,00	2.260.419.735,00	5.711.498,00	2.202.350.983,00
Paket/Pengiriman	96.395.500,00	96.395.500,00	-	56.347.500,00
Transaksi Keuangan	560.000,00	560.000,00	-	350.000,00
Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.998.824.080,00	2.998.824.080,00	-	2.977.233.957,00
Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	-	267.156.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-
Jumlah	7.129.965.687,50	7.109.476.745,00	20.488.942,50	7.157.798.947,50

Keterangan:

1. Telepon

(dalam rupiah)					
	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	1.423.628.900,00	-	-	1.423.628.900,00
2.	Beban telepon bln desember 2019 yang dibayarkan tahun 2020 (utang beban telepon)	-	-	122.325.839,00	1.301.303.061,00
3.	Beban dibayar dimuka tahun 2019	-	12.693.765,17	-	1.313.996.826,17
4.	Beban dibayar dimuka semester I tahun 2020	-	-	4.981.438,67	1.309.015.387,50
5.	Beban dibayar dimuka semester II tahun 2020	-	-	1.469.300,00	1.307.546.087,50
6.	Beban telepon bln desember 2020 yang dibayarkan tahun 2021 (utang beban telepon)	-	130.860.257,00	-	1.438.406.344,50
Jumlah		1.423.628.900,00	143.554.022,17	128.776.577,67	1.438.406.344,50

2. Listrik

(dalam rupiah)					
	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	2.260.419.735,00	-	-	2.260.419.735,00
2.	Beban listrik bln desember 2019 yang dibayarkan tahun 2020 (utang beban listrik)	-	-	173.657.031,00	2.086.762.704,00
3.	Beban listrik bln desember 2020 yang dibayarkan tahun 2021 (utang beban listrik)	-	179.368.529,00	-	2.266.131.233,00
Jumlah		2.260.419.735,00	179.368.529,00	173.657.031,00	2.266.131.233,00

b. Beban Premi Asuransi

Rp514.308.995,24

Beban Premi Asuransi tahun 2020 sebesar Rp514.308.995,25 sedangkan realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar Rp492.729.819,00, selisih sebesar Rp21.579.176,24 yaitu beban dibayar dimuka premi asuransi kendaraan dinas operasional KDH/WKDH tahun 2019 sebesar Rp97.903.743,33, beban dibayar dimuka premi asuransi kendaraan dinas operasional KDH/WKDH tahun 2020 sebesar Rp76.174.567,09 dan beban lain-lain (Biaya Administrasi polis asuransi BMD tahun 2020 sebesar Rp150.000,00. Beban Premi Asuransi tahun 2019 sebesar Rp323.687.477,67. Rincian obyek beban premi asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Premi Asuransi Kesehatan	231.257.545,00	231.257.545,00	-	127.675.182,00
Premi Asuransi Barang Milik Daerah	283.051.450,24	261.472.274,00	21.579.176,24	196.012.295,67
Jumlah	514.308.995,24	492.729.819,00	21.579.176,24	323.687.477,67

Keterangan:

1. Premi Asuransi Barang Milik Daerah

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	261.472.274,00	-	-	261.472.274,00
2.	Beban dibayar dimuka (premi asuransi BMD) tahun 2019	-	97.903.743,33	-	359.376.017,33
3.	Beban dibayar dimuka (premi asuransi BMD) tahun 2020	-	-	76.174.567,09	283.201.450,24
4.	Beban lain-lain (biaya administrasi polis asuransi BMD) tahun 2020	-	-	150.000,00	283.051.450,24
	Jumlah	261.472.274,00	97.903.743,33	76.324.567,09	283.051.450,24

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tahun 2020 sebesar Rp386.350.459,00 sama dengan realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp386.350.459,00. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tahun 2019 sebesar Rp414.993.324,00. Rincian obyek beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Sewa Gedung/Kantor/Tempat	386.350.459,00	386.350.459,00	-	414.993.324,00
Jumlah	386.350.459,00	386.350.459,00	-	414.993.324,00

Beban Sewa Sarana Mobilitas tahun 2020 sebesar Rp594.746.065,00 sama dengan realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp594.746.065,00. Beban Sewa Sarana Mobilitas tahun 2019 sebesar Rp790.850.261,00. Rincian obyek beban sewa sarana mobilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Sewa Sarana Mobilitas Darat	263.160.000,00	263.160.000,00	-	158.090.000,00
Sewa Sarana Mobilitas Udara	331.586.065,00	331.586.065,00	-	632.760.261,00
Jumlah	594.746.065,00	594.746.065,00	-	790.850.261,00

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2020 sebesar Rp1.422.287.500,00 Sama dengan realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp1.422.287.500,00. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2019 sebesar

Rp2.018.205.000,00. Rincian obyek beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Sewa Meja Kursi	296.537.500,00	296.537.500,00	-	269.750.000,00
Sewa Tenda	429.850.000,00	429.850.000,00	-	572.305.000,00
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	-	-	-	25.400.000,00
Sewa Sound System	284.300.000,00	284.300.000,00	-	397.750.000,00
Sewa Kipas Angin/AC	220.750.000,00	220.750.000,00	-	329.850.000,00
Sewa Karpet	190.850.000,00	190.850.000,00	-	423.150.000,00
Jumlah	1.422.287.500,00	1.422.287.500,00	-	2.018.205.000,00

**f. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Rp35.579.800,00**

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020 sebesar Rp35.579.800,00 sama dengan realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp35.579.800,00. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2019 sebesar Rp699.998.556,00. Rincian obyek beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Bimbingan Teknis	35.579.800,00	35.579.800,00	-	486.242.256,00
Beban Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	213.756.300,00
Jumlah	35.579.800,00	35.579.800,00	-	699.998.556,00

4. Beban Pemeliharaan Rp6.566.645.469,95

Beban Pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp6.566.645.469,95 sedangkan realisasibelanja pemeliharaan sebesar Rp6.551.300.469,95 selisih sebesar Rp15.345.000, Selisih karena ada reklas dari aset tetap (BM tidak menambah aset) ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar (Rp196.000.000,00) dan reklas dari beban pemeliharaan aset tetap lainnya ke aset tetap peralatan studio video dan film (video wall ruang kerja gubernur) sebesar Rp180.655.000,00. Beban Pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp4.940.828.088,00. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.12.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2020

(dalam rupiah)

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	1.464.153.600,00	-	-	1.464.153.600,00
2.	Reklas dari aset tetap bangunan gedung kantor (BM tidak menambah aset)	-	196.000.000,00	-	1.660.153.600,00
	Jumlah	1.464.153.600,00	196.000.000,00	-	1.660.153.600,00

2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	2.914.536.322,95	-	-	2.914.536.322,95
2.	Reklas ke aset tetap peralatan studio video dan film (video wall ruang kerja Gubernur)	-	-	180.655.000,00	2.733.881.322,95
	Jumlah	2.914.536.322,95	-	180.655.000,00	2.733.881.322,95

5. Beban Perjalanan Dinas Rp4.550.167.018,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar Rp4.550.167.018,00 sedangkan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp4.525.909.818. selisih sebesar Rp24.257.200,00, dikarenakan adanya reklas dari aset tetap (peralatan studio visual) ke beban perjalanan dinas. Beban Perjalanan dinas tahun 2019 sebesar Rp7.846.845.642,00. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.13.
Rincian Beban Persediaan Tahun 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Beban Perjalanan Dinas				
Perjalanan Dinas	4.550.167.018,00	4.525.909.818,00	24.257.200,00	7.846.845.642,00
JUMLAH	4.550.167.018,00	4.525.909.818,00	24.257.200,00	7.846.845.642,00

a. Beban Perjalanan Dinas Rp4.550.167.018,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar Rp4.550.167.018,00 sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp4.525.909.818,00. Selisih sebesar Rp24.257.200,00. Selisih tersebut dikarenakan adanya reklas dari aset tetap (peralatan studio visual) ke beban perjalanan dinas luar daerah. Beban Perjalanan Dinas tahun 2019 sebesar Rp7.846.845.642,00. Rincian obyek beban perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.814.313.720,00	1.814.313.720,00	-	2.372.109.601,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.735.853.298,00	2.711.596.098,00	24.257.200,00	5.474.736.041,00
Jumlah	4.550.167.018,00	4.525.909.818,00	24.257.200,00	7.846.845.642,00

Keterangan:

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah

(dalam rupiah)					
	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	2.711.596.098,00	-	-	2.711.596.098,00
2.	Reklas dari aset tetap (peralatan studio visual)	-	24.257.200,00	-	2.735.853.298,00
Jumlah		2.711.596.098,00	24.257.200,00	-	2.735.853.298,00

6. **Beban Penyusutan dan Amortisasi** **Rp15.635.362.114,32**

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 sebesar Rp15.635.362.114,32. Sedangkan tahun 2019 sebesar Rp14.770.757.582,33. Rincian obyek beban penyusutan dan amortisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.12.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020

URAIAN	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.951.575.331,32	-	11.951.575.331,32	11.497.312.466,33
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.848.078.132,00	-	2.848.078.132,00	2.462.879.716,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	701.413.901,00	-	701.413.901,00	701.413.900,00
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	134.294.750,00	-	134.294.750,00	109.151.500,00
JUMLAH	15.635.362.114,32	-	15.635.362.114,32	14.770.757.582,33

a. **Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin** **Rp11.951.575.331,32**

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp11.951.575.331,32 sedangkan beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp11.497.312.466,33. Tidak ada realisasi belanja untuk penyusutan peralatan dan mesin. Rincian objek beban penyusutan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.548.730.753,00	-	5.124.041.236,33
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	45.808.122,00	-	48.375.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bemesin	8.798.880,00	-	2.907.824,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	1.695.834,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	-	-	11.212.500,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	451.936.328,00	-	674.016.592,04
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	3.902.694.035,32	-	2.911.934.069,78
Beban Penyusutan Komputer	-	-	553.822.505,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	523.657.997,00	-	780.394.689,18
Beban Penyusutan Alat Studio	1.430.653.972,00	-	1.006.738.193,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	62.861.986,00	-	123.495.534,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	9.546.000,00	-	795.501,00
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.715.000,00	-	7.715.000,00
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	324.236.526,00	-	98.407.152,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	222.720.360,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	4.347.760,00	-	-
Beban Penyusutan Komputer Unit	469.620.663,00	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	159.271.475,00	-	-
Jumlah	11.951.575.331,32	-	11.566.576.156,33

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp2.848.078.132,00

Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp2.848.078.132,00, sedangkan beban gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp2.462.879.716,00. Tidak ada realisasi belanja untuk penyusutan gedung dan bangunan. Rincian objek beban penyusutan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.055.696.399,00	-	1.764.737.850,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	792.381.733,00	-	695.439.433,00
Beban Penyusutan Bangunan Rambu - Rambu	0,00		2.702.433,00
Jumlah	2.848.078.132,00	-	2.462.879.716,00

c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp701.413.901,00

Beban penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2020 sebesar Rp701.413.901,00, sedangkan beban jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2019 sebesar Rp701.413.900,00. Tidak ada realisasi belanja untuk penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan. Rincian objek beban penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja	
Beban Penyusutan Jalan	577.533.710,00	-	577.533.710,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	2.281.258,00	-	1.992.246,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	53.822.156,00	-	53.822.156,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	-	289.012,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	-	4.172.632,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	630.056,00	-	630.056,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	2.795.538,00	-	2.795.538,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	23.548.818,00	-	23.548.818,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	1.719.940,00	-	1.719.940,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	12.602.665,00	-	12.602.664,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	19.657.122,00	-	19.657.122,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	2.650.005,00	-	2.650.006,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	4.172.633,00	-	-
Jumlah	701.413.901,00	-	701.413.900,00

d. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain **Rp0,00**

Tidak ada beban penyusutan aset lain-lain tahun 2020 dan tahun 2019. Tidak ada realisasi belanja untuk penyusutan aset lain-lain. Rincian objek beban penyusutan aset lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja	
Beban Penyusutan Barang Dihapuskan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud **Rp134.294.750,00**

Beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2020 sebesarRp134.294.750,00 sedangkan beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2019 sebesar Rp109.151.500,00. Tidak ada realisasi belanja untuk amortisasi aset tidak berwujud. Rincian objek beban penyusutan amortisasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	134.294.750,00	-	109.151.500,00
Jumlah	134.294.750,00	-	109.151.500,00

7. Beban Penyisihan Piutang **Rp9.000.000,00**

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, nilai penyisihan piutang ditentukan dengan menggolongkan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus objek retribusi, dapat

dipilah berdasarkan karakteristik yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet. Pada kualitas diragukan, jika umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan. sehingga piutang retribusi Biro Umum tersebut digolongkan dalam kualitas piutang diragukan. Persentase taksiran penyisihan piutang tak tertagih untuk kualitas piutang diragukan adalah sebesar 50% dari nilai perolehan piutang sebesar Rp18.000.000,00 sehingga nilai beban penyisihan piutang sebesar Rp9.000.000,00. Beban penyisihan piutang tahun 2019 sebesar Rp0,00. Rincian obyek beban penyisihan piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020				Tahun 2019
	Nilai Perolehan Piutang Pendapatan	Karakteristik Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Piutang	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	18.000.000,00	Diragukan	50%	9.000.000,00	0,00
Jumlah				9.000.000,00	-

8. Beban Lain – Lain

Rp368.145.600,00

Beban Lain – Lain akhir tahun 2020 sebesar Rp368.145.600,00. Tidak ada realisasi belanja lain-lain, penambahan beban lain-lain sebesar Rp368.145.000,00. berasal dari beban premi asuransi BMD yaitu pembayaran materai premi asuransi sebesar Rp150.000,00, reklas dari alat rumah tangga lainnya ke extracomptable (BM tahun berjalan bernilai dibawah kapitalisasi) sebesar Rp194.063.600,00 dan reklas dari alat dapur ke extracomptable (BM tahun berjalan bernilai dibawah kapitalisasi) sebesar Rp173.932.000,00. Beban lain – lain tahun 2019 sebesar Rp200.000,00. Rincian obyek beban lain – lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Selisih	Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja		
Beban Lain - Lain	368.145.600,00	-	368.145.600,00	200.000,00
Jumlah	368.145.600,00	-	368.145.600,00	200.000,00

Keterangan:

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	-	-	-	-
2.	Reklas dari beban premi asuransi BMD	-	150.000,00	-	150.000,00
3.	Reklas dari alat rumah tangga lainnya ke extracomptable (BM tahun berjalan bernilai dibawah kapitalisasi)	-	194.063.600,00	-	194.213.600,00
4.	Reklas dari alat dapur ke extracomptable (BM tahun berjalan bernilai dibawah kapitalisasi)	-	173.932.000,00	-	368.145.600,00
Jumlah		-	368.145.600,00	-	368.145.600,00

b. Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun anggaran 2020 sebesar Rp823.428.476,00, sedangkan TA 2019 tidak ada defisit dari kegiatan non operasional. Defisit kegiatan non operasional lainnya berasal dari kegiatan penghapusan aset lainnya (hibah). Rincian obyek defisit non operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019
	Beban	Realisasi Belanja	
Defisit Penghapusan Aset Lainnya	823.428.476,00	-	-
Jumlah	823.428.476,00	-	-

Keterangan :

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Realisasi belanja	-	-	-	-
2.	Penghapusan Aset Lain-lain (aset yang dihibahkan) berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke KOREM	-	333.424.487,00	-	333.424.487,00
3.	Penghapusan Aset Lain-lain (aset yang dihibahkan) berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke Pengadilan Tinggi	-	333.356.357,00	-	666.780.844,00
4.	Penghapusan Aset Lain-lain (aset yang dihibahkan) berupa Peralatan Studio dan Film (Videotron) ke UNPAR	-	156.647.632,00	-	823.428.476,00
	Jumlah	-	823.428.476,00	-	823.428.476,00

c. Pos Luar Biasa

Tidak ada pos luar biasa

V.1.5. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Aset terdiri atas:

1. ASET LANCAR

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

a) Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

b) Kas Bendahara PengeluaranRp0,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

c) Investasi Jangka Pendek

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

d) Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.000.000,00. Piutang pendapatan di Biro Umum yaitu piutang retribusi – pemakaian kekayaan daerah (piutang sewa kantin). Pendapatan sewa kantin untuk bulan Juli s/d Desember 2020 belum diterima sehingga menimbulkan piutang pendapatan sebesar Rp18.000.000,00. Saldo piutang per 31 Desember 2019 Rp0,00. Rincian piutang pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Piutang penyewaan tanah dan bangunan (sewa bangunan kantin)	18.000.000,00	-
Jumlah	18.000.000,00	-

e) Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

f) Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka kualitas piutang di Biro Umum masuk dalam kategori meragukan (jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan) dengan persentase taksiran penyisihan piutang tak tertagih sebesar 50%. Dengan nilai perolehan piutang sebesar Rp18.000.000,00 untuk tagihan sewa kantin bulan Juli s/d Desember 2020 (lebih dari 3 bulan) maka nilai penyisihan piutangnya adalah 50% yaitu sebesar Rp9.000.000,00. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2019 Rp0,00. Rincian penyisihan piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Penyisihan Piutang Retribusi	9.000.000,00	-
Jumlah	9.000.000,00	-

g) Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.625.305,76 merupakan pembayaran televisi berlangganan sebesar Rp6.450.738,67 dan premi asuransi kendaraan dinas KDH/WKDH sebesar Rp76.174.567,09. Sedangkan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp110.597.508,50. Rincian beban dibayar dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Televisi berlangganan	6.450.738,67	12.693.765,17
Premi asuransi BMD	76.174.567,09	97.903.743,33
Jumlah	82.625.305,76	110.597.508,50

h) Persediaan

Rp40.950.000,00

Saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.950.500,00. Persediaan masuk per 31 Desember 2020 sebesar 15.275.538.889,00, berasal dari saldo persediaan per 1 januari 2020 sebesar Rp10.158.000,00, realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2020 yang merupakan belanja persediaan adalah sebesar Rp14.092.672.589,00 dan reklas dari aset tetap sebesar Rp1.172.708.300,00. Persediaan keluar per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.234.588.389,00, berasal dari total pengeluaran (SPJ Fungsional) sebesar Rp14.061.880.089,00 dan reklas keluar sebesar 1.172.708.300,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.158.000,00. Pencatatan persediaan sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018. Rincian persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 1 Januari 2020	PERSEDIAAN MASUK			PERSEDIAAN KELUAR			Saldo Akhir
			Total Pembelian	Reklas dari	Total	Total Pengeluaran	Reklas Keluar	Total	
			(SPJ Fungsional)	Aset Tetap	Persediaan Masuk	(SPJ Fungsional)		Persediaan Keluar	
	Bahan Pakai Habis								
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	10.158.000,00	846.628.747,00	-	856.786.747,00	829.611.247,00	-	829.611.247,00	27.175.500,00
2.	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	-	1.297.460.000,00	-	1.297.460.000,00	1.297.460.000,00	-	1.297.460.000,00	-
3.	Persediaan Perangko, Materiail, dan Benda Pos Lainnya	-	214.470.000,00	-	214.470.000,00	214.470.000,00	-	214.470.000,00	-
4.	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	1.170.590.250,00	-	1.170.590.250,00	1.170.590.250,00	-	1.170.590.250,00	-
5.	Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	-	68.329.000,00	-	68.329.000,00	68.329.000,00	-	68.329.000,00	-
6.	Bahan Dekorasi	-	2.040.840.000,00	-	2.040.840.000,00	2.040.840.000,00	-	2.040.840.000,00	-
7.	Bahan Makanan/Minuman serta Barang Lainnya	-	481.864.800,00	-	481.864.800,00	481.864.800,00	-	481.864.800,00	-
8.	Bahan Habis Pakai Lainnya	-	17.000.000,00	1.073.620.300,00	1.090.620.300,00	17.000.000,00	1.073.620.300,00	1.090.620.300,00	-
	Persediaan Bahan/Material								
9.	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	-	1.180.832.500,00	99.088.000,00	1.279.920.500,00	1.180.832.500,00	99.088.000,00	1.279.920.500,00	-
10.	Persediaan Bahan Kimia	-	125.049.200,00	-	125.049.200,00	125.049.200,00	-	125.049.200,00	-
11.	Bahan Perlengkapan Kantor	-	324.360.500,00	-	324.360.500,00	324.360.500,00	-	324.360.500,00	-
	Cetak				-				
12.	Cetak	-	490.360.700,00	-	490.360.700,00	476.585.700,00	-	476.585.700,00	13.775.000,00
13.	Penggandaan	-	387.615.950,00	-	387.615.950,00	387.615.950,00	-	387.615.950,00	-
14.	Penjilidan	-	5.130.000,00	-	5.130.000,00	5.130.000,00	-	5.130.000,00	-
	Makanan dan Minuman								
15.	Makanan dan Minuman Rapat	-	299.525.000,00	-	299.525.000,00	299.525.000,00	-	299.525.000,00	-
16.	Makanan dan Minuman Tamu	-	4.031.823.942,00	-	4.031.823.942,00	4.031.823.942,00	-	4.031.823.942,00	-
17.	Makanan dan Minuman RT KDH dan WKDH	-	926.892.000,00	-	926.892.000,00	926.892.000,00	-	926.892.000,00	-

No.	Uraian	Saldo 1 Januari 2020	PERSEDIAAN MASUK			PERSEDIAAN KELUAR			Saldo Akhir
			Total Pembelian	Reklas dari	Total	Total Pengeluaran	Reklas Keluar	Total	
			(SPJ Fungsional)	Aset Tetap	Persediaan Masuk	(SPJ Fungsional)		Persediaan Keluar	
	Pakaian Dinas dan Atributnya								
18.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	-	28.000.000,00	-
19.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-
20.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	16.200.000,00	-	16.200.000,00	16.200.000,00	-	16.200.000,00	-
	Pakaian Kerja				-				
21.	Pakaian Kerja Lapangan	-	49.900.000,00	-	49.900.000,00	49.900.000,00	-	49.900.000,00	-
22.	Pakaian Kerja Hitam Putih	-	10.800.000,00	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-
	Pakaian Khusus dan Hari-hari								
23.	Pakaian KORPRI	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
24.	Pakaian Adat Daerah	-	17.600.000,00	-	17.600.000,00	17.600.000,00	-	17.600.000,00	-
25.	Pakaian Batik Tradisional	-	14.400.000,00	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-
26.	Pakaian Pramuka/Paskibra	-	20.400.000,00	-	20.400.000,00	20.400.000,00	-	20.400.000,00	-
	JUMLAH	10.158.000,00	14.092.672.589,00	1.172.708.300,00	15.275.538.889,00	14.061.880.089,00	1.172.708.300,00	15.234.588.389,00	40.950.500,00

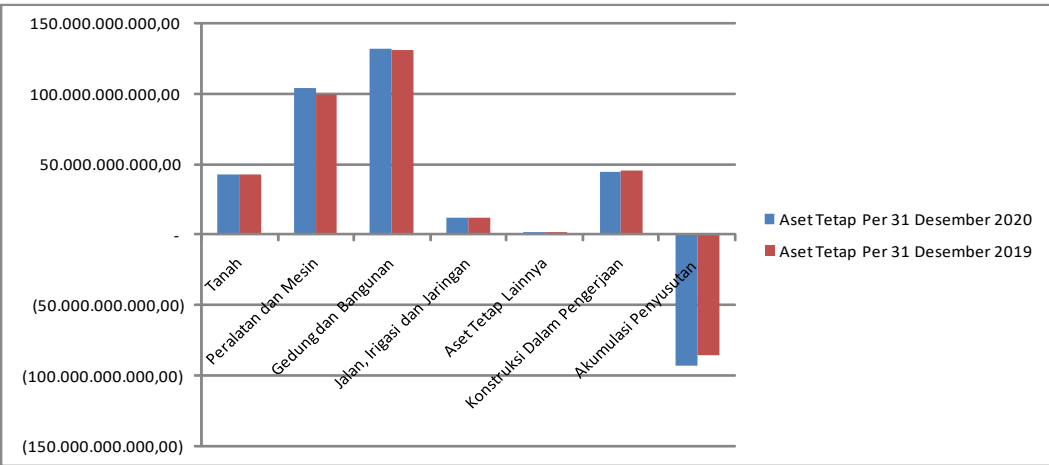
2. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp235.066.902.019,02. Sedangkan nilai aset tetap per 01 Januari 2020 Rp245.617.368.564,03. Perbandingan rincian aset tetap disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.13.
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Tanah	42.915.500.000,00	2.542.890.900,48	2.528.890.900,48	42.929.500.000,00
Peralatan dan Mesin	99.142.583.892,32	33.764.816.561,14	29.327.702.994,47	103.579.697.458,99
Gedung dan Bangunan	130.970.500.374,67	12.167.069.733,99	11.413.225.113,99	131.724.344.994,67
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.132.645.785,90	11.560.473,07	11.560.473,07	12.132.645.785,90
Aset Tetap Lainnya	1.425.474.400,00	1.075.197.000,00	1.075.197.000,00	1.425.474.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.656.561.756,00	-	75.346.899,58	44.581.214.856,42
Akumulasi Penyusutan	(85.625.897.644,86)	24.235.080.223,50	8.555.002.391,40	(101.305.975.476,96)
Jumlah	245.617.368.564,03	73.796.614.892,18	52.986.925.772,99	235.066.902.019,02



a) Tanah

Rp42.929.500.000,00

Tanah yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp42.929.500.000,00, sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp42.915.500.000,00. Mutasi tambah tanah sebesar 2.542.890.900,48, dengan rincian alih status tanah bangunan dari Sekretariat DPRD Povinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp360.000.000,00 dan penyesuaian saldo awal sesuai dengan SIMDA BMD sebesar Rp2.182.890.900,48. Mutasi kurang sebesar Rp2.528.890.900,48, dengan rincian alih status tanah bangunan ke Sekretariat DPRD Povinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp346.000.000,00 dan penyesuaian saldo awal sesuai dengan SIMDA BMD sebesar Rp2.182.890.900,48. Tidak ada belanja modal tanah di tahun 2020. Mutasi tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	30 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp 42.915.500.000,00
Penambahan:	
- Belanja Modal	Rp -
- Alih status dari Sekretariat DPRD Prov. Kalteng	Rp 360.000.000,00
- Penyesuaian saldo awal per rincian objek (sesuai dengan SIMDA BMD)	Rp 2.182.890.900,48
Jumlah (b)	Rp 2.542.890.900,48
Pengurangan:	
- Penyesuaian saldo awal per rincian objek (sesuai dengan SIMDA BMD)	Rp 2.182.890.900,48
- Reklas ke R/K PPKD (alih status ke Sekretariat DPRD)	Rp 346.000.000,00
Jumlah (c)	Rp 2.528.890.900,48
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 14.000.000,00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp 42.929.500.000,00

Keterangan:

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Saldo Awal	42.915.500.000,00	-	-	42.915.500.000,00
2.	Belanja Modal	-	-	-	42.915.500.000,00
3.	Alih status dari Sekretariat DPRD Prov. Kalteng berupa 1 (satu) kavling tanah bangunan	-	360.000.000,00	-	43.275.500.000,00
4.	Alih status ke Sekretariat DPRD Prov. Kalteng berupa 1 (satu) kavling tanah bangunan	-	-	346.000.000,00	42.929.500.000,00
5.	Penyesuaian saldo awal per rincian objek (sesuai dengan SIMDA BMD)	-	2.182.890.900,48	-	45.112.390.900,48
6.	Penyesuaian saldo awal per rincian objek (sesuai dengan SIMDA BMD)	-	-	2.182.890.900,48	42.929.500.000,00
	Jumlah	42.915.500.000,00	2.542.890.900,48	2.528.890.900,48	42.929.500.000,00

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	9.722.390.900,48	360.000.000,00	2.528.890.900,48	7.553.500.000,00
2.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	33.193.109.099,52	2.182.890.900,48	-	35.376.000.000,00
	Jumlah	42.915.500.000,00	360.000.000,00	2.528.890.900,48	42.929.500.000,00

Saldo tanah di BA rekon aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.929.500,00 sama dengan neraca di Simda Keuangan.

b) Peralatan dan mesin

Rp103.579.697.458,99

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp103.579.697.458,99, sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp99.142.583.892,32. Mutasi tambah peralatan dan mesin berasal dari belanja modal sebesar Rp8.803.779.420,00,00, penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai Simda BMD sebesar Rp10.319.599.272,00, penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108 tahun 2016 sebesar Rp12.504.943.308,29, Penyesuaian nilai saldo kendaraan bermotor angkutan barang sesuai Simda BMD (awalnya dianggarkan di BM kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp147.840.000,00, alih status aset antar SKPD sebesar Rp1.027.632.160,85, reklas dari beban pemeliharaan aset tetap lainnya ke peralatan studio video dan film sebesar Rp180.655.000,00, reklas antar kode rekening sebesar Rp705.912.400,00. Mutasi kurang peralatan dan mesin berasal dari penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai Simda BMD sebesar Rp10.319.599.272,00, penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108 tahun 2016 sebesar Rp12.474.508.988,29, penyesuaian nilai saldo kendaraan bermotor angkutan barang sesuai Simda BMD (awalnya dianggarkan di BM kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp147.840.000,00, aset yang akan dihibahkan sebesar Rp1.182.600.100,00, alih status aset antar

SKPD sebesar Rp2.434.062.679,63, setoran atas temuan BPK tahun 2019 Rp522.851.454,55, reklas peralatan studio visual ke beban perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp24.257.200,00, belanja modal tidak menambah aset sebesar Rp1.037.120.300,00, reklas ke ekstrascomptable (BM tahun berjalan dibawah kapitalisasi) sebesar Rp367.995.600,00, reklas antar kode rekening sebesar Rp705.912.400,00. Mutasi peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp	99.142.583.892,32
Penambahan:		
- Belanja Modal	Rp	8.803.779.420,00
- Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	Rp	10.319.599.272,00
- Penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108 tahun 2016	Rp	12.579.398.308,29
- Penyesuaian nilai saldo kendaraan bermotor angkutan barang sesuai Simda BMD (awalnya dianggarkan di BM kendaraan dinas bermotor perorangan)	Rp	147.840.000,00
- Alih status aset dari Biro Hukum berupa kendaraan dinas roda empat	Rp	268.598.944,00
- Alih status aset dari Inspektorat berupa kendaraan dinas roda empat	Rp	119.500.000,00
- Alih status aset dari Sekretariat DPRD berupa meubelair, alat pendingin dan alat rumah tangga lainnya	Rp	639.533.216,85
- reklas dari beban pemeliharaan aset tetap lainnya ke peralatan studio video dan film	Rp	180.655.000,00
- Reklas antar kode rekening dari alat kesehatan olahraga ke kendaraan tak bermotor berpenumpang (BM salah penganggaran)	Rp	43.395.000,00
- Reklas antar kode rekening dari peralatan studio visual ke alat pendingin (BM salah penganggaran)	Rp	149.864.000,00
- Reklas antar kode rekening dari alat rumah tangga lainnya ke alat dapur	Rp	5.586.400,00
- Reklas antar kode rekening dari alat ukur lainnya ke alat keamanan	Rp	158.642.000,00
- Reklas antar kode rekening dari alat kantor lainnya ke alat reproduksi	Rp	199.925.000,00
- Reklas antar kode rekening dari peralatan personal komputer ke alat reproduksi	Rp	148.500.000,00
Jumlah (b)	Rp	33.764.816.561,14
Pengurangan:		
- Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	Rp	10.319.599.272,00
- Penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108 tahun 2016	Rp	12.548.963.988,29
- Penyesuaian nilai saldo kendaraan bermotor angkutan barang sesuai Simda BMD (awalnya dianggarkan di BM kendaraan dinas bermotor perorangan)	Rp	147.840.000,00
- Reklas ke aset lainnya (aset yang akan dihibahkan) kendaraan dinas roda empat ke Korem	Rp	491.362.400,00
- Reklas ke aset lainnya (aset yang akan dihibahkan) kendaraan roda 4 ke Pengadilan Tinggi	Rp	491.262.000,00
- Reklas ke aset lainnya (aset yang akan dihibahkan) berupa videotron ke Unpar	Rp	199.975.700,00
- Alih status aset ke Inspektorat berupa kendaraan dinas roda empat	Rp	480.957.916,66
- Alih status aset ke Bapenda berupa kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua	Rp	254.912.906,33
- Alih status aset ke BKAD berupa kendaraan dinas roda dua, alat penyimpan perlengkapan kantor, alat kantor lainnya, meubelair, alat pendingin, alat dapur, meja kerja pejabat, kursi kerja pejabat, kursi rapat pejabat)	Rp	1.669.643.056,64
- Alih status aset ke Badan Penghubung berupa kendaraan dinas beroda dua	Rp	28.548.800,00
- Setoran atas temuan BPK terhadap kelebihan pengadaan kursi sofa rumah jabatan Gubernur tahun 2019	Rp	522.851.454,55
- Reklas peralatan studio visual ke beban perjalanan dinas luar daerah	Rp	24.257.200,00

Uraian	31 Desember 2020	
- Reklas meubelair berupa karpet ke beban bahan habis pakai lainnya (BM tidak menambah aset)	Rp	36.500.000,00
- Reklas alat rumah tangga lainnya berupa karpet ke beban bahan habis pakai (BM tidak menambah aset)	Rp	89.802.000,00
- Reklas alat rumah tangga lainnya berupa gordena, vertical blind, vitrase, tali ke beban bahan habis pakai lainnya (BM tidak menambah aset)	Rp	588.873.300,00
- Reklas alat rumah tangga lainnya berupa bendera dan karpet ke beban bahan habis pakai lainnya (BM tidak menambah aset)	Rp	358.445.000,00
- Reklas alat dapur ke ekstracomptable (BM tahun berjalan bernilai dibawah kapitalisasi)	Rp	173.932.000,00
- Reklas alat rumah tangga lainnya ke ekstracomptable (BM tahun berjalan bernilai dibawah kapitalisasi)	Rp	194.063.600,00
- Reklas antar kode rekening dari alat rumah tangga lainnya ke alat dapur	Rp	5.586.400,00
- Reklas antar kode rekening dari alat kesehatan olahraga ke kendaraan tak bermotor berpenumpang (BM salah penganggaran)	Rp	43.395.000,00
- Reklas antar kode rekening dari peralatan studio visual ke alat pendingin (BM salah penganggaran)	Rp	149.864.000,00
- Reklas antar kode rekening dari alat ukur lainnya ke alat keamanan	Rp	158.642.000,00
- Reklas antar kode rekening dari alat kantor lainnya ke alat reproduksi	Rp	199.925.000,00
- Reklas antar kode rekening dari peralatan personal komputer ke alat reproduksi	Rp	148.500.000,00
Jumlah (c)	Rp	29.327.702.994,47
Kenaikan/ Penurunan (b-c)	Rp	4.437.113.566,67
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp	103.579.697.458,99

Keterangan:

(dalam rupiah)					
	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Saldo Awal	99.142.583.892,32	-	-	99.142.583.892,32
2.	Belanja Modal	-	8.803.779.420,00	-	107.946.363.312,32
3.	Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	-	10.319.599.272,00	-	118.265.962.584,32
4.	Penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108 tahun 2016	-	12.579.398.308,29	-	130.845.360.892,61
5.	Penyesuaian nilai saldo kendaraan bermotor angkutan barang sesuai Simda BMD (awalnya dianggarkan di BM kendaraan dinas bermotor perorangan)	-	147.840.000,00	-	130.993.200.892,61
6.	Alih status aset dari Biro Hukum berupa kendaraan dinas roda empat	-	268.598.944,00	-	131.261.799.836,61
7.	Alih status aset dari Inspektorat berupa kendaraan dinas roda empat	-	119.500.000,00	-	131.381.299.836,61
8.	Alih status aset dari Sekretariat DPRD berupa meubelair, alat pendingin dan alat rumah tangga lainnya	-	639.533.216,85	-	132.020.833.053,46
9.	reklas dari beban pemeliharaan aset tetap lainnya ke peralatan studio video dan film		180.655.000,00		132.201.488.053,46
10.	Reklas antar kode rekening dari alat kesehatan olahraga ke kendaraan tak bermotor berpenumpang	-	43.395.000,00	-	132.244.883.053,46
11.	Reklas antar kode rekening dari peralatan studio visual ke alat pendingin (BM salah penganggaran)	-	149.864.000,00	-	132.394.747.053,46
12.	Reklas antar kode rekening dari alat rumah tangga lainnya ke alat dapur	-	5.586.400,00	-	132.400.333.453,46
13.	Reklas antar kode rekening dari alat ukur lainnya ke alat keamanan	-	158.642.000,00	-	132.558.975.453,46
14.	Reklas antar kode rekening dari alat kantor lainnya ke alat reproduksi	-	199.925.000,00	-	132.758.900.453,46

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
15.	Reklas antar kode rekening dari peralatan personal komputer ke alat reproduksi	-	148.500.000,00	-	132.907.400.453,46
16.	Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	-	-	10.319.599.272,00	122.587.801.181,46
17.	Penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108 tahun 2016	-	-	12.548.963.988,29	110.038.837.193,17
18.	Penyesuaian nilai saldo kendaraan bermotor angkutan barang sesuai Simda BMD (awalnya dianggarkan di BM kendaraan dinas bermotor perorangan)	-	-	147.840.000,00	109.890.997.193,17
19.	Reklas ke aset lainnya (aset yang akan dihibahkan) kendaraan dinas roda empat ke Korem	-	-	491.362.400,00	109.399.634.793,17
20.	Reklas ke aset lainnya (aset yang akan dihibahkan) kendaraan roda 4 ke Pengadilan Tinggi	-	-	491.262.000,00	108.908.372.793,17
21.	Reklas ke aset lainnya (aset yang akan dihibahkan) berupa videotron ke Unpar	-	-	199.975.700,00	108.708.397.093,17
22.	Alih status aset ke Inspektorat berupa kendaraan dinas roda empat	-	-	480.957.916,66	108.227.439.176,51
23.	Alih status aset ke Bapenda berupa kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua	-	-	254.912.906,33	107.972.526.270,18
24.	Alih status aset ke BKAD berupa kendaraan dinas roda dua, alat penyimpan perlengkapan kantor, alat kantor lainnya, meubelair, alat pendingin, alat dapur, meja kerja pejabat, kursi kerja pejabat, kursi rapat pejabat)	-	-	1.669.643.056,64	106.302.883.213,54
25.	Alih status aset ke Badan Penghubung berupa kendaraan dinas beroda dua	-	-	28.548.800,00	106.274.334.413,54
26.	Setoran atas temuan BPK terhadap kelebihan pengadaan kursi sofa rumah jabatan Gubernur tahun 2019	-	-	522.851.454,55	105.751.482.958,99
27.	Reklas peralatan studio visual ke beban perjalanan dinas luar daerah	-	-	24.257.200,00	105.727.225.758,99
28.	Reklas meubelair berupa karpet ke beban bahan habis pakai lainnya (BM tidak menambah aset)	-	-	36.500.000,00	105.690.725.758,99
29.	Reklas alat rumah tangga lainnya berupa karpet ke beban bahan habis pakai (BM tidak menambah aset)	-	-	89.802.000,00	105.600.923.758,99
30.	Reklas alat rumah tangga lainnya berupa gordena, vertical blind, vitrase dan tali ke beban bahan habis pakai lainnya (BM tidak menambah aset)	-	-	588.873.300,00	105.012.050.458,99
31.	Reklas alat rumah tangga lainnya berupa bendera dan karpet ke beban bahan habis pakai lainnya (BM tidak menambah aset)	-	-	358.445.000,00	104.653.605.458,99
32.	Reklas alat dapur ke ekstrakomptable (BM tahun berjalan bernilai dibawah kapitalisasi)	-	-	173.932.000,00	104.479.673.458,99
33.	Reklas alat rumah tangga lainnya ke ekstrakomptable (BM tahun berjalan bernilai dibawah kapitalisasi)	-	-	194.063.600,00	104.285.609.858,99
34.	Reklas antar kode rekening dari alat rumah tangga lainnya ke alat dapur	-	-	5.586.400,00	104.280.023.458,99
35.	Reklas antar kode rekening dari alat kesehatan olahraga ke kendaraan tak bermotor berpenumpang (BM salah penganggaran)	-	-	43.395.000,00	104.236.628.458,99
36.	Reklas antar kode rekening dari peralatan studio visual ke alat pendingin (BM salah penganggaran)	-	-	149.864.000,00	104.086.764.458,99
37.	Reklas antar kode rekening dari alat ukur lainnya ke alat keamanan	-	-	158.642.000,00	103.928.122.458,99
38.	Reklas antar kode rekening dari alat kantor lainnya ke alat reproduksi	-	-	199.925.000,00	103.728.197.458,99
39.	Reklas antar kode rekening dari peralatan personal komputer ke alat reproduksi	-	-	148.500.000,00	103.579.697.458,99
	Jumlah	99.142.583.892,32	33.764.816.561,14	29.327.702.994,47	103.579.697.458,99

Rincian saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.522.042.274,00	2.730.563.045,00	1.611.422.316,66	21.641.183.002,34
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	13.742.396.126,00	388.098.944,00	3.669.117.201,33	10.461.377.868,67
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.303.779.114,00	2.506.266.246,00	-	4.810.045.360,00
4	Kendaraan Bermotor Khusus	2.129.112.542,00	-	1.464.952.696,00	664.159.846,00
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.601.478.198,00	-	141.301.037,00	2.460.177.161,00
6	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	241.366.500,00	-	241.366.500,00	-
7	Kendaraan Bermotor Lainnya	-	241.366.500,00	-	241.366.500,00
8	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
9	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	96.000.000,00	43.395.000,00	-	139.395.000,00
10	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	43.138.800,00	-	-	43.138.800,00
11	Perkakas Bengkel Kayu	-	44.850.000,00	-	44.850.000,00
12	Alat Ukur Lainnya	-	178.992.000,00	158.642.000,00	20.350.000,00
13	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	142.150.000,00	-	44.850.000,00	97.300.000,00
14	Alat Pemeliharaan Tanaman	168.825.848,00	-	-	168.825.848,00
15	Mesin Tik	3.350.000,00	-	-	3.350.000,00
16	Mesin Hitung/Jumlah	12.900.000,00	-	-	12.900.000,00
17	Alat Reproduksi/Pengganda	599.281.533,00	348.425.000,00	-	947.706.533,00
18	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.747.903.577,04	52.801.000,00	380.333.478,32	1.420.371.098,72
19	Alat Kantor Lainnya	1.653.134.728,00	948.166.528,00	228.875.000,00	2.372.426.256,00
20	Meubelair	10.127.556.932,00	4.459.788.804,29	1.778.589.668,52	12.808.756.067,77
21	Alat Pengukur Waktu	36.885.000,00	-	5.000.000,00	31.885.000,00
22	Alat Pembersih	544.582.000,00	470.935.400,00	-	1.015.517.400,00
23	Alat Pendingin	6.890.382.179,78	464.127.216,85	422.433.148,56	6.932.076.248,07
24	Alat Dapur	974.872.490,00	288.926.900,00	203.781.000,00	1.060.018.390,00
25	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.271.058.717,70	6.668.520.354,00	1.708.555.719,97	13.231.023.351,73
26	Alat Pemadam Kebakaran	384.480.800,00	-	69.700.000,00	314.780.800,00
27	Komputer Unit/Jaringan	249.202.200,00	419.350.000,00	-	668.552.200,00
28	Personal Komputer	2.555.317.166,00	357.849.000,00	391.250.000,00	2.521.916.166,00
29	Peralatan Komputer Mainframe	-	-	-	-
30	Peralatan Mini Komputer	129.397.501,00	238.383.750,00	361.431.251,00	6.350.000,00
31	Peralatan Personal Komputer	1.019.407.575,33	601.231.251,00	393.398.750,00	1.227.240.076,33
32	Peralatan Jaringan	332.012.903,00	-	244.737.528,00	87.275.375,00
33	Meja Kerja Pejabat	2.059.398.056,76	150.439.800,00	734.479.281,68	1.475.358.575,08
34	Meja Rapat Pejabat	290.590.020,00	508.763.000,00	-	799.353.020,00
35	Kursi Kerja Pejabat	715.029.652,41	228.051.440,00	199.465.952,43	743.615.139,98
36	Kursi Rapat Pejabat	1.009.793.284,00	-	155.986.830,00	853.806.454,00
37	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
38	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.618.828.266,00	-	2.002.188.373,00	616.639.893,00
39	Lemari dan Arsip Pejabat	1.240.412.016,30	-	194.508.800,00	1.045.903.216,30
40	Peralatan Studio Visual	5.536.184.192,00	2.746.884.770,00	8.283.068.962,00	-
41	Peralatan Studio Video dan Film	5.754.378.400,00	1.535.360.964,00	352.141.100,00	6.937.598.264,00
42	Peralatan Studio Video dan Film A	-	27.100.000,00	27.100.000,00	-
43	Peralatan Cetak	65.020.300,00	-	-	65.020.300,00
44	Peralatan Studio Audio	-	2.988.759.528,00	-	2.988.759.528,00
45	Alat Komunikasi Telephone	600.743.500,00	1.732.003.400,00	1.860.437.500,00	472.309.400,00
46	Alat Komunikasi Radio SSB	13.725.000,00	154.818.500,00	-	168.543.500,00
47	Alat Komunikasi Radio UHF	40.500.000,00	10.000.000,00	50.500.000,00	-
48	Alat Komunikasi Sosial	-	351.271.900,00	351.271.900,00	-
49	Peralatan Antena UHF	125.460.000,00	-	95.460.000,00	30.000.000,00
50	Humidity Control	-	95.460.000,00	-	95.460.000,00
51	Alat Kesehatan Olahraga	-	43.395.000,00	43.395.000,00	-
52	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	77.150.000,00	-	-	77.150.000,00
53	Alat Keamanan	64.400.000,00	1.655.531.500,00	-	1.719.931.500,00
54	Alat Bantu Keamanan	1.403.456.500,00	93.433.000,00	1.496.889.500,00	-
55	Rambu Tidak Bersuar	-	30.434.320,00	-	30.434.320,00
Jumlah		99.142.583.892,32	33.764.816.561,14	29.327.702.994,47	103.579.697.458,99

c) Gedung dan Bangunan

Rp131.727.344.994,67

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp131.727.344.994,67 sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp130.970.500.374,67. Mutasi tambah gedung dan bangunan sebesar Rp12.167.069.733,99 berasal dari belanja modal tahun 2019 sebesar Rp447.432.500,00, penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD sebesar Rp8.629.659.133,99, Alih status aset dari Sekretariat DPRD berupa Rumah Negara Golongan I sebesar Rp3.089.978.100. Mutasi kurang gedung dan bangunan sebesar Rp11.413.225.113,99 berasal dari penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD sebesar Rp8.629.659.133,99, penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108 tahun 2016 sebesar Rp30.434.320,00, setoran atas temuan BPK tahun 2019 yaitu honorarium pengelola teknis dan pengelola kegiatan (honorarium yang melekat di belanja modal)sebesar Rp227.007.000,00, alih status aset ke Sekretariat DPRD berupa Rumah Negara Golongan I sebesar Rp2.078.692.160,00, reklas ke aset tidak berwujud (perencanaan) sebesar Rp251.432.500,00, reklas ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan (BM Tidak menambah aset) sebesar Rp196.000.000,00. Mutasi gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp 130.970.500.374,67
Penambahan:	
- Belanja Modal	Rp 447.432.500,00
- Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	Rp 8.629.659.133,99
- Alih status aset dari Sekretariat DPRD berupa Rumah Negara Golongan I	Rp 3.089.978.100,00
Jumlah (b)	Rp 12.167.069.733,99
Pengurangan:	
- Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	Rp 8.629.659.133,99
- Penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108 tahun 2016	Rp 30.434.320,00
- Setoran pengembalian honorarium pengelola teknis dan pengelola kegiatan kegiatan pembangunan gudang Biro Umum atas temuan BPK tahun 2019 (honorarium yang melekat di belanja modal)	Rp 14.846.000,00
- Setoran pengembalian honorarium pengelola teknis dan pengelola kegiatan kegiatan pembangunan gedung tempat ibadah atas temuan BPK tahun 2019 (honorarium yang melekat di belanja modal)	Rp 100.686.000,00
- Setoran pengembalian honorarium pengelola teknis dan pengelola kegiatan kegiatan pembangunan ruang kerja Gubernur tahun 2019 atas temuan BPK tahun 2019 (honorarium yang melekat di belanja modal)	Rp 111.475.000,00

Uraian	31 Desember 2020	
- Alih status aset ke Sekretariat DPRD berupa Rumah Negara Golongan I	Rp	2.078.692.160,00
- Reklas ke ATB dari bangunan gedung kantor (perencanaan pembuatan palang nama Kantor Gubernur)	Rp	55.495.000,00
- Reklas ke ATB dari bangunan gedung garasi/pool (perencanaan pembangunan tempat parkir, gedung genset dan gedung bank pembantu)	Rp	98.004.500,00
- Reklas ke ATB dari mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan (perencanaan penataan taman dan halaman tempat parkir)	Rp	97.933.000,00
- Reklas bangunan gedung kantor (perbaikan lantai ruang kerja Gubernur) ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan (BM Tidak menambah aset)	Rp	196.000.000,00
Jumlah (c)	Rp	11.413.225.113,99
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	753.844.620,00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp	131.724.344.994,67

Keterangan:

(dalam rupiah)					
	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Saldo Awal	130.970.500.374,67	-	-	130.970.500.374,67
2.	Belanja Modal	-	447.432.500,00	-	131.417.932.874,67
3.	Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	-	8.629.659.133,99	-	140.047.592.008,66
4.	Alih status aset dari Sekretariat DPRD berupa Rumah Negara Golongan I	-	3.089.978.100,00	-	143.137.570.108,66
5.	Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	-	-	8.629.659.133,99	134.507.910.974,67
6.	Penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108 tahun 2016	-	-	30.434.320,00	134.477.476.654,67
7.	Setoran pengembalian honorarium pengelola teknis dan pengelola kegiatan pembangunan gudang Biro Umum atas temuan BPK tahun 2019 (honorarium yang melekat di belanja modal)	-	-	14.846.000,00	134.462.630.654,67
8.	Setoran pengembalian honorarium pengelola teknis dan pengelola kegiatan pembangunan gedung tempat ibadah atas temuan BPK tahun 2019 (honorarium yang melekat di belanja modal)	-	-	100.686.000,00	134.361.944.654,67
9.	Setoran pengembalian honorarium pengelola teknis dan pengelola kegiatan pembangunan ruang kerja Gubernur tahun 2019 atas temuan BPK tahun 2019 (honorarium yang melekat di belanja modal)	-	-	111.475.000,00	134.250.469.654,67
10.	Alih status aset ke Sekretariat DPRD berupa Rumah Negara Golongan I	-	-	2.078.692.160,00	132.171.777.494,67
11.	Reklas ke ATB dari bangunan gedung kantor (perencanaan pembuatan palang nama Kantor Gubernur)	-	-	55.495.000,00	132.116.282.494,67
12.	Reklas ke ATB dari bangunan gedung garasi/pool (perencanaan pembangunan tempat parkir, gedung genset dan gedung bank pembantu)	-	-	98.004.500,00	132.018.277.994,67
13.	Reklas ke ATB dari mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan (perencanaan penataan taman dan halaman tempat parkir)	-	-	97.933.000,00	131.920.344.994,67
14.	Reklas bangunan gedung kantor (perbaikan lantai ruang kerja Gubernur) ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan (BM Tidak menambah aset)	-	-	196.000.000,00	131.724.344.994,67
	Jumlah	130.970.500.374,67	12.167.069.733,99	11.413.225.113,99	131.724.344.994,67

Rincian saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Bangunan Gedung Kantor	92.464.315.507,16	3.773.605.720,99	362.970.000,00	95.874.951.228,15
2	Bangunan Gudang	2.997.110.040,00	871.854.900,00	14.846.000,00	3.854.118.940,00
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.180.155.933,00	-	100.686.000,00	6.079.469.933,00
4	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-
5	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	173.875.000,00	-	99.062.500,00	74.812.500,00
6	Bangunan Gedung Garasi/Pool	684.727.250,00	1.485.490.833,00	98.004.500,00	2.072.213.583,00
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.615.700.279,00	-	7.341.932.454,00	2.273.767.825,00
8	Rumah Negara Golongan I	15.738.924.569,51	3.089.978.100,00	3.219.056.339,99	15.609.846.329,52
9	Rumah Negara Golongan II	3.036.957.476,00	2.848.207.180,00	-	5.885.164.656,00
10	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	-	97.933.000,00	97.933.000,00	-
11	Rambu Tidak Bersuar	78.734.320,00	-	78.734.320,00	-
Jumlah		130.970.500.374,67	12.167.069.733,99	11.413.225.113,99	131.724.344.994,67

d) Jalan Irigasi dan Jaringan
Rp12.132.645.785,90

Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.132.645.785,90, sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp12.132.645.785,90. Tidak ada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di tahun 2020. Reklas antar kode rekening sebesar Rp11.560.473,07. Reklas tersebut karena penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108/2016 yaitu reklas dari bangunan air tawar ke bangunan air bersih/air baku lainnya. Mutasi jalan irigasi dan jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp 12.132.645.785,90
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp 11.560.473,07
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp 11.560.473,07
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp 11.560.473,07
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp 11.560.473,07
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp 12.132.645.785,90

Keterangan:

(dalam rupiah)

	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Saldo Awal	12.132.645.785,90	-	-	12.132.645.785,90
2.	Belanja Modal	-	-	-	12.132.645.785,90
3.	Penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108/2016	-	11.560.473,07	-	12.144.206.258,97
4.	Penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri 108/2016	-	-	11.560.473,07	12.132.645.785,90
	Jumlah	12.132.645.785,90	11.560.473,07	11.560.473,07	12.132.645.785,90

Rincian saldo jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1.	Jalan Propinsi	3.719.932.100,00	-	-	3.719.932.100,00
2.	Jalan Khusus	3.718.958.617,50	-	-	3.718.958.617,50
3.	Bangunan Pembawa Air Bersih	79.689.836,40	-	-	79.689.836,40
4.	Bangunan Pembawa Air Kotor	2.003.436.250,00	-	-	2.003.436.250,00
5.	Bangunan Pembuangan Air Kotor	149.450.000,00	-	-	149.450.000,00
6.	Bangunan Air Tawar	11.560.473,07	-	11.560.473,07	-
7.	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	125.178.988,93	11.560.473,07	-	136.739.462,00
8.	Instalasi Air Kotor	18.901.663,00	-	-	18.901.663,00
9.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	111.821.500,00	-	-	111.821.500,00
10.	Instalasi Gardu Listrik Induk	130.653.587,00	-	-	130.653.587,00
11.	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	683.195.570,00	-	-	683.195.570,00
12.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	128.103.500,00	-	-	128.103.500,00
13.	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	34.398.800,00	-	-	34.398.800,00
14.	Jaringan Pembawa	54.729.934,00	-	-	54.729.934,00
15.	Jaringan Sambungan Ke Rumah	323.350.000,00	-	-	323.350.000,00
16.	Jaringan Distribusi	786.284.862,00	-	-	786.284.862,00
17.	Jaringan Telepon Di Atas Tanah	27.900.104,00	-	-	27.900.104,00
18.	Jaringan Telepon Di Bawah Tanah	25.100.000,00	-	-	25.100.000,00
	Jumlah	12.132.645.785,90	11.560.473,07	11.560.473,07	12.132.645.785,90

e) Aset Tetap Lainnya Rp1.425.474.400,00

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.425.474.400,00, sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp1.425.474.400,00. Mutasi tambah untuk aset tetap lainnya sebesar Rp1.075.197.000,00, berasal dari belanja modal tahun 2020 sebesar Rp99.088.000,00, penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 sebesar Rp192.750.000,00. Sedangkan mutasi kurang untuk aset tetap lainnya sebesar Rp1.075.197.000,00, berasal dari penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD sebesar Rp783.359.000,00, penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 sebesar Rp192.750.000,00 dan reklas dari tanaman hias ke beban bahan habis pakai lainnya (belanja modal tidak menambah aset) sebesar Rp99.088.000,00. Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp 1.425.474.400,00
Penambahan:	
- Belanja Modal	Rp 99.088.000,00
- Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	Rp 783.359.000,00
- penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai permendagri 108/2016	Rp 192.750.000,00
Jumlah (b)	Rp 1.075.197.000,00
Pengurangan:	
- Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	Rp 783.359.000,00
- penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai permendagri 108/2016	Rp 192.750.000,00
- Reklas tanaman hias ke beban bahan habis pakai lainnya (BM tidak menambah aset)	Rp 99.088.000,00
Jumlah (c)	Rp 1.075.197.000,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp 1.425.474.400,00

Keterangan:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Saldo Awal	1.425.474.400,00	-	-	1.425.474.400,00
2.	Belanja Modal	-	99.088.000,00	-	1.524.562.400,00
3.	Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	-	783.359.000,00	-	2.307.921.400,00
4.	penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai permendagri 108/2016	-	192.750.000,00	-	2.500.671.400,00
5.	Penyesuaian saldo awal per rincian objek sesuai simda BMD	-	-	783.359.000,00	1.717.312.400,00
6.	penyesuaian nilai per rincian objek (kode barang) sesuai permendagri 108/2016	-	-	192.750.000,00	1.524.562.400,00
7.	Reklas tanaman hias ke beban bahan habis pakai lainnya (BM tidak menambah aset)	-	-	99.088.000,00	1.425.474.400,00
Jumlah		1.425.474.400,00	1.075.197.000,00	1.075.197.000,00	1.425.474.400,00

Rincian saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Buku Umum	783.359.000,00	-	783.359.000,00	-
2	Terbitan Berkala	11.280.000,00	-	-	11.280.000,00
3	Terbitan Buku Laporan	-	783.359.000,00	-	783.359.000,00
4	Barang Bercorak Kebudayaan- Pahatan	78.800.000,00	-	-	78.800.000,00
5	Barang Bercorak Kebudayaan- Lukisan	54.710.000,00	-	-	54.710.000,00
6	Barang Bercorak Kebudayaan- Maket dan Foto Dokumen	23.600.000,00	-	-	23.600.000,00
7	Barang Bercorak Kebudayaan- Barang Kerajinan	200.000,00	-	-	200.000,00
8	Tanaman Perkebunan	192.750.000,00	-	192.750.000,00	-
9	Tanaman Holtikultura	280.775.400,00	-	-	280.775.400,00
10	Tanaman Hias	-	99.088.000,00	99.088.000,00	-
11	Tanama Keras	-	192.750.000,00	-	192.750.000,00
Jumlah		1.425.474.400,00	1.075.197.000,00	1.075.197.000,00	1.425.474.400,00

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp44.581.214.856,42

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp44.581.214.856,42,00, sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp44.656.561.756,00. Mutasi tambah untuk KDP sebesar Rp0,00. Sedangkan mutasi kurang untuk KDP sebesar Rp75.346.899,58, yaitu setoran atas temuan BPK pembayaran kelebihan pengadaan bangunan tempat pertemuan Aula Jayang Tingang tahun 2019 sebesar Rp62.346.899,58 dan setoran atas temuan BPK pengembalian kemahalan harga pekerjaan pemasangan plafon bangunan tempat pertemuan Aula Jayang Tingang tahun 2019 sebesar Rp13.000.000,00. Rincian KDP dapat dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Desember 2020 (a)	Rp 44.656.561.756,00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Setoran atas temuan BPK pembayaran kelebihan pengadaan bangunan tempat pertemuan tahun 2019	Rp 62.346.899,58
- Setoran atas temuan BPK pengembalian kemahalan harga pekerjaan pemasangan plafon	Rp 13.000.000,00
Jumlah (c)	Rp 75.346.899,58
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp (75.346.899,58)
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp 44.581.214.856,42

Keterangan:

(dalam rupiah)					
	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	44.656.561.756,00	-	-	44.656.561.756,00
2	Setoran atas temuan BPK pembayaran kelebihan pengadaan bangunan tempat pertemuan Aula Jayang Tingang tahun 2019	-	-	62.346.899,58	44.594.214.856,42
3	Setoran atas temuan BPK pengembalian kemahalan harga pekerjaan pemasangan plafon bangunan tempat pertemuan Aula Jayang Tingang tahun 2019	-	-	13.000.000,00	44.581.214.856,42
	Jumlah	44.656.561.756,00	-	75.346.899,58	44.581.214.856,42

Mutasi konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	KDP Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-
2	KDP Bangunan Tempat Ibadah	-	-	-	-
3	KDP Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	44.656.561.756,00	-	75.346.899,58	44.581.214.856,42
4	KDP Bangunan Gedung Tempat Keria Lainnya	-	-	-	-
5	KDP Rumah Negara Golongan I	-	-	-	-
	Jumlah	44.656.561.756,00	-	75.346.899,58	44.581.214.856,42

g) Akumulasi Penyusutan
Rp(101.305.975.476,96)

Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(101.305.975.476,96), sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp(85.625.897.644,86). Mutasi akumulasi penyusutan berasal dari beban penyusutan tahun 2020 (kurang dan lebih catat), koreksi saldo awal akumulasi penyusutan sesuai aplikasi Simda BMD, penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016, hibah dan mutasi aset. Mutasi akumulasi penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp (85.625.897.644,86)
Penambahan:	
- Koreksi Karena Selisih Aplikasi	Rp 23,00
- Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016	Rp 4.344.686.572,33
- Penyesuaian saldo akhir akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016	Rp 8.020.885,00
- Beban Penyusutan Tahun 2020	Rp 15.636.652.129,32
- Akumulasi penyusutan yang dialih statuskan dari Biro Hukum	Rp 198.251.603,00
- Akumulasi penyusutan yang dialih statuskan dari Setwan	Rp 3.273.102.843,85
- Akumulasi penyusutan yang dialih statuskan dari Inspektorat	Rp 119.500.000,00
- Beban Penyusutan (kurang catat) Tahun 2020	Rp 588.728.517,00
Jumlah (b)	Rp 24.168.942.573,50
Pengurangan:	
- Koreksi Karena Selisih Aplikasi	Rp 38,00
- Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai data aplikasi Simda BMD	Rp 582.250,00
- Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016	Rp 4.175.719.229,33
- Reklas akm. peny alat angkutan darat bermotor ke akm. peny. aset yang akan dihibahkan (kendaraan yang akan dihibahkan ke korem)	Rp 157.937.913,00
- Reklas akm. peny alat angkutan darat bermotor ke akm. peny. aset yang akan dihibahkan (kendaraan yang akan dihibahkan ke pengadilan tinggi)	Rp 157.905.643,00

Uraian	31 Desember 2020
- Reklas akm. peny alat studio ke akm. peny. aset yang akan dihibahkan (videotron yang akan dihibahkan ke unpar)	Rp 43.328.068,00
- Alih status kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua ke Bapenda prov. Kalteng)	Rp 254.912.906,33
- Alih status alat angkutan darat bermotor ke Inspektorat	Rp 234.753.269,00
- Alih status kendaraan dinas roda dua ke Badan Penghubung	Rp 28.548.800,00
- Alih status ke BKAD	Rp 1.274.145.670,74
- Alih status bangunan gedung tempat tinggal ke Setwan	Rp 1.438.891.552,00
- Beban Penyusutan (lebih catat) Tahun 2020	Rp 722.139.402,00
Jumlah (c)	Rp 8.488.864.741,40
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 32.657.807.314,90
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp (101.305.975.476,96)

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(52.510.156.892,36)	17.923.945.153,50	6.985.803.221,40	(63.448.298.824,46)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(27.721.003.670,00)	5.490.036.470,00	1.449.514.481,00	(31.761.525.659,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(5.394.737.082,50)	754.960.950,00	53.547.039,00	(6.096.150.993,50)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(85.625.897.644,86)	24.168.942.573,50	8.488.864.741,40	(101.305.975.476,96)

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp(63.448.298.824,46)
Saldo akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 1 Januari 2020 adalah Rp(52.510.156.892,36). Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berasal dari beban penyusutan peralatan dan mesin semester pertama dan kedua tahun 2020 sebesar Rp12.082.327.232,32, kurang catat beban penyusutan sebesar Rp588.728.517,00, penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016 sebesar Rp4.293.370.359,33, Penyesuaian saldo akhir akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016 sebesar Rp8.020.885,00. Alih status aset antar SKPD sebesar Rp951.498.152,85, yaitu alih status kendaraan bermotor penumpang dari Sekretariat Dewan sebesar Rp198.251.603,00, alih status meubelair dari Sekretariat Dewan sebesar Rp187.000.000,00, alih status alat rumah tangga lainnya (home use) dari Sekretariat Dewan sebesar Rp325.500.000,00, alih status alat pendingin dari Sekretariat Dewan sebesar Rp121.246.549,85, alih status kendaraan

bermotor penumpang dari Inspektorat sebesar Rp119.500.000,00, dan koreksi karena selisih pembulatan aplikasi sebesar Rp7,00. Mutasi kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp6.985.803.221,40 yaitu penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016 sebesar Rp4.114.208.251,33, penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai data aplikasi Simda BMD sebesar Rp582.250,00. Reklas ke akumulasi penyusutan aset yang akan dihibahkan sebesar Rp359.171.664,00, yaitu akumulasi penyusutan aset yang dihibahkan ke Korem sebesar Rp157.937.913,00, akumulasi penyusutan aset yang dihibahkan ke Pengadilan tinggi sebesar Rp157.905.643,00, akumulasi penyusutan aset yang dihibahkan ke Universitas Palangka Raya sebesar Rp43.328.068,00. Akumulasi Penyusutan alih status aset antar SKPD sebesar Rp1.792.360.646,07, yaitu alih status kendaraan bermotor penumpang ke Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp254.912.906,33, alih status kendaraan dinas bermotor perorangan ke Inspektorat sebesar Rp234.753.269,00, alih status kendaraan beroda dua ke Badan Penghubung sebesar Rp28.548.800,00. Alih status Aset ke BKAD sebesar Rp1.274.145.670,74, koreksi karena selisih pembulatan aplikasi sebesar Rp32,00 dan beban penyusutan (lebih catat) tahun 2020 sebesar Rp719.480.418,00. Saldo akhir akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp(63.448.298.824,46). Mutasi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp (52.510.156.892,36)
Penambahan:	
- Koreksi akumulasi penyusutan karena selisih pembulatan aplikasi	Rp 7,00
- Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016	Rp 4.293.370.359,33
- Penyesuaian saldo akhir akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016	Rp 8.020.885,00
- Alih status kendaraan bermotor penumpang dari Biro Hukum	Rp 198.251.603,00
- Alih status meubelair lainnya dari Setwan	Rp 187.000.000,00
- Alih status alat rumah tangga lainnya (home use) dari Setwan	Rp 325.500.000,00
- Alih status alat pendingin dari Setwan	Rp 121.246.549,85
- Alih status kendaraan bermotor penumpang dari Inspektorat	Rp 119.500.000,00
- Beban Penyusutan Tahun 2020	Rp 12.082.327.232,32
- Beban Penyusutan (kurang catat) Tahun 2020	Rp 588.728.517,00
Jumlah (b)	Rp 17.923.945.153,50

Uraian	31 Desember 2020
Pengurangan:	
- Koreksi akumulasi penyusutan karena selisih pembulatan aplikasi	Rp 32,00
- Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016	Rp 4.114.208.251,33
- Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai data aplikasi Simda BMD	Rp 582.250,00
- Reklas akm. peny alat angkutan darat bermotor ke akm. peny. aset yang akan dihibahkan (kendaraan yang akan dihibahkan ke korem)	Rp 157.937.913,00
- Reklas akm. peny alat angkutan darat bermotor ke akm. peny. aset yang akan dihibahkan (kendaraan yang akan dihibahkan ke pengadilan tinggi)	Rp 157.905.643,00
- Reklas akm. peny alat studio ke akm. peny. aset yang akan dihibahkan (videotron yang akan dihibahkan ke unpar)	Rp 43.328.068,00
- Alih status kendaraan bermotor penumpang dan kendaraan bermotor beroda dua ke Bapenda prov.	Rp 254.912.906,33
- Alih status kendaraan dinas bermotor perorangan ke	Rp 234.753.269,00
- Alih status kendaraan bermotor beroda dua ke Badan Penghubung	Rp 28.548.800,00
- Alih status kendaraan bermotor beroda dua ke BKAD	Rp 39.882.808,00
- Alih status alat penyimpan perlengkapan kantor ke BKAD	Rp 315.440.738,32
- Alih status alat kantor lainnya ke BKAD	Rp 25.572.500,00
- Alih status alat dapur ke BKAD	Rp 23.674.881,00
- Alih status meubelair ke BKAD	Rp 171.638.414,00
- Alih status alat pendingin ke BKAD	Rp 326.964.636,00
- Alih status meja kerja pejabat ke BKAD	Rp 188.420.029,39
- Alih status kursi kerja pejabat ke BKAD	Rp 157.304.164,03
- Alih status kursi rapat pejabat ke BKAD	Rp 25.247.500,00
- Beban Penyusutan (lebih catat) Tahun 2020	Rp 719.480.418,00
Jumlah (c)	Rp 6.985.803.221,40
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 10.938.141.932,10
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp (63.448.298.824,46)

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(21.069.140.795,33)	4.866.482.356,00	873.941.371,33	(25.061.681.780,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	(55.000.000,00)	45.808.122,00	-	(100.808.122,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(8.699.492,00)	22.627.629,00	-	(31.327.121,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	-	1.695.834,00	-	(1.695.834,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	(131.871.874,00)	271.732.098,00	137.478.124,00	(266.125.848,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	(168.825.848,00)	-	168.825.848,00	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(2.949.694.781,04)	480.716.328,00	341.013.238,32	(3.089.397.870,72)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(16.618.836.984,48)	5.367.620.906,17	522.277.931,00	(21.464.179.959,65)
9	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.398.496.907,33)	308.154.014,00	2.706.650.921,33	-
10	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(4.022.860.887,18)	613.135.328,00	817.529.095,42	(3.818.467.119,76)

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
11	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(3.974.076.181,00)	1.466.649.032,00	200.740.793,00	(5.239.984.420,00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(486.308.500,00)	231.891.236,00	544.652.828,00	(173.546.908,00)
13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(30.795.501,00)	9.546.000,00	-	(40.341.501,00)
14	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	(34.074.583,00)	7.715.000,00	-	(41.789.583,00)
15	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	(106.458.658,00)	1.085.616.317,00	106.458.658,00	(1.085.616.317,00)
16	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	(455.015.900,00)	111.218.513,00	566.234.413,00	-
17	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	-	12.368.645,00	-	(12.368.645,00)
18	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	-	2.062.657.081,00	-	(2.062.657.081,00)
18	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	-	958.310.714,33	-	(958.310.714,33)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(52.510.156.892,36)	17.923.945.153,50	6.985.803.221,40	(63.448.298.824,46)

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Rp(31.761.525.659,00)

Saldo akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 1 Januari 2020 adalah Rp(27.721.003.670,00). Penambahan akumulasi gedung dan bangunan berasal dari beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp2.850.680.173,00, akumulasi penyusutan alih status aset dari Sekretariat Dewan sebesar Rp2.639.356.294,00 dan koreksi karena selisih pembulatan aplikasi sebesar Rp3. Mutasi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan berasal dari selisih pembulatan aplikasi sebesar Rp3,00, akumulasi penyusutan alih status aset ke Setwan sebesar Rp1.438.891.552,00, Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016 sebesar Rp10.194.765,00 dan Beban Penyusutan (lebih catat) Tahun 2020 sebesar Rp428.161,00. Saldo akhir akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp(31.761.525.659,00). Mutasi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp (27.721.003.670,00)
Penambahan:	
- Koreksi akumulasi penyusutan karena selisih pembulatan aplikasi	Rp 3,00
- Beban Penyusutan Tahun 2020	Rp 2.850.680.173,00
- akumulasi penyusutan aset yang dialih statuskan dari Setwan	Rp 2.639.356.294,00
Jumlah (b)	Rp 5.490.036.470,00
Pengurangan:	
- Koreksi akumulasi penyusutan karena selisih pembulatan aplikasi	Rp 3,00
- akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat tinggal yang dialih statuskan ke Setwan	Rp 1.438.891.552,00
- Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016	Rp 10.194.765,00
- Beban Penyusutan (lebih catat) Tahun 2020	Rp 428.161,00
Jumlah (c)	Rp 1.449.514.481,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 4.040.521.989,00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp (31.761.525.659,00)

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(17.418.004.373,00)	2.056.124.563,00	428.161,00	(19.473.700.775,00)
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(10.294.978.412,00)	3.431.738.027,00	1.438.891.555,00	(12.287.824.884,00)
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambutan	(8.020.885,00)	2.173.880,00	10.194.765,00	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(27.721.003.670,00)	5.490.036.470,00	1.449.514.481,00	(31.761.525.659,00)

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp(6.096.150.993,50)

Saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan per 1 Januari 2020 adalah Rp(5.394.737.082,50). Penambahan akumulasi jalan, irigasi, dan jaringan berasal dari Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016 sebesar Rp51.316.213,00, beban penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan semester pertama tahun 2020 sebesar Rp703.644.724,00 dan koreksi karena selisih aplikasi Rp13,00. Mutasi kurang akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan berasal dari selisih pembulatan aplikasi sebesar Rp3,00, Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016 sebesar Rp51.316.213,00, dan Beban penyusutan Tahun 2020 (lebih catat) sebesar Rp2.230.823,00. Saldo akhir akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar

Rp(6.096.150.993,5). Mutasi akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp	(5.394.737.082,50)
Penambahan:		
- Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016	Rp	51.316.213,00
- Beban Penyusutan Tahun 2020	Rp	703.644.724,00
- Koreksi akumulasi penyusutan karena selisih pembulatan aplikasi	Rp	13,00
Jumlah (b)	Rp	754.960.950,00
Pengurangan:		
- Koreksi akumulasi penyusutan karena selisih pembulatan aplikasi	Rp	3,00
- Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai Permendagri No 108/2016	Rp	51.316.213,00
- Beban penyusutan Tahun 2020 (lebih catat)	Rp	2.230.823,00
Jumlah (c)	Rp	53.547.039,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	701.413.911,00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp	(6.096.150.993,50)

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Akumulasi Penyusutan Jalan	(4.495.257.765,50)	577.533.710,00	-	(5.072.791.475,50)
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	(23.174.834,00)	5.484.473,00	-	(28.659.307,00)
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	(277.332.211,00)	53.822.156,00	1,00	(331.154.366,00)
4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(3.203.215,00)	144.506,00	3.347.721,00	-
5	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	(48.112.999,00)	2.086.317,00	50.199.316,00	-
6	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	(6.353.060,00)	630.058,00	-	(6.983.118,00)
7	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	(19.801.724,00)	2.795.540,00	-	(22.597.264,00)
8	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(239.213.964,00)	23.548.824,00	-	(262.762.788,00)
9	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman	(15.622.788,00)	1.719.940,00	-	(17.342.728,00)
10	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	(130.608.533,00)	12.602.665,00	1,00	(143.211.197,00)
11	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(109.228.603,00)	19.657.124,00	-	(128.885.727,00)
12	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(26.827.386,00)	2.650.006,00	-	(29.477.392,00)
13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	52.285.631,00	-	(52.285.631,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(5.394.737.082,50)	754.960.950,00	53.547.039,00	(6.096.150.993,50)

3. Aset Lainnya

Rp8.097.287.089,70

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Termasuk dalam kategori aset lainnya adalah:

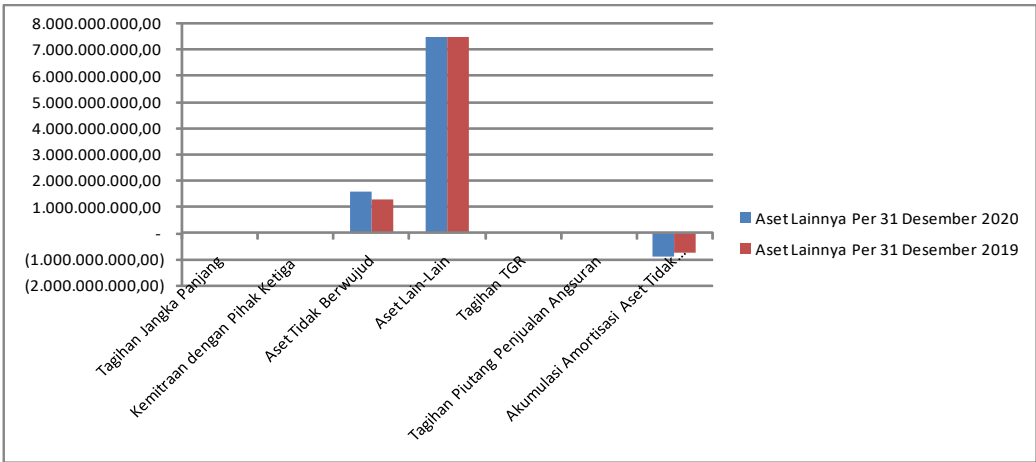
- a) Tagihan Jangka Panjang
- b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- c) Aset Tidak Berwujud
- d) Aset Lain-Lain
- e) Tagihan TGR
- f) Tagihan Piutang Penjualan Ansuran
- g) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Lainnya yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.097.287.089,70, sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp7.980.149.339,70. Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.14.
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020

Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
		Tambah	Kurang	
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	1.291.594.200,00	251.432.500,00	-	1.543.026.700,00
Aset Lain-Lain	7.464.794.839,70	1.541.771.724,00	1.541.771.724,00	7.464.794.839,70
Tagihan TGR	-	-	-	-
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(776.239.700,00)	-	134.294.750,00	(910.534.450,00)
Jumlah	7.980.149.339,70	1.793.204.224,00	1.676.066.474,00	8.097.287.089,70

(dalam rupiah)



- a) **Tagihan Jangka Panjang** **Rp0,00**
Saldo tagihan jangka panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rp0,00
- b) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** **Rp0,00**
Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rp0,00

c) Aset Tidak Berwujud

Rp1.543.026.700,00

Aset tidak berwujud yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.543.026.700,00, sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp1.291.594.200. Mutasi tambah aset tidak berwujud sebesar Rp251.432.500,00, merupakan reklas dari kegiatan perencanaan gedung dan bangunan, yaitu perencanaan pembuatan palang nama Kantor Gubernur sebesar Rp55.495.000,00, perencanaan pembangunan tempat parkir, gedung genset dan gedung bank pembantu sebesar Rp96.004.500,00, perencanaan penataan taman dan halaman tempat parkir sebesar Rp97.933.000,00. Sedangkan mutasi kurang aset tidak berwujud lainnya sebesar Rp0,00. Mutasi aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp 1.291.594.200,00
Penambahan:	
- Reklas dari bangunan gedung kantor (perencanaan pembuatan palang nama Kantor Gubernur)	Rp 55.495.000,00
- Reklas dari bangunan gedung garasi/pool (perencanaan pembangunan tempat parkir, gedung genset dan gedung bank pembantu)	Rp 98.004.500,00
- Reklas dari mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan (perencanaan penataan taman dan halaman tempat parkir)	Rp 97.933.000,00
Jumlah (b)	Rp 251.432.500,00
Pengurangan:	
-	
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 251.432.500,00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp 1.543.026.700,00

Rincian saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Software	444.099.200,00	-	-	444.099.200,00
2	Kajian	847.495.000,00	251.432.500,00	-	1.098.927.500,00
	Jumlah	1.291.594.200,00	251.432.500,00	-	1.543.026.700,00

Saldo aset tidak berwujud di BA rekon aset tetap triwulan IV sebesar Rp1.543.026.700,00 sama dengan neraca di Simda Keuangan.

d) Aset Lain-Lain

Rp7.464.794.839,70

Aset Lain-lain yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.464.794.839,70, sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp7.464.794.839,70. Penambahan aset lain-lain berasal dari reklas aset tetap yaitu aset yang akan dihibahkan sebesar Rp1.182.600.100,00 dan akumulasi penyusutan aset yang akan dihibahkan sebesar Rp(359.141.624,00). Pengurangan aset lain-lain karena penghapusan aset lain-lain (hibah) dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah ke Korem berupa kendaraan bermotor perorangan KH 1766 AU (Mitshubishi/Pajero Sport) sesuai BAST Hibah Barang Milik Daerah Pada Biro Umum No. 032/91/BU tanggal 23 Juni 2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp491.362.400,00 dan akumulasi penyusutan aset yang akan dihibahkan sebesar Rp(157.937.913,00).
- Hibah ke Pengadilan Tinggi berupa kendaraan bermotor perorangan KH 1764 AU (Mitshubishi/Pajero Sport) sesuai BAST Hibah Barang Milik Daerah Pada Biro Umum No. 032/90/BU tanggal 24 Juni 2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp491.262.000,00 dan akumulasi penyusutan aset yang akan dihibahkan sebesar Rp(157.905.643,00).
- Hibah ke Unpar berupa peralatan studio video film dan lain-lain (videotron) sesuai BAST Hibah Barang Milik Daerah Pada Biro Umum No. 032/89/BU tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp199.975.700,00 dan akumulasi penyusutan aset yang akan dihibahkan sebesar Rp(43.328.068,00).

Mutasi aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp	7.464.794.839,70
Penambahan:		
- Reklas dari aset tetap (kendaraan bermotor perorangan) yang akan dihibahkan ke Korem	Rp	491.362.400,00
- Reklas dari aset tetap (kendaraan bermotor perorangan) yang akan dihibahkan ke Pengadilan Tinggi	Rp	491.262.000,00
- Reklas dari aset tetap (peralatan studio video, berupa videotron) yang akan dihibahkan ke Unpar	Rp	199.975.700,00
- Reklas akm. peny. alat angkutan darat bermotor ke akm. peny. aset yang akan dihibahkan	Rp	157.937.913,00
- Reklas akm. peny. alat angkutan darat bermotor ke akm. peny. aset yang akan dihibahkan	Rp	157.905.643,00
- Reklas reklas akm. peny. alat studio ke akm. peny. aset yang akan dihibahkan	Rp	43.328.068,00
Jumlah (b)	Rp	1.541.771.724,00

Uraian	31 Desember 2020	
Pengurangan:		
- Penghapusan aset lain-lain (aset yang dihibahkan) kendaraan roda 4 ke korem	Rp	491.362.400,00
- Penghapusan aset lain-lain (aset yang akan dihibahkan) berupa kendaraan roda 4 ke pengadilan tinggi	Rp	491.262.000,00
- Penghapusan aset lain-lain (aset yang akan dihibahkan) berupa videotron ke unpar	Rp	199.975.700,00
- Penghapusan akumulasi penyusutan aset yang akan dihibahkan ke korem	Rp	157.937.913,00
- Penghapusan akumulasi penyusutan aset yang akan dihibahkan ke pengadilan tinggi	Rp	157.905.643,00
- Penghapusan akumulasi penyusutan aset yang akan dihibahkan ke unpar	Rp	43.328.068,00
Jumlah (c)	Rp	1.541.771.724,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp	7.464.794.839,70

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Aset Lain-Lain	29.885.838.491,37	1.182.600.100,00	1.182.600.100,00	29.885.838.491,37
2	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(9.503.940.478,00)	-	-	(9.503.940.478,00)
3	Akumulasi Penyusutan Barang Tidak Diketahui Keberadaannya	(12.917.103.173,67)	-	-	(12.917.103.173,67)
4	Akumulasi Penyusutan Barang Yang Akan Dihibahkan	-	359.171.624,00	359.171.624,00	-
	Jumlah	7.464.794.839,70	1.541.771.724,00	1.541.771.724,00	7.464.794.839,70

Saldo aset lain-lain di neraca simda keuangan disajikan dalam bentuk nilai buku sebesar Rp7.464.794.839,70. Nilai perolehan aset lain-lain di simda keuangan sebesar Rp29.885.838.491,37 dan akumulasi penyusutan aset barang rusak berat sebesar Rp(9.503.940.478,00) serta akumulasi penyusutan barang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp(12.917.103.173,67) sehingga diperoleh nilai buku aset lain-lain sebesar Rp7.464.794.839,70. Dalam BA rekon aset triwulan IV, saldo aset lain-lain disajikan dalam bentuk nilai perolehan sebesar Rp29.885.838.491,37 dan aset yang akan dihibahkan sebesar Rp1.182.600.100,00. Akumulasi penyusutan aset lain-lain (kondisi rusak berat) sebesar Rp(9.503.940.478,00) dan akumulasi penyusutan aset lain-lain (kondisi tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp(12.917.103.173,67).

e) Tagihan TGR

Rp0,00

Saldo tagihan TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rp0,00

f) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran **Rp0,00**

Saldo tagihan piutang penjualan angsuran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rp0,00

g) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud **Rp(910.534.750,00)**

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud yang dimiliki Biro Umum per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(910.534.750,00), sedangkan per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp(776.239.700,00). Mutasi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	Rp (776.239.700,00)
Penambahan:	
- Beban amortisasi 2020	Rp 134.294.750,00
Jumlah (b)	Rp 134.294.750,00
Pengurangan:	
Jumlah (c)	
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 134.294.750,00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp (910.534.450,00)

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(776.239.700,00)	134.294.750,00	-	(910.534.450,00)
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-			-
	Jumlah	(776.239.700,00)	(134.294.750,00)	-	(910.534.450,00)

V.1.6. KEWAJIBAN

Karakteristik esensial kewajiban adalah pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban terdiri atas:

1. Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang penghitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

b) Utang Bunga

Saldo utang bunga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

e) Utang Beban

Saldo utang beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp318.611.337,00 dan per 31 Desember 2019 Rp295.982.870,00. Utang beban tersebut adalah kekurangan gaji pegawai per 31 Desember 2020 sebesar 8.382.257,00, pengakuan biaya listrik sebesar Rp130.860.257,00 dan telepon sebesar Rp179.368.529,00 untuk pemakaian bulan desember 2020 yang dibayarkan di tahun 2021. Biaya air untuk bulan desember 2020 sudah dibayarkan di akhir tahun 2020. Rincian utang beban dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)			
	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Kekurangan gaji pegawai	8.382.551,00	-
2.	Telepon (pemakaian bln desember)	130.860.257,00	122.325.839,00
3.	Air (pemakaian bln desember)	-	-
4.	Listrik (pemakaian bln desember)	179.368.529,00	173.657.031,00
Jumlah		318.611.337,00	295.982.870,00

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri

Saldo utang dalam negeri per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo utang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

3. Ekuitas

Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp242.978.153.577,48 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp253.422.290.542,23. Ekuitas berasal dari ekuitas awal 2020 sebesar Rp253.422.290.542,23 ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp(108.531.491.204,01), ditambah koreksi ekuitas

lainnya sebesar Rp(178.579.843,00), dan ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp98.265.934.082,26 sehingga diperoleh nilai ekuitas sebesar Rp242.978.153.577,48.

V.1.7. PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Biro Umum yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas akhir Biro Umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp242.978.153.577,48, sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp253.422.290.542,23. Perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	Rp 253.422.290.542,23
Surplus/Defisit-LO	Rp (108.531.491.204,01)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp -
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (178.579.843,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	Rp 98.265.934.082,26
Saldo Per 31 Desember 2020	Rp 242.978.153.577,48

Keterangan:

1. Ekuitas awal
Berasal dari ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp253.422.290.542,23.
2. Surplus/Defisit – LO
Surplus/Defisit – LO tahun 2020 sebesar Rp(108.531.491.204,01) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada neraca. Surplus/Defisit – LO berasal dari Laporan Operasional (LO) per 31 Desember Tahun 2019.
3. Koreksi ekuitas Lainnya
Koreksi ekuitas Lainnya tahun 2020 sebesar Rp(178.579.843,00) sedangkan per 31 Desember adalah sebesar Rp3.600.437.917,00. Rincian koreksi ekuitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	Saldo Awal (koreksi ekuitas lainnya tahun 2019)	-	-	(3.600.437.917,00)
2	Penyesuaian saldo awal per rincian objek kendaraan bermotor perorangan sesuai simda BMD	-	2.582.723.045,00	(1.017.714.872,00)
3	Penyesuaian saldo awal per rincian objek kendaraan bermotor penumpang sesuai simda BMD	3.452.106.295,00	-	(4.469.821.167,00)
4	Penyesuaian saldo awal per rincian objek kendaraan bermotor angkutan barang sesuai simda BMD	-	2.358.426.246,00	(2.111.394.921,00)
5	Penyesuaian saldo awal per rincian objek kendaraan bermotor khusus sesuai simda BMD	1.464.952.696,00	-	(3.576.347.617,00)
6	Penyesuaian saldo awal per rincian objek kendaraan beroda dua sesuai simda BMD	24.090.300,00	-	(3.600.437.917,00)
7	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat penyimpanan perlengkapan kantor sesuai simda BMD	-	42.801.000,00	(3.557.636.917,00)
8	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat kantor lainnya sesuai simda BMD	-	493.936.528,00	(3.063.700.389,00)
9	Penyesuaian saldo awal per rincian objek meubelair sesuai simda BMD	-	1.443.827.369,00	(1.619.873.020,00)
10	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat pengukur waktu sesuai simda BMD	5.000.000,00	-	(1.624.873.020,00)
11	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat pembersih sesuai simda BMD	-	30.504.000,00	(1.594.369.020,00)
12	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat pendingin sesuai simda BMD	-	5.850.000,00	(1.588.519.020,00)
13	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat dapur sesuai simda BMD	-	87.298.500,00	(1.501.220.520,00)
14	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat rumah tangga lainnya (home use) sesuai simda BMD	-	75.048.334,00	(1.426.172.186,00)
15	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat pemadam kebakaran sesuai simda BMD	69.700.000,00	-	(1.495.872.186,00)
16	Penyesuaian saldo awal per rincian objek komputer unit/jaringan sesuai simda BMD	-	419.350.000,00	(1.076.522.186,00)
17	Penyesuaian saldo awal per rincian objek personal komputer sesuai simda BMD	391.250.000,00	-	(1.467.772.186,00)
18	Penyesuaian saldo awal per rincian objek peralatan mini komputer sesuai simda BMD	-	238.383.750,00	(1.229.388.436,00)
19	Penyesuaian saldo awal per rincian objek peralatan personal komputer sesuai simda BMD	238.133.750,00	-	(1.467.522.186,00)
20	Penyesuaian saldo awal per rincian objek peralatan jaringan sesuai simda BMD	244.737.528,00	-	(1.712.259.714,00)
21	Penyesuaian saldo awal per rincian objek meja kerja pejabat sesuai simda BMD	-	98.464.800,00	(1.613.794.914,00)
22	Penyesuaian saldo awal per rincian objek meja rapat pejabat sesuai simda	-	281.342.000,00	(1.332.452.914,00)
23	Penyesuaian saldo awal per rincian objek kursi kerja pejabat sesuai simda BMD	-	223.679.000,00	(1.108.773.914,00)
24	Penyesuaian saldo awal per rincian objek kursi rapat pejabat sesuai simda BMD	130.739.330,00	-	(1.239.513.244,00)
25	Penyesuaian saldo awal per rincian objek kursi tamu di ruangan pejabat sesuai simda BMD	2.002.188.373,00	-	(3.241.701.617,00)
26	Penyesuaian saldo awal per rincian objek lemari dan arsip pejabat sesuai simda BMD	194.508.800,00	-	(3.436.210.417,00)
27	Penyesuaian saldo awal per rincian objek peralatan studio visual sesuai simda BMD	1.524.212.100,00	-	(4.960.422.517,00)
28	Penyesuaian saldo awal per rincian objek peralatan studio video dan film sesuai simda BMD	152.165.400,00	-	(5.112.587.917,00)
29	Penyesuaian saldo awal per rincian objek peralatan studio dan film A sesuai simda BMD	-	27.100.000,00	(5.085.487.917,00)
30	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat komunikasi telephone sesuai simda BMD	-	1.525.550.000,00	(3.559.937.917,00)
31	Penyesuaian saldo awal per rincian objek alat komunikasi radio UHF sesuai simda BMD	40.500.000,00	-	(3.600.437.917,00)
32	Penyesuaian saldo awal per rincian objek bangunan gedung kantor sesuai simda BMD	-	3.522.110.720,99	(78.327.196,01)
33	Penyesuaian saldo awal per rincian objek bangunan gudang sesuai simda BMD	-	871.854.900,00	793.527.703,99
34	Penyesuaian saldo awal per rincian objek bangunan gedung untuk pos jaga sesuai simda BMD	99.062.500,00	-	694.465.203,99
35	Penyesuaian saldo awal per rincian objek bangunan gedung garasi/pool sesuai simda BMD	-	1.387.486.333,00	2.081.951.536,99
36	Penyesuaian saldo awal per rincian objek bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai simda BMD	7.341.932.454,00	-	(5.259.980.917,01)
37	Penyesuaian saldo awal per rincian objek rumah negara golongan I sesuai simda BMD	1.140.364.179,99	-	(6.400.345.097,00)
38	Penyesuaian saldo awal per rincian objek rumah negara golongan II sesuai simda BMD	-	2.848.207.180,00	(3.552.137.917,00)
39	Penyesuaian saldo awal per rincian objek rambu tidak bersuar sesuai simda BMD	48.300.000,00	-	(3.600.437.917,00)
40	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	-	32,00	(3.600.437.885,00)

No	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
41	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	7,00	-	(3.600.437.892,00)
42	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	3,00	-	(3.600.437.895,00)
43	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	-	3,00	(3.600.437.892,00)
44	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	-	1,00	(3.600.437.891,00)
45	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	-	1,00	(3.600.437.890,00)
46	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	2,00	-	(3.600.437.892,00)
47	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	2,00	-	(3.600.437.894,00)
48	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	6,00	-	(3.600.437.900,00)
49	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	-	1,00	(3.600.437.899,00)
50	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	2,00	-	(3.600.437.901,00)
51	Koreksi saldo awal karena selisih aplikasi	1,00	-	(3.600.437.902,00)
52	Pengakuan LPE Tahun 2019	-	3.600.437.917,00	15,00
53	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan alat bengkel bermesin (mapping)	13.828.749,00	-	(13.828.734,00)
54	Saldo awal akumulasi penyusutan alat pemeliharaan tanaman/ alat penyimpanan dan akumulasi penyusutan alat pengolahan (mapping)	-	300.697.722,00	286.868.988,00
55	Saldo awal akumulasi penyusutan alat pengolahan (mapping)	266.125.848,00	-	20.743.140,00
56	Saldo awal akumulasi penyusutan persenjataan non senjata api dan alat keamanan perlindungan (mapping)	-	561.474.558,00	582.217.698,00
57	Saldo awal akumulasi penyusutan persenjataan non senjata api (mapping)	761.379.791,00	-	(179.162.093,00)
58	Saldo awal akumulasi penyusutan peralatan komputer sesuai data aplikasi Simda BMD	-	582.250,00	(178.579.843,00)
JUMLAH		19.605.278.116,99	23.027.136.190,99	(178.579.843,00)

4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
- Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp98.265.934.082,26. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah RK PPKD. Rincian kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Saldo Awal	RK PPKD		Saldo Akhir
			Debet	Kredit	
1.	Pencairan UP	-	-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
2.	Pendapatan Retribusi	-	191.500.000,00	-	3.308.500.000,00
3.	Setoran Pengembalian Belanja	-	200.133.887,05	-	3.108.366.112,95
4.	SPJ GU	-	-	22.150.290.447,00	25.258.656.559,95
5.	SPJ LS	-	-	74.577.857.319,00	99.836.513.878,95
6.	Alih status aset	-	3.106.277.001,56	3.843.863.711,00	100.574.100.588,39
7.	Akumulasi Penyusutan Alih Status	-	2.957.107.897,00	1.478.774.360,00	99.095.767.051,39
8.	Setoran atas temuan BPK	-	825.205.354,13	-	98.270.561.697,26
9.	Setoran sisa uang persediaan (UP)	-	4.627.615,00	-	98.265.934.082,26
Jumlah		-	7.284.851.754,74	105.550.785.837,00	98.265.934.082,26

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir biro umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp242.978.153.577,48. Ekuitas akhir berasal dari ekuitas awal sebesar Rp253.422.290.542,23, ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp(108.531.491.204,01), ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp(178.579.843,00), dan ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp98.265.934.082,26 sehingga diperoleh nilai ekuitas akhir sebesar Rp242.978.153.577,48. Rincian ekuitas akhir sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	Rp 253.422.290.542,23
Surplus/Defisit-LO	Rp (108.531.491.204,01)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp -
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (178.579.843,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	Rp 98.265.934.082,26
Saldo Per 31 Desember 2020	Rp 242.978.153.577,48

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Pengungkapan penting lainnya

Tidak ada kejadian luar biasa yang signifikan baik bencana alam maupun sosial yang di luar kemampuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

VI.2 Temuan dan tindak lanjut temuan BPK

1. Temuan

- a) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor 45.C/LHP/XIX.PAL/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, pada Biro Umum terdapat temuan yang perlu ditindak lanjuti yaitu **terjadi kelebihan pembayaran biaya pengelolaan kegiatan dan pengelolaan teknis pada Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp240.007.000,00.**
- b) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor 45.C/LHP/XIX.PAL/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, pada Biro Umum terdapat temuan yang perlu ditindak lanjuti yaitu **terjadi kelebihan pembayaran atas pengadaan bangunan tempat pertemuan Aula Jayang Tingang sebesar Rp62.346.899,58.**
- c) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor 45.C/LHP/XIX.PAL/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, pada Biro Umum terdapat temuan yang perlu ditindak lanjuti yaitut**erjadi kelebihan pembelian sofa rumah jabatan Gubernur tahun 2019 sebesar Rp522.851.454,55.**

2. Tindak Lanjut Temuan

- a) KPA atas pembayaran biaya pengelolaan kegiatan.Kelebihan pembayaran sebesar Rp240.007.000,00 sudah dikembalikan ke Kasda dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)			
No	Keterangan	Tgl Setor	Jml Setoran
1.	Pengembalian honorarium pengelola kegiatan pembangunan musholla tahun 2019	11, 12, 13, 14 Juni 2020	100.686.000,00
2.	Pengembalian honorarium pengelola kegiatan pembangunan ruang kerja Gubernur tahun 2019	13,18, 27, 29 Mei 2020, 11 Juni 2020	111.475.000,00
3.	Pengembalian honorarium pengelola kegiatan pembangunan gudang biro umum tahun 2019	18 Mei 2020	14.846.000,00
4.	Pengembalian honorarium pengelola kegiatan pembangunan gedung tempat pertemuan Aula Jayang Tingang tahun 2019	11 Juni 2020	13.000.000,00
Jumlah			240.007.000,00

- b) Kelebihan pembayaran sebesar Rp62.346.899,58, sudah dikembalikan ke Kasda dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tgl Setor	Jml Setoran
1.	Pembayaran Kelebihan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Aula Jayang Tingang Tahun Anggaran 2019	02 Juni 2020	62.346.899,58
Jumlah			62.346.899,58

- c) Kelebihan pembelian sebesar Rp522.851.454,55, sudah dikembalikan ke Kasda dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tgl Setor	Jml Setoran
1.	Pengembalian kelebihan pembelian sofa rumah jabatan Gubernur Tahun 2019	29 Mei 2020	40.000.000,00
2.	Pengembalian kelebihan pembelian sofa rumah jabatan Gubernur Tahun 2019	07 Agustus 2020	200.000.000,00
3.	Pengembalian kelebihan pembelian sofa rumah jabatan Gubernur Tahun 2019	13 Agustus 2020	282.851.454,55
Jumlah			522.851.454,55

VI.3 Rekening pemerintah

Rekening untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum di Bank Kalteng dengan nomer rekening 1000102003249 digunakan untuk transaksi non tunai, sedangkan untuk pencairan UP dan GU menggunakan rekening Bendahara Setda dengan nomer rekening1000102000139 di Bank Kalteng.

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar akrual. Basis kas masih diterapkan untuk Laporan Realisasi Anggaran karena penyusunan anggaran masih menggunakan basis kas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Mei 2021

**KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005